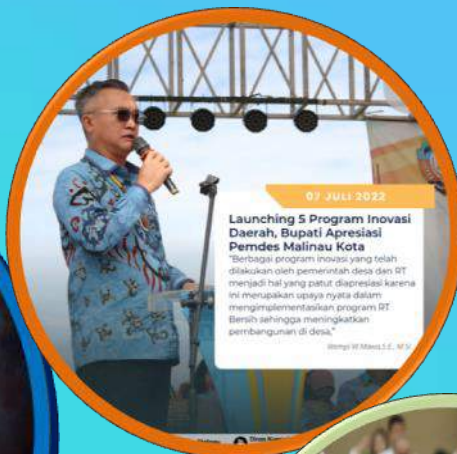


2022



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU



LKJIP TAHUN 2022

BerAKHLAK
Berakhlak Berprestasi, Berakhlak Berprestasi
Berakhlak Berprestasi, Berakhlak Berprestasi

**#bangga
melayani
bangsa**



Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Malinau Tahun 2022 dapat diselesaikan. LKjIP Kabupaten Malinau Tahun 2022 disusun berdasarkan dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021–2026. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Malinau **“Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan Yang Profesional”**..

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Malinau Tahun 2022 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan potret terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2022 serta sekaligus sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan.

Malinau, 4 Mei 2023

Bupati Malinau

WEMPIW. MAWA, SE., M.H



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
INSPEKTORAT**
Jl. Pusat Perkantoran Bupat Malinau Blok D Lantai 1
MALINAU

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Malinau untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja, Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2022 menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Malinau. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2022 telah disajikan secara akurat, andal dan valid

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2022.

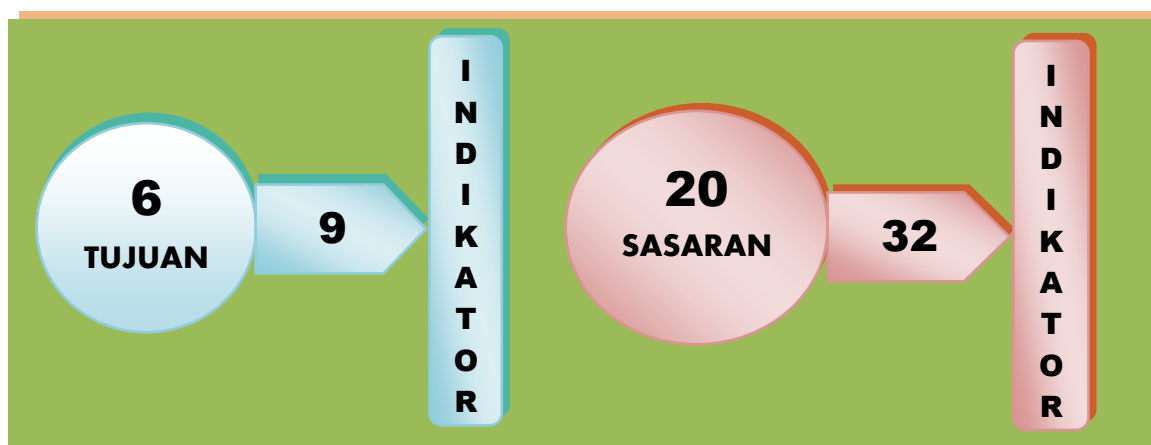
Malinau, 17 April 2022
Inspektur,

Dhani Suproto, S.Hut., M.Si
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19721212 200212 1 007

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2022 menyajikan informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau ditahun 2022 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau terdiri atas:



Capaian kinerja indikator kinerja utama tahun 2022 memberikan gambaran keberhasilan kinerja dalam pencapaian misi pembangunan Kabupaten Malinau. Ukuran tingkat tercapainya dan tidak tercapainya indikator akan lebih detail diuraikan pada Bab III.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka usia harapan hidup (Tahun)	71,94	71,50	99,38%
2	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,50	9,41	99,05%
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran perkapita (Ribu Rupiah)	10.150,00	10.304,00	101,52%
4	Terciptanya Kehidupan Yang	Angka Kriminalitas (%)	0.58%	0,09%	184%



	Aman, Tenteram dan Harmonis Serta Bebas Bencana	Indeks Resiko Bencana (Poin)	124,4	155,85	125,28%
5	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	83,36	82,61	99,10%
6	Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama (Poin)	79,25	80,95	102,14%
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	78,5	50,08	63,79
7	Meningkatnya produktifitas sektor-sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB (%)	4,82%	2,86%	59,33%
8	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB (%)	2,70%	2,85%	105,55%
		Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	1,84%	1,67%	90,76%
9	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro Yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas (%)	70%	72,4%	103,43%
		Persentase Peningkatan Usaha Mikro Dan Kecil (%)	70,60%	81,90%	116,01%
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Poin)	73,65	67,25	91,31%
11	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,14	3,30	120,28%
12	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah (Rp Milyar)	90.500.000.000	1.030.086.378.749	1.138%
13	Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	50,0%	12,16%	24,32%
		Persentase Pemukiman Yang Layak (%)	77%	81,16%	105,41%
		Rasio Rumah Layak Huni (Rasio)	1:1,074	1:1,15	29,41%



		Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi (%)	65%	94%	114,61%
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	67%	78,83%	117,66%
		Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi (%)	28,01%	23,87%	85,20%
14	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah	Persentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi (%)	96,33%	96,33%	100%
15	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	100	100	100%
		Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	53,65	62,38	116,27%
		Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	91,25	95,20	104,33
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	64,20	60,02	93,48
		Nilai LPPD	2.930	-	-
17	Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	Opini BPK	WTP	WTP	100%
18	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	5%	3,73%	74,6%
19	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	81	80,71	99,64%
20	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (%)	13,76%	13,76%	100%



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Pernyataan Reviu	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MALINAU.....	2
C. ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU	9
D. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>)	12
E. MAKSUD DAN TUJUAN	18
F. SUMBER DAYA MANUSIA.....	19
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	21

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2022	24
1. VISI	24
2. MISI	26
3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	29
4. INDIKATOR KINERJA	31
5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
6. PROGRAM	54
B. RENCANA KERJA TAHUNAN	64
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	67

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	74
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	76
C. REALISASI ANGGARAN	258

BAB IV PENUTUP	266
----------------------	-----

LAMPIRAN



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Malinau	7
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	8
Tabel 1.3	Rekomendasi Program dan Kegiatan Kabupaten Malinau KLHS RPJMD 2021-2026	13
Tabel 1.4	Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2022-2026 Berdasarkan Isu Strategis	17
Tabel 1.5	Data ASN Daerah Kabupaten Malinau berdasarkan Golongan	20
Tabel 2.1	Nilai-nilai atau Pokok-pokok Visa dan Penjabarannya	25
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Malinau	51
Tabel 2.3	Program-Program Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau ..	55
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja	74
Tabel 3.2	Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Kesehatan.....	77
Tabel 3.2.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	78
Tabel 3.2.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	79
Tabel 3.2.3	Perbandingan antara realisasi Kinerja dengan Nasional	79
Tabel 3.2.4	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022.....	85
Tabel 3.3	Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Meningkatkan Kesempatan pendidikan Masyarakat	87
Tabel 3.3.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	87
Tabel 3.3.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	88
Tabel 3.3.3	Perbandingan antara realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	88
Tabel 3.3.4	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022.....	93
Tabel 3.4	Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 meningkatnya daya beli masyarakat	93
Tabel 3.4.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	94
Tabel 3.4.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	95
Tabel 3.4.3	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022.....	98
Tabel 3.5	Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 terciptanya Kehidupan	



	Yang Aman, Tentram dan Harmonis Serta Bebas Bencana	99
Tabel 3.5.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	99
Tabel 3.5.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	100
Tabel 3.4.3	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022.....	103
Tabel 3.5.4	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	103
Tabel 3.5.5	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah	104
Tabel 3.5.6	Perbandingan antara realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	105
Tabel 3.5.7	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022.....	108
Tabel 3.6	Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 Meningkatkan Kesetaraan Gender	109
Tabel 3.6.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	110
Tabel 3.6.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	110
Tabel 3.6.3	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022	112
Tabel 3.7	Evaluasi Pencapaian Sasaran 6 Mantapnya Kehidupan Keagamaan serta karakter dan budaya masyarakat	113
Tabel 3.7.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	114
Tabel 3.7.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	115
Tabel 3.7.3	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022	118
Tabel 3.7.4	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	118
Tabel 3.7.5	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	119
Tabel 3.7.6	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022	122
Tabel 3.8	Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 Meningkatkan Produktivitas Sektor-Sektor Ekonomi Primer Berorientasi Pada Potensi dan Karakteristik Lokal	123
Tabel 3.8.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	124
Tabel 3.8.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	125



Tabel 3.8.3	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022	128
Tabel 3.9	Evaluasi Pencapaian Sasaran 8 Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi dan Karakteristik Lokal	129
Tabel 3.9.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	130
Tabel 3.9.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	130
Tabel 3.9.3	Jenis dan Kelompok Usaha Industri Di Kabupaten Malinau Tahun 2022.....	132
Tabel 3.9.4	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022	136
Tabel 3.9.5	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	136
Tabel 3.9.6	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	137
Tabel 3.9.7	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022	140
Tabel 3.10	Evaluasi Pencapaian Sasaran 9 Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro Berkualitas	141
Tabel 3.10.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	141
Tabel 3.10.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	142
Tabel 3.10.3	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022	145
Tabel 3.10.4	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	146
Tabel 3.10.5	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	146
Tabel 3.10.6	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022	149
Tabel 3.11	Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 Meningkatnya Ketahanan Pangan	149
Tabel 3.11.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	150
Tabel 3.11.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	151
Tabel 3.11.3	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022	158
Tabel 3.12	Evaluasi Pencapaian Sasaran 11 Menurunnya Angka Pengangguran	159
Tabel 3.12.1	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	160
Tabel 3.12.2	Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja	



Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	160
Tabel 3.12.3 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Kabupaten Malinau Tahun 2022	161
Tabel 3.12.4 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022....	164
Tabel 3.13 Evaluasi Pencapaian Sasaran 12 Meningkatnya Investasi Daerah	164
Tabel 3.13.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	165
Tabel 3.13.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	165
Tabel 3.13.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022	168
Tabel 3.14 Evaluasi Pencapaian Sasaran 13 Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan	169
Tabel 3.14.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	170
Tabel 3.14.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	171
Tabel 3.14.3 Data Status Jalan Kabupaten	173
Tabel 3.14.4 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022.....	175
Tabel 3.14.5 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	175
Tabel 3.14.6 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	176
Tabel 3.14.7 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022.....	178
Tabel 3.14.8 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	179
Tabel 3.14.9 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	180
Tabel 3.14.10 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022.....	182
Tabel 3.14.11 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	182
Tabel 3.14.12 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	183
Tabel 3.14.13 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022.....	186
Tabel 3.14.14 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	187
Tabel 3.14.15 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	188
Tabel 3.14.16 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022.....	190
Tabel 3.14.17 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja	



Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	190
Tabel 3.14.18 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	191
Tabel 3.14.19 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022.....	193
Tabel 3.15 Evaluasi Pencapaian Sasaran 14 Meningkatnya Layanan Teknologi Yang Membuka Keterisolasia Daerah	194
Tabel 3.16 Evaluasi Pencapaian Sasaran 15 Meningkatnya kualitas Lahan, air dan udara	203
Tabel 3.16.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	204
Tabel 3.16.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	204
Tabel 3.16.3 Perbandingan antara realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	205
Tabel 3.16.4 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022.....	208
Tabel 3.16.5 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	209
Tabel 3.16.6 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	210
Tabel 3.16.7 Perbandingan antara realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	210
Tabel 3.16.8 Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Air	212
Tabel 3.16.9 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022.....	215
Tabel 3.16.10 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	216
Tabel 3.16.11 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah	217
Tabel 3.16.12 Perbandingan antara realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	217
Tabel 3.16.13 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022.....	223
Tabel 3.17 Evaluasi Pencapaian Sasaran 16 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	224
Tabel 3.17.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	225
Tabel 3.17.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	226
Tabel 3.17.3 Capaian Kinerja SAKIP Kabupaten Malinau Tahun 2022.....	227
Tabel 3.17.4 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022....	233
Tabel 3.18 Evaluasi Pencapaian Sasaran 17 Terselenggaranya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari KKN	235
Tabel 3.18.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja	



Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	235
Tabel 3.18.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	236
Tabel 3.18.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022....	239
Tabel 3.19 Evaluasi Pencapaian Sasaran 18 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	240
Tabel 3.19.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	241
Tabel 3.19.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	241
Tabel 3.20 Evaluasi Pencapaian Sasaran 19 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	245
Tabel 3.20.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	246
Tabel 3.20.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	247
Tabel 3.20.3 Peringkat Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2022	248
Tabel 3.20.4 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022....	250
Tabel 3.21 Evaluasi Pencapaian Sasaran 20 Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	251
Tabel 3.21.1 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	252
Tabel 3.21.2 Perbandingan antara realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Dengan Target Jangka Menengah.....	252
Tabel 3.21.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022....	258
Tabel 3.22 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Konsolidasi) Tahun Anggaran 2022	258
Tabel 3.23 Anggaran, Realisasi dan Capaian Berdasarkan Indikator dan Program	260
Tabel 3.24 Efisiensi Anggaran	264



Daftar Gambar

Gambar 1.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Malinau	4
Gambar 2.1 Keterkaitan Pokok-pokok Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Malinau Periode Tahun 2022-2026	28
Gambar 2.2 Tema/Fokus Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026	36
Gambar 2.3 Keterkaitan Program-program Pembangunan Kabupaten Malinau dengan Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Startegi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah selama satu tahun anggaran. Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Malinau menuju *good government* dan *clean government* itulah maka jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau berusaha menyajikan Laporan Kinerja untuk kegiatan Tahun 2022. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada intinya mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, wajib dilaksanakan secara akuntabel dan salah satu bentuknya adalah kewajiban penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2022 ini disusun dalam empat bab masing-masing Bab I merupakan Pendahuluan, Bab II berisi Perencanaan Kinerja, Bab III berisi Akuntabilitas Kinerja, Bab IV berisi Penutup.

Materi yang disajikan pada laporan ini didasarkan atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Substansi pelaporan didasarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan



perencanaan strategis dan pengaruhnya terhadap proses perwujudan kondisi akhir rencana lima tahunan, yang ditetapkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang pada gilirannya pelaporan ini prinsipnya menggambarkan realisasi tahapan pencapaian proses perwujudan cita-cita Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam visi, misi dan program strategis RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Malinau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2022, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD), berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan konsep *good governance*, selain itu merupakan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil-hasil kinerja pemerintahan pada tahun 2022.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MALINAU

Kabupaten Malinau merupakan satu kabupaten dari empat kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur, yang dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu daerah yang mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. KONDISI GEOGRAFIS

Sesuai dengan kondisi geografis, Kabupaten Malinau beriklim tropikahumida dengan curah hujan berkisar antara $2.500 \geq 4.500$ mm per tahun, temperatur udara rata-rata 26°C dengan perbedaan temperatur siang dan malam antara $5^{\circ}\text{C} - 7^{\circ}\text{C}$, temperatur minimum umumnya terjadi pada



bulan Nopember sampai dengan Januari, sedangkan temperatur maksimum terjadi antara bulan April sampai dengan bulan Oktober.

Kabupaten Malinau termasuk Kabupaten yang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang sangat potensial dan bervariasi jenisnya, antara lain, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan budi daya hasil-hasilnya, pertambangan (batu bara, pasir kuarsa, emas, dll) dan pariwisata.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Kabupaten yang berbatasan dengan Malinau oleh Tim Penegasan Batas Daerah (BPD) Kabupaten Malinau sampai dengan tahun 2022, maka luas wilayah Kabupaten Malinau sebesar 38.973,56 km² yang merupakan daratan dengan topografi bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng, dan ketinggian dari permukaan laut dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 82.120 jiwa.

Sebagai daerah pegunungan dan perbukitan, Kabupaten Malinau memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah pariwisata dan konservasi alam. Akan tetapi jika dilihat dari letak geografisnya, wilayah Kabupaten Malinau memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah perdagangan karbon, karena 91 % wilayahnya masih berupa hutan murni.

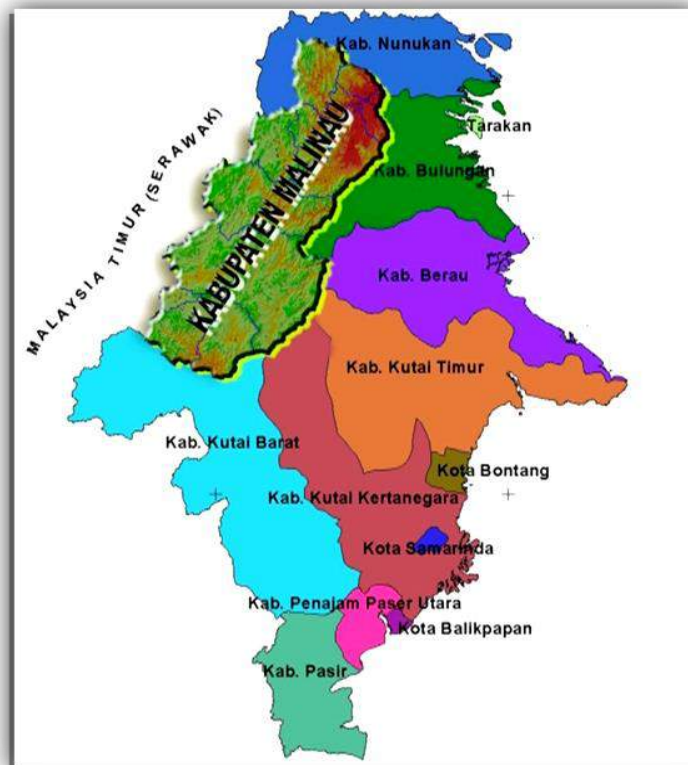
2. KONDISI DEMOGRAFIS

a. Letak Geografis

Kabupaten Malinau merupakan satu dari 4 (empat) Kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 16 November 2012. Secara administrasi, Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Secara astronomis, wilayah Kabupaten Malinau terletak antara 114°35'22" sampai dengan 116°50'55" Bujur Timur dan 1°21'36" sampai dengan 4°10'55" Lintang Utara. Secara geografis, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Tanah Tidung, Berau dan Kutai Timur; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, Mahakam Hulu, dan Kutai Kartanegara; dan sebelah barat berbatasan dengan Negara Malaysia Timur (Serawak).

Secara Administratif Kabupaten Malinau berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Nunukan.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Hulu dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Negara Malaysia bagian Timur (Serawak).



Gambar 1.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Malinau

Kabupaten Malinau terdiri dari 15 kecamatan, 5 Kecamatan diantaranya berbatasan langsung dengan negara Malaysia, 2 Kecamatan merupakan penyangga perbatasan (lihat Gambar 1.1), di mana Kabupaten Malinau termasuk sebagai Kabupaten perbatasan yang hanya dapat terjangkau melalui transportasi sungai dan udara yang menuntut biaya sangat tinggi dalam upaya peningkatan di bidang penyelenggaraan



pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau.

Keadaan topografi Kabupaten Malinau bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Selanjutnya juga dapat dibedakan atas kawasan perbukitan terjal di sebelah utara bagian barat, perbukitan sedang bagian tengah, dan daratan bergelombang landai di bagian timur. Perbukitan terjal di sebelah utara bagian barat merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1.500 m – 3.000 m di atas permukaan laut. Keadaan perbukitan lereng ini memiliki sudut lereng lebih dari 30% dan untuk daerah yang merupakan dataran tinggi, kemiringan berkisar 8 – 15%. Sedangkan untuk daerah perbukitan, kemiringan sangat terjal di atas 15%. Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar antara 0-50%.

Ditinjau dari segi administrasi, wilayah Kabupaten Malinau terdiri dari 15 kecamatan, yakni:

1. **Kecamatan Malinau Kota**, terdiri atas 6 desa yakni: Desa Malinau Kota, Desa Malinau Hulu, Desa Malinau Hilir, Desa Tanjung Keranjang, Desa Batu Lidung, Desa Pelita Kanaan;
2. **Kecamatan Malinau Utara**, terdiri atas 12 desa yakni: Desa Respen Tubu, Desa Semenggaris, Desa Putat, Desa Malinau Seberang, Desa Luso, Desa Belayan, Desa Kaliamok, Desa Lubak Manis, Desa Kelapis, Desa Salap, Desa Seruyung, Desa Sembuak Warod;
3. **Kecamatan Malinau Barat**, terdiri atas 9 desa yakni: Desa Tanjung Lapang, Desa Kuala Lapang, Desa Taras, Desa Sesua, Desa Sempayang, Desa Sentaban, Desa Long Knipe, Desa Long Bila, Desa Punan Bengalun;
4. **Kecamatan Malinau Selatan**, terdiri atas 9 desa yakni: Desa Paya Saturan, Desa Punan Rian, Desa Laban Nyarit, Desa Nunuk Tanah Kibang, Desa Langap, Desa Long Loreh, Desa Sengayan, Desa Pelencau, Desa Bila Bekayuk;
5. **Kecamatan Mentarang**, terdiri atas 9 desa yakni: Desa Long Bisai, Desa Paking, Desa Long Gafid, Desa Harapan Maju, Desa Mentarang Baru, Desa Temalang, Desa Long Liku, Desa Lidung Keminci, Desa Pulau Sapi;



6. **Kecamatan Mentarang Hulu**, terdiri atas 7 desa yakni: Desa Lung Barang, Desa Lung Sulit, Desa Lung Mekatif, Desa Lung Kebinu, Desa Semamu, Desa Lung Pala dan Desa Lung Simau;
7. **Kecamatan Pujungan**, terdiri atas 9 desa yakni : Desa Long Lame, Desa Long Aran, Desa Long Pua, Desa Long Paliran, Desa Belaka Pitau, Desa Long Jelet, Desa Long Ketaman, Desa Pujungan, Desa Long Bena;
8. **Kecamatan Bahau Hulu**, terdiri atas 6 desa yakni : Desa Long Alango, Desa Long Tebulo, Desa Long Uli, Desa Long Kemuat, Desa Long Berini, Desa Apau Ping;
9. **Kecamatan Sungai Boh**, terdiri atas 6 desa yakni : Desa Mahak Baru, Desa Dumu Mahak, Desa Long Lebusan, Desa Agung Baru, Desa Data Baru, Desa Long Top;
10. **Kecamatan Kayan Hulu**, terdiri atas 5 desa yakni : Desa Nawang Baru, Desa Long Temuyat, Desa Long Payau, Desa Long Betaoh, Desa Long Nawang;
11. **Kecamatan Kayan Hilir**, terdiri atas 5 desa yakni : Desa Data Dian, Desa Sungai Anai, Desa Long Sule, Desa Long Metun, Desa Long Pipa;
12. **Kecamatan Kayan Selatan**, terdiri atas 5 desa yakni : Desa Long Ampung, Desa Long Uro, Desa Metulang, Desa Sungai Barang, Desa Lidung Payau;
13. **Kecamatan Malinau Selatan Hulu**, terdiri atas 8 Desa yakni : Desa Long Lake, Desa Punan Mirau, Desa Long Rat, Desa Halanga, Desa Metut, Desa Long Jalan, Desa Nahakramo Baru, Desa Tanjung Nanga.
14. **Kecamatan Malinau Selatan Hilir**, terdiri atas 8 Desa yakni : Desa Setulang, Desa Setarap, Desa Punan Setarap, Desa Batu Kajang, Desa Gong Solok, Desa Punan Gong Solok, Desa Long Adiu dan Desa Punan Long Adiu;
15. **Kecamatan Sungai Tubu**, terdiri dari 5 Desa yakni Desa Long Titi, Desa Long Ranau, Desa Rian Tubu, Desa Long Nyau, Desa Long Pada.

b. Gambaran Umum Demografis

Masalah kependudukan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan. Penduduk memegang peranan yang sangat vital yaitu sebagai objek maupun subjek dari pembangunan itu sendiri.

Kondisi kependudukan dapat dilihat dari tingkat kelahiran, kematian dan mutasi penduduk. Sedangkan untuk menentukan sasaran pembangunan data kependudukan sangat diperlukan baik mengenai jumlah, jenis kelamin, struktur, komposisi maupun penyebaran/kepadatan penduduk suatu wilayah. Jumlah penduduk Kabupaten Malinau tahun 2022 sebanyak 82.629 jiwa yang terdiri dari 43.566 laki-laki dan 39.063 perempuan.

Penyebaran penduduk di Kabupaten Malinau terbesar ada di Kecamatan Malinau Kota sebesar 25.894 jiwa, disusul Kecamatan Malinau Utara sebesar 15.255 jiwa dan Malinau Barat sebesar 11.425 jiwa. Sedangkan jumlah terkecil ada di Kecamatan Sungai Tubu sebesar 890 jiwa dan Kecamatan Bahau Hulu sebesar 1.327 jiwa.

Kabupaten Malinau merupakan salah satu kabupaten yang paling luas wilayahnya pasca pemekaran wilayah di Provinsi Kalimantan Utara (UU No. 20 tahun 2012) yakni sekitar 54,8 persen dari luas Provinsi Kalimantan Utara, dengan jumlah penduduk yang paling sedikit. Ini berarti bahwa kurang seimbangnya antara jumlah penduduk dengan luas Kabupaten Malinau.

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Malinau

Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
Malinau Kota	142,07	0,36
Malinau Utara	1.091,18	2,80
Malinau Barat	765,41	1,97
Malinau Selatan	1.154,79	2,97
Mentarang	535,15	1,38
Mentarang Hulu	2.807,20	7,20
Pujungan	6.515,59	16,71
Bahau Hulu	3.103,38	7,97
Sungai Boh	2.801,51	7,19
Kayan Hulu	735,40	1,89
Kayan Hilir	11.863,19	30,43
Kayan Selatan	2.471,50	6,34
Malinau Selatan Hulu	2.171,21	5,58
Malinau Selatan Hilir	572,20	1,46
Sungai Tubu	2.243,78	5,75
Kabupaten Malinau	38,973,56	100

Sumber : Kabupaten Malinau Dalam Angka 2021

Berdasarkan data kependudukan Kabupaten Malinau pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Malinau berjumlah 82.629 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 43.566 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 39.063 jiwa.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Perkecamatan Berdasarkan
Jenis Kelamin Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	Mentarang	2.822	2.627	5.449
2	Malinau Kota	13.466	12.428	25.894
3	Pujungan	955	797	1.752
4	Kayan Hilir	863	675	1.538
5	Kayan Hulu	1.219	1.122	2.341
6	Malinau Selatan	2.763	2.336	5.099
7	Malinau Utara	8.129	7.126	15.255
8	Malinau Barat	5.988	5.437	11.425
9	Sungai Boh	1.256	1.080	2.336
10	Kayan Selatan	1.024	966	1.990
11	Bahau Hulu	723	604	1.327
12	Mentarang Hulu	929	857	1.786
13	Malinau Selatan Hilir	1.584	1.398	2.982
14	Malinau Selatan Hulu	1.374	1.191	2.565
15	Sungai Tubu	471	419	890
Jumlah		43.566	39.063	82.629

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2022



C. ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Malinau diberikan kewenangan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksudkan di atas terdiri atas kewenangan wajib meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan;
7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
12. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
13. Pelayanan administrasi penanaman modal;
14. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
15. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Malinau juga menyelenggarakan urusan lain-lain yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang



Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau. Perangkat daerah sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah (Tipe A);
- b. Sekretariat DPRD (Tipe C);
- c. Inspektorat Daerah (Tipe A);
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain; dan
- g. Kecamatan

Sekretariat Daerah terdiri atas:

1. Bagian Hukum
2. Bagian Tata Pemerintahan
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
4. Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam
5. Bagian Administrasi Pembangunan
6. Bagian Barang dan Jasa
7. Bagian Umum
8. Bagian Organisasi
9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
10. Bagian Perencanaan dan keuangan

Dinas Daerah terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan (Tipe B);
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Tipe A);
3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Tipe B);
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A);
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial (Tipe A);
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe B);
7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe A);
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Tipe A);
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe C);
10. Dinas Ketenagakerjaan (Tipe C)



11. Dinas Komunikasi dan Informatika (Tipe B);
12. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tipe A);
13. Dinas Perhubungan (Tipe C);
14. Dinas Ketahanan Pangan (Tipe B);
15. Dinas Pertanian (Tipe C);
16. Dinas Perikanan (Tipe C);
17. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A);
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B);
19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Tipe A).

Badan Daerah terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Tipe A);
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Tipe A);
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Tipe C);

Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain terdiri dari:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Tipe A)

Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Malinau Kota (Tipe A);
2. Kecamatan Malinau Utara (Tipe A);
3. Kecamatan Malinau Barat (Tipe A);
4. Kecamatan Malinau Selatan (Tipe A);
5. Kecamatan Mentarang (Tipe A);
6. Kecamatan Mentarang Hulu (Tipe A);
7. Kecamatan Pujungan (Tipe A);
8. Kecamatan Bahau Hulu (Tipe A);
9. Kecamatan Sungai Boh (Tipe A);
10. Kecamatan Kayan Hulu (Tipe A);
11. Kecamatan Kayan Hilir (Tipe A);
12. Kecamatan Kayan Selatan (Tipe A);
13. Kecamatan Malinau Selatan Hulu (Tipe A);
14. Kecamatan Malinau Selatan Hilir (Tipe A); dan
15. Kecamatan Sungai Tubu (Tipe A);

D. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Malinau dianalisis berdasarkan pemetaan permasalahan-permasalahan yang ada dan disinkronisasikan dengan isu-isu strategis yang ada di ranah internasional, nasional dan provinsi. Hasil analisis isu-isu strategis juga memperhatikan berbagai masukan dari diskusi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan selanjutnya perlu dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yang dikelompokkan berdasarkan aspek penting dalam agenda pembangunan adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pengelolaan dan keberlanjutan ketersediaan SDA (pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan budidaya dan SDA tak dapat pulih).
- 2) Belum mapannya struktur ekonomi yang menjamin pertumbuhan berkualitas dan pemerataan.
- 3) Belum optimalnya pemenuhan hak dasar atas pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dan bekerja, air bersih dan sanitasi, lingkungan hidup dan kawasan permukiman.
- 4) Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
- 5) Masih adanya kesenjangan wilayah dan belum optimalnya infrastruktur (infrastruktur layanan dasar, ekonomi, ketenagalistrikan, air dan Teknologi Informasi Komputer).
- 6) Belum kuatnya ketahanan pangan dan energi.
- 7) Menurunnya kualitas lingkungan hidup.
- 8) Belum primanya pelayanan publik dan stabilitas keamanan.

1. Telaahan KLHS RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026

Dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Malinau terdapat beberapa rekomendasi yang tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.3
Rekomendasi Program dan Kegiatan Kabupaten Malinau KLHS RPJMD
2021-2026

No TPB	Deskripsi Indikator	OPD Penanggungjawab	Program	Kegiatan
Pilar Sosial				
TPB 01	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Ketenagakerjaan	Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan Program	1. Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan 2. Penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan 3. Pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan
TPB 03	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan dan P2KB	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupate	1. Peningkatan upaya promosi kesehatan khusus terkait jaminan kesehatan bagi masyarakat 2. Peningkatan advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat terkait jaminan kesehatan
TPB 05	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1. Advokasi kebijakan dan pedampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan 2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 3. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan
Pilar Lingkungan				
TPB 11	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana di Kabupaten Malinau	1. Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten 2. Sosialisasi, komunikasi,



No TPB	Deskripsi Indikator	OPD Penanggungjawab	Program	Kegiatan
				informasi dan edukasi rawan bencana 3. Pengembangan system peringatan dini (early warning system) bencana
			2. Peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1. Penyusunan rencana penanggulangan Bencana 2. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 3. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapan bencana 4. Pengelolaan resiko bencana tingkat kabupaten 5. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 6. Penanganan pascabencana 7. Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana
Pilar Hukum dan Tata Kelola				
TPB 16	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	1. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, social, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	1. Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan bidang politik, hukum, social, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan. 2. Advokasi kebijakan dan pedampingan peningkatan partisipasi bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan



No TPB	Deskripsi Indikator	OPD Penanggungjawab	Program	Kegiatan
			2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1. Advokasi kebijakan dan pedampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan 2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 3. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan
Pilar Ekonomi				
TPB 17	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	1. Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 2. Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat 6. Perumusan



No TPB	Deskripsi Indikator	OPD Penanggungjawab	Program	Kegiatan
				Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi 7. Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi 8. Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 9. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10. Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sumber : RPJMD Tahun 2021-2026 Bab IV

2. SASARAN DAN ARAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021-2026

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Malinau, khususnya terkait dengan isu-isu strategis yang ada di wilayah ini, maka pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mencapai sasaran pokok (utama) sebagaimana disajikan pada Tabel 1.4 pada kolom “Sasaran Pokok Pembangunan”. Selanjutnya mengacu pada sasaran pokok yang hendak dicapai dalam pembangunan daerah Kabupaten Malinau 2021-2026 serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan, maka arahan pembangunan Kabupaten Malinau adalah sebagaimana yang disajikan pada Tabel 1.4 pada kolom “Arahan Pembangunan”.

Tabel 1.4

Sasaran Pokok dan Arahan Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2022 – 2026 Berdasarkan Isu Strategis

ISU STRATEGIS 1: <i>Belum optimalnya pengelolaan dan keberlanjutan ketersediaan SDA (pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan budidaya dan SDA tak dapat pulih)</i>	
Sasaran Pokok Pembangunan	Arahan Pembangunan
Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi industri melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan tambang yang berkelanjutan	Meningkatkan nilai pengelolaan SDA yang berkelanjutan
ISU STRATEGIS 2: <i>Belum mapannya struktur ekonomi yang menjamin pertumbuhan berkualitas dan pemerataan</i>	
Sasaran Pokok Pembangunan	Arahan Pembangunan
Berkembang dan semakin mantapnya ekonomi lokal dalam rangka transformasi struktur ekonomi dari dominasi sektor primer ke sektor ekonomi sekunder maupun tersier yang menyerap tenaga kerja	Meningkatkan pertumbuhan sektor primer dan industri pengolahan untuk penguatan kewirausahaan UMKM, dan koperasi yang berdayasaing
ISU STRATEGIS 3: <i>Belum optimalnya pemenuhan hak dasar atas pangan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dan bekerja, air bersih dan sanitasi, lingkungan hidup dan kawasan permukiman</i>	
Sasaran Pokok Pembangunan	Arahan Pembangunan
Meningkatnya taraf hidup masyarakat dalam pendapatan, penurunan kemiskinan, tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan gizi serta sistem perlindungan sosial	Meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan
ISU STRATEGIS 4: <i>Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia</i>	
Sasaran Pokok Pembangunan	Arahan Pembangunan
Meningkatnya daya saing SDM	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing
ISU STRATEGIS 5: <i>Belum optimalnya infrastruktur dan adanya kesenjangan antar wilayah</i>	
Sasaran Pokok Pembangunan	Arahan Pembangunan
Meningkatnya infrastruktur dan pemerataan pembangunan yang menurunkan tingkat kesenjangan antar-wilayah serta membuat wilayah semakin berkembang	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan
ISU STRATEGIS 6: <i>Belum kuatnya ketahanan pangan dan energi</i>	
Meningkatnya akses dan ketersediaan pangan dan energi	Meningkatkan akses dan ketersediaan pangan dan energi
ISU STRATEGIS 7: <i>Menurunnya kualitas lingkungan hidup</i>	
Sasaran Pokok Pembangunan	Arahan Pembangunan



Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup dengan menurunnya emisi gas rumah kaca dan bencana akibat kerusakan lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
ISU STRATEGISI 8: <i>Belum primanya pelayanan publik dan stabilitas keamanan</i>	
Sasaran Pokok Pembangunan	Arahan Pembangunan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan secara bersih, bertanggungjawab, efisien, efektif, tertib dan aman	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan ketertiban keamanan melalui pemantapan reformasi birokrasi

Sumber : RPJMD 2021-2026 BAB IV

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ketentuan ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus Sistem Pelaporan Kinerja.

Esensi dari sistem Pelaporan Kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Malinau adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian sektor publik di Kabupaten Malinau. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Pemerintahan Kabupaten Malinau untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Pemerintah Kabupaten dapat diwujudkan melalui implelementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang terencana dan terlaksana baik. Implelementasi sistem Pelaporan Kinerja diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang memuat visi, misi dan tujuan/sasaran strategis pemerintah Kabupaten Malinau dan secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah Kabupaten Malinau yang diperoleh. Pada setiap akhir tahun pelaksanaan program/kegiatan, serta capaian kinerjanya dikomunikasikan kepada *stakeholder* dalam wujud Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau.

Pelaporan Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu :

1. Pelaporan Kinerja merupakan sarana bagi pemerintah Kabupaten Malinau untuk menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* (Presiden, Kementerian PAN&RB, Kemendagri, Bappenas, Provinsi Kalimantan Utara, BPKP dan masyarakat).
2. Pelaporan Kinerja adalah sarana upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama Pelaporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Pelaporan Kinerja 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Malinau atas capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2022.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi menjadikan Pelaporan Kinerja 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Malinau bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah Kabupaten Malinau dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja pemerintah Kabupaten Malinau dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau periode 19 Desember 2022 sebanyak 3.745 orang terdiri dari Pria 1.770 orang dan Wanita 1.604 orang dengan komposisi menurut tingkat golongan yang sesuai pada tabel data sebagai berikut:

Tabel 1.5

Data ASN Daerah Kabupaten Malinau berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	I/a Juru Muda	0	0	0
2	I/b Juru Muda Tingkat I	2	1	3
3	I/c Juru	6	0	6
4	I/d Juru Tingkat I	17	4	21
Jumlah Golongan I		25	5	30
5	II/a Pengatur Muda	21	11	32
6	II/b Pengatur Muda Tk.I	81	67	148
7	II/c Pengatur	74	28	102
8	II/d Pengatur Tingkat I	169	155	324
Jumlah Golongan II		345	261	606
9	III/a Penata Muda	343	384	727
10	III/b Penata Muda Tk.I	221	317	538
11	III/c Penata	266	227	493
12	III/d Penata Tingkat I	273	233	506
Jumlah Golongan III		1103	1161	2264
13	IV/a Pembina	185	131	316
14	IV/b Pembina Tingkat I	84	46	130
15	IV/c Pembina Utama Muda	27	0	27
16	IV/d Pembina Utama Madya	1	0	1
17	IV/e/Pembina Utama	0	0	0
Jumlah Golongan IV		279	177	474
TOTAL		1.770	1.604	3.374

Sumber : BKPP Kabupaten Malinau Tahun 2022

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dalam pelaporan kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sasaran yang bersifat strategis, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia, terbatas pada indikator input, output dan outcome. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya berasal dari APBN dan Loan/BLN yang juga dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau, disajikan secara terpisah dan tidak dilakukan pengukuran kinerja untuk masing-masing kegiatan tersebut.

Pelaporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau selama Tahun 2022. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan di masa datang.

Sistematika penyajian Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan; menjelaskan secara ringkas profil Pemerintah Kabupaten Malinau dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja 2022.

Bab II Perencanaan Kinerja; menjelaskan rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Malinau untuk periode 2021-2026 dan rencana kinerja untuk Tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja; disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Akuntabilitas keuangan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, termasuk analisis



terhadap capaian indikator efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Bab IV Penutup; menjelaskan simpulan menyeluruh dari Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2022 ini dan menguraikan saran-saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode dua puluh tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode lima tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN), rencana strategis yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Malinau yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional, Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Bupati Malinau pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif.



A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021–2026 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

RPJMD Malinau sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah, merupakan komitmen kinerja (*performance agreement*) Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat pemilihnya, yang akan dicapai dalam periode 2021-2026. Tujuan, sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Malinau juga memperhatikan tujuan, sasaran dan program-program pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan jangka menengah tersebut disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumberdaya dan dana, serta hasil-hasil (keluaran dan manfaat) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan manfaat yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran.

RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Dengan memperhatikan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memperhatikan cita-cita dan harapan masyarakat, visi dan misi pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025, capaian kinerja pembangunan daerah serta hasil analisis permasalahan dan isu strategis daerah, maka visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah memiliki keselarasan, sehingga visi pembangunan Kabupaten Malinau dalam RPJMD tahun 2021–2026 adalah :

**TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI,
DAMAI DAN SEJAHTERA
DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL**

Visi yang menjadi dasar pijakan untuk menjabarkan misi pembangunan. Adapun nilai-nilai atau pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Nilai-nilai atau Pokok-pokok Visi dan Penjabarannya

Nilai-Nilai / Pokok-pokok Visi	Penjabaran
Kabupaten Malinau yang Mandiri	Bermakna: 1. Terwujudnya suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki kesempatan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung, serta mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di daerah sehingga mampu mencari solusi dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara tepat guna bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Malinau. 2. Terwujudnya kemajuan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar, terutama pada sektor pangan, Pendidikan, Kesehatan, termasuk juga terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perekonomian, kesempatan berusaha/berinvestasi dan bekerja, lingkungan hidup yang terjaga, serta aspek pembangunan lainnya, dengan penekanan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM). 3. Terciptanya kemampuan daya saing daerah dengan meningkatnya kualitas destinasi wisata dan jumlah desa wisata mandiri, peningkatan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan, peningkatan nilai produksi industri dan perdagangan, serta kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.
Kabupaten Malinau yang Damai	Terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat Kabupaten Malinau yang terdiri atas berbagai suku bangsa, ras, agama dan budaya dapat hidup dengan tentram dan rukun, hidup penuh toleransi dan harmoni, serta dapat mencapai keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dimana masyarakat berada pada situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Ditengah keragaman dan kemajemukan budaya, masyarakat dapat saling menghargai dan



	menghormati perbedaan yang ada. Visi ini diharapkan dapat menciptakan suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan supremasi hukum.
Kabupaten Malinau yang Sejahtera	Suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Malinau, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum dan sanitasi dengan harapan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, menurunkan jumlah masyarakat miskin, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kesenjangan sosial antar wilayah, serta meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
Pemerintahan yang Profesional	Terwujudnya suatu kondisi dimana berjalannya system pemerintahan secara benar dan bersih (<i>good and clean governance</i>) efektif dan efisien didukung oleh aparatur pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Visi ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran dan pelayan publik yang berkualitas, cepat, mudah, murah, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika profesi, serta mampu membangun azas kesetaraan dalam pelayanan publik, yaitu kesamaan dalam mendapatkan perlakuan dan pelayanan. Visi ini juga diharapkan dapat menegakan supremasi hukum (<i>Rule of law</i>) yang konsisten dan non diskriminatif dalam membangun kesadaran hukum dan hak asasi manusia pada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan baik secara langsung atau melalui Lembaga-lembaga perwakilan sah (termasuk masyarakat adat dan kelembagaannya) yang mewakili kepentingan mereka berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Sumber RJMD Tahun 2021-2026

2. M I S I

Misi merupakan rumusan pernyataan mengenai apa yang akan dikerjakan/dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian



tersebut serta berlandaskan pada makna visi Kabupaten Malinau, maka ditetapkan misi Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :



Visi merupakan tujuan/harapan/cita-cita yang diinginkan, sedangkan misi merupakan langkah atau penjabaran apa yang akan dikerjakan/dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karenanya visi dan misi memiliki keterkaitan yang erat. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari keterkaitan pokok-pokok visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2022–2026, sebagaimana diilustrasikan pada dibawah ini :



Gambar 2.1.

Keterkaitan Pokok-pokok Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Malinau
Periode Tahun 2022–2026

Berdasarkan gambar tersebut di atas dapat dijelaskan keterkaitan antara kemandirian, kedamaian, kesejahteraan maupun keprofesionalan pegawai pemerintah di Kabupaten Malinau dengan SDM, ekonomi, infrastruktur dan pemerintahan. Dimana kemandirian, kedamaian, kesejahteraan maupun keprofesionalan pegawai pemerintah di Kabupaten Malinau dipengaruhi secara simultan oleh berbagai faktor seperti keunggulan SDM, pembangunan ekonomi, pemerataan infrastruktur dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Guna merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Malinau, ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasikan secara lebih terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD berdasarkan misi pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut:

3.1 Tujuan

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi.
2. Menciptakan Suasana Kondusif Yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi dan Karakteristik Daerah.
4. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar.
5. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup.
6. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik (*good governance*).

3.2 Sasaran

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya kesempatan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatnya daya beli masyarakat.
4. Terciptanya kehidupan yang aman, tenteram dan harmonis dan serta bebas bencana.



5. Meningkatnya kesetaraan gender.
6. Mantapnya kehidupan keagamaan serta karakter dan budaya masyarakat.
7. Meningkatnya produktifitas sektor-sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal.
8. Meningkatnya nilai tambah sektor industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berorientasi pada potensi dan karakteristik wilayah.
9. Meningkatnya pertumbuhan koperasi serta usaha kecil dan mikro yang berkualitas.
10. Meningkatnya ketahanan pangan.
11. Menurunnya angka pengangguran.
12. Meningkatnya investasi daerah.
13. Meningkatnya kualitas dan akses infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
14. Meningkatnya layanan teknologi informasi yang membuka keterisolasian daerah.
15. Meningkatnya kualitas layanan lahan, air dan udara.
16. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah.
17. Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
18. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah.
19. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
20. Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan berbasis desa



4. INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021-2026

MISI I MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki daya Saing Tinggi	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup
		Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita
Menciptakan Suasana Kondusif Yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Ketahanan Nasional	Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenatram dan Harmonis Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas
			Indeks Resiko Bencana
		Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender
		Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama
			Indeks Pembangunan Kebudayaan

MISI II

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERBASIS PADA POTENSI DAERAH, KARAKTERISTIK DAN KEARIFAN LOKAL

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi dan Karakteristik Daerah	Pertumbuhan PDRB. Indeks Gini. Angka Kemiskinan Laju Inflasi.	Meningkatnya produktifitas sektor-sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB
		Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB
			Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB
		Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas
			Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan
		Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka
		Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah

MISI III MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap
			Pesentase Pemukiman Yang Layak
			Rasio Rumah Layak Huni
			Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi
			Persentase Penduduk Berakses Air Minum
			Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi
		Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisolasian Daerah	Persentase Wilayah Yang Terlayani Telekomunikasi
Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
			Indeks Kualitas Air
			Indeks Kualitas Udara

MISI IV

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik (good governance)	Indeks RB	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP
			Nilai LPPD
		Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	Opini BPK
		Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan status Desa Mandiri

5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan serangkaian tahapan yang berisikan rancangan utama/induk perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Beberapa langkah telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malinau Periode Tahun 2021 – 2026, antara lain:

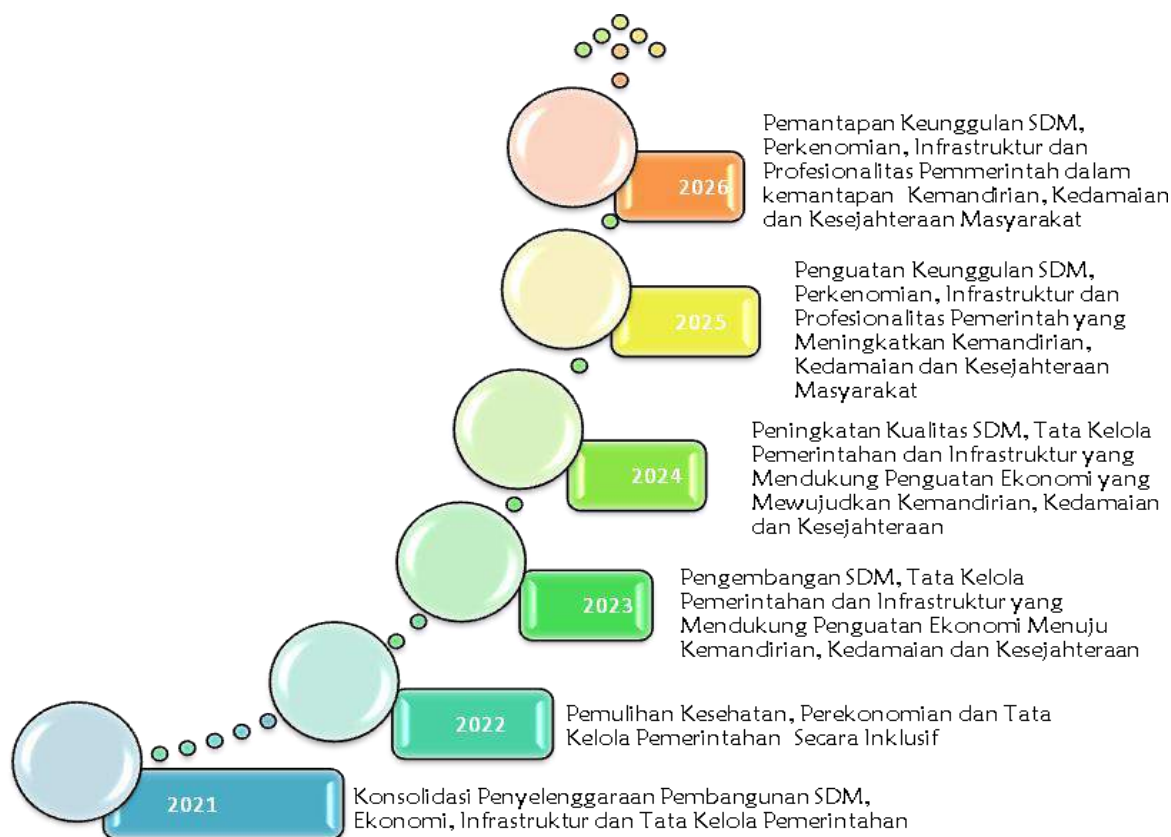
- (1) pengkajian terhadap sasaran pembangunan periode sebelumnya;
- (2) pengkajian gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan;

- (3) pengkajian permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
- (4) pengkajian lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi daerah;
- (5) mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki; dan
- (6) memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah.

Di sisi lain, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan dalam perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama periode kepala daerah terpilih guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Malinau Periode Tahun 2021–2026 yang rancang untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan memperhatikan urusan wajib pemerintah daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, agenda dan prioritas pembangunan nasional, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan kapasitas perangkat daerah Kabupaten Malinau.

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk merasionalkan pilihan strategi sehingga rencana pembangunan memiliki tema/fokus. Penekanan tema/fokus setiap tahun selama periode RPJMD harus memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.



Gambar 2.2
Tema/Fokus Pembangunan Kabupaten Malinau
Tahun 2021–2026

Berdasarkan Tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau sebagaimana sebagaimana disajikan pada Gambar 6.1, maka tahapan pembangunan secara berturut-turut dalam kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah Tahap Konsolidasi (tahap 1 tahun 2021), Tahap Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 (tahap II tahun 2022), Tahap Pengembangan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan (tahap III tahun 2023), Tahap Peningkatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan (tahap IV tahun 2024), Tahap Penguatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan (tahap V tahun 2025) dan Tahap Pemantapan Kemandirian,

Kedamaian dan Kesejahteraan (tahap VI tahun 2026). Secara rinci berkenaan dengan tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1) Tahap Konsolidasi

Tahun 2021 merupakan tahapan I atau “Tahapan Konsolidasi”, dimana tahun 2021 merupakan masa transisi pemerintahan Kabupaten Malinau dari kepala Daerah Periode 2016 – 2021 kepada Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) periode tahun 2021 – 2024. Oleh karenanya, pada awal kepemimpinan kepala daerah Kabupaten Malinau melakukan konsolidasi atas penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Malinau yang meliputi: (1) penyelenggaraan pembangunan SDM; (2) penyelenggaraan pembangunan ekonomi; (3) penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur fisik maupun non fisik; (4) penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik; (5) lain-lain sesuai urusan daerah. Sehingga tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2021 adalah “Konsolidasi Penyelenggaraan Pembangunan SDM, Ekonomi, Infrastruktur dan Tata Kelola Pemerintahan”. Sesuai kondisi, konsolidasi atas penyelenggaraan pembangunan tersebut tidak terlepas dari upaya penanganan pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia tak terkecuali Kabupaten Malinau sejak tahun 2020 yang lalu. Dimana penyelenggaraan pembangunan bidang SDM, ekonomi, infrastruktur dan tata Kelola pemerintahan diarahkan pada upaya mendukung penanganan pandemi Covid-19.

2) Tahap Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19

Tahun 2022 merupakan tahapan II atau “Tahapan Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19” dalam RPJMD Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2026, dimana tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2022 adalah “Pemulihan Kesehatan, Perekonomian dan Tata Kelola Pemerintahan Secara Inklusif”.

Hal ini sejalan dengan upaya penanganan pandemi covid-19 pada tahun 2020 - 2021. Makna dari tema/fokus pembangunan tersebut dideskripsikan sebagai berikut: Proses pemulihan berbagai aspek kehidupan pasca pandemi Covid-19 perlu dilakukan mengingat dampak pandemi Covid-19 setara dengan bencana besar atau perang, sehingga dibutuhkan program pemulihan kesehatan dan ekonomi dengan pemerintah sebagai pemain utamanya, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Malinau. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Malinau harus memastikan upaya pembangunan yang menjamin pemulihan kesehatan dan ekonomi, yang dilakukan melalui prioritas pembangunan sebagai berikut: (1) Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat; (2) Peningkatan ketahanan pangan; (3) Peningkatan produktifitas sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal; (4) Peningkatan nilai tambah sektor industri, perdagangan dan jasa; (5) Pembangunan infrastruktur pemerataan ekonomi; (6) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah; dan (7) Peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malinau harus tetap memperhatikan penyelenggaraan pembangunan bidang lainnya, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial, peningkatan dukungan sistem informasi pelayanan publik, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan lain-lain yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah Kabupaten Malinau.

3) Tahap Pengembangan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan

Tahun 2023 merupakan tahapan III atau “Tahapan Pengembangan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan” dalam RPJMD Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2026, dimana tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun

2023 adalah “Pengembangan SDM, Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur yang Mendukung Penguatan Ekonomi Menuju Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan”. Dalam hal ini, pengembangan berarti pemerintah selalu berusaha secara bertahap dan teratur melaksanakan pembangunan yang mengarah pada tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Secara rinci makna dari tema pembangunan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

a. Pengembangan SDM

Manusia merupakan modal utama pembangunan Kabupaten Malinau untuk menuju pembangunan yang mengikutsertakan semuanya dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Kabupaten Malinau berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter melalui: (1) pengembangan kualitas layanan kesehatan masyarakat; (2) pengembangan kualitas layanan pendidikan; (3) pengembangan produktivitas tenaga kerja; (4) pengembangan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan; (5) pengembangan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat; (6) pengembangan peran dan partisipasi gender dalam pembangunan; dan (7) pengembangan karakter bangsa, kehidupan keagamaan, politik dan budaya.

b. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah Kabupaten Malinau harus terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, termasuk dunia usaha yang memperkuat perekonomian daerah melalui: (1) pengembangan

perencanaan, dan evaluasi pembangunan; (2) pengembangan kualitas pelaporan, pembinaan dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah; (3) pengembangan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar; (4) pengembangan zona integritas yang bebas korupsi, bersih dan melayani; (5) pengembangan pendapatan pajak, retribusi, dan sumber-sumber lainnya; (6) pengembangan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; (7) pengembangan akses informasi publik yang akurat dan up to date; (8) pengembangan cakupan layanan publik; dan (9) pengembangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

c. Pengembangan Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan infrastruktur yang mampu menciptakan/menguatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeberlanjutan/berkesinambungan ini dilakukan melalui : (1) Pengembangan kondisi kualitas jalan, jembatan dan drainase; (2) Pengembangan fasilitas perhubungan darat, sungai dan laut; (3) Pengembangan ketersediaan air bersih konsumsi domestik (4) Pengembangan fasilitas perdagangan pasar tradisional; (5) Pengembangan pelayanan irigasi; (6) Pengembangan drainase lingkungan perumahan/ permukiman; (7) Pengembangan sarana prasarana sanitasi perumahan/ permukiman; (8) Pengembangan rumah layak huni; (9) Pengembangan jangkauan layanan informasi digital dan sistem informasi pelayanan publik; (10) Pengembangan pengendalian pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran

dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan; dan (11) Pengembangan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah.

d. Pengembangan Penguatan Ekonomi

Pengembangan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong perkembangan ekonomi yang mengarah pada penguatan ekonomi yang berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pengembangan ekonomi dapat dipacu untuk mencapai pertumbuhan yang lebih baik dan berdaya saing melalui: (1) Pengembangan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; (2) Pengembangan keberdayaan pelaku industri dan sarana prasarana industri; (3) Pengembangan perizinan dan kestabilan harga; (4) Pengembangan sarana distribusi perdagangan dan ekspor; (5) Pengembangan perlindungan terhadap konsumen; (6) Pengembangan peran jasa konstruksi dan jasa angkutan; (7) Pengembangan daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata alam dan lingkungan; (8) Pengembangan desa wisata budaya; Mengembangkan sumber daya ekonomi kreatif; (9) Pengembangan desa kreatif; (10) Pengembangan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat; (11) Pengembangan kinerja koperasi dan UMKM; dan (12) Pengembangan promosi dan pelayanan perijinan investasi.

4) Tahap Peningkatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan

Tahun 2024 merupakan tahapan IV atau “Tahapan Peningkatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan” dalam RPJMD Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2026, dimana tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2024

adalah “Peningkatan Kualitas SDM, Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur yang Mendukung Penguatan Ekonomi yang Mewujudkan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan”. Dalam hal ini, peningkatan dimaksud berarti pemerintah Kabupaten Malinau secara berkesinambungan melakukan upaya untuk semakin menambah/meningkatkan pengembangan dan pembangunan untuk mencapai kemajuan sesuai tujuan dan sasaran yang dikehendaki, meliputi peningkatan dalam aspek kualitas SDM, tata Kelola pemerintahan, infrastruktur dan ekonomi. Secara rinci makna dari tema pembangunan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

a. Peningkatan SDM

Pemerintah Kabupaten Malinau berkomitmen secara berkesinambungan untuk meningkatkan pengembangan dan pembangunan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang semakin sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter melalui: (1) Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat; (2) Peningkatan kualitas layanan pendidikan; (3) Peningkatan produktivitas tenaga kerja; (4) Peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan; (5) Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat; (6) Peningkatan peran dan partisipasi gender dalam pembangunan; dan (7) Peningkatan karakter bangsa, kehidupan keagamaan, politik dan budaya.

b. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Malinau semakin hadir dalam melindungi segenap warga masyarakat, memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas dengan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat dari berbagai kalangan tak terkecuali masyarakat dunia usaha yang berperan dalam

memperkuat perekonomian daerah melalui: (1) Peningkatan perencanaan, dan evaluasi pembangunan; (2) Peningkatan kualitas pelaporan, pembinaan dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah; (3) Peningkatan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar; (4) Peningkatan zona integritas yang bebas korupsi, bersih dan melayani; (5) Peningkatan pendapatan pajak, retribusi, dan sumber-sumber lainnya; (6) Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; (7) Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date; (8) Peningkatan cakupan layanan publik; dan (9) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

c. Peningkatan Infrastruktur

Peningkatan pengembangan infrastruktur dimaksudkan untuk semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar. Peningkatan pengembangan infrastruktur yang semakin menciptakan/ menguatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan/ berkesinambungan ini dilakukan melalui: (1) Peningkatan kondisi kualitas jalan, jembatan dan drainase; (2) Peningkatan fasilitas perhubungan darat, sungai dan laut; (3) Peningkatan ketersediaan air bersih konsumsi domestik; (4) Peningkatan fasilitas perdagangan pasar tradisional; (5) Peningkatan pelayanan irigasi; (6) Peningkatan drainase lingkungan perumahan/permukiman; (7) Peningkatan sarana prasarana sanitasi perumahan/permukiman; (8) Peningkatan rumah layak huni; (9) Peningkatan jangkauan layanan informasi digital dan sistem informasi pelayanan public; (10) Peningkatan pengendalian pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan; dan (11) Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia

usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah.

d. Peningkatan Penguatan Ekonomi

Hasil dari upaya pengembangan inovasi dan kualitas investasi harus terus ditingkatkan untuk semakin mendorong peningkatan ekonomi yang menguatkan perekonomian daerah. Peningkatan perekonomian ini dipacu untuk mencapai pertumbuhan yang semakin lebih baik dan semakin berdaya saing melalui: (1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; (2) Peningkatan keberdayaan pelaku industri dan sarana prasarana industri; (3) Peningkatan perizinan dan kestabilan harga; (4) Peningkatan sarana distribusi perdagangan dan ekspor; (5) Peningkatan perlindungan terhadap konsumen; (6) Peningkatan peran jasa konstruksi dan jasa angkutan; (7) Peningkatan daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata alam dan lingkungan; (8) Peningkatan desa wisata budaya; (9) Peningkatan sumber daya ekonomi kreatif; (10) Peningkatan desa kreatif; (11) Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat; (12) Peningkatan kinerja koperasi dan UMKM; dan (13) Peningkatan promosi dan pelayanan perijinan investasi.

5) Tahap Penguatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan

Tahun 2025 merupakan tahapan V atau “Tahapan Penguatan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan” dalam RPJMD Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2026, dimana tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2025 adalah “Penguatan Keunggulan SDM, Perekonomian, Infrastruktur dan Profesionalitas Pemerintah yang Meningkatkan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan Masyarakat”. Dalam hal ini, penguatan dimaksud berarti pemerintah Kabupaten Malinau

secara berkesinambungan melakukan upaya untuk semakin berdaya dalam melakukan pengembangan dan pembangunan untuk mencapai kemajuan sesuai tujuan dan sasaran yang dikehendaki, meliputi penguatan/keberdayaan dalam aspek keunggulan SDM, tata Kelola pemerintahan, infrastruktur dan ekonomi. Secara rinci makna dari tema pembangunan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

a. Penguatan Keunggulan SDM

Pemerintah Kabupaten Malinau terus melakukan upaya penguatan dalam pengembangan dan pembangunan keunggulan SDM yaitu sumber daya manusia yang semakin unggul dari sisi kesehatan, kecerdasan, inovasi, keterampilan, dan karakternya melalui: (1) Penguatan layanan kesehatan masyarakat; (2) Penguatan layanan pendidikan; (3) Penguatan produktivitas tenaga kerja; (4) Penguatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan; (5) Penguatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat; (6) Penguatan peran dan partisipasi gender dalam pembangunan; dan (7) Penguatan karakter bangsa, kehidupan keagamaan, politik dan budaya.

b. Penguatan keunggulan perekonomian

Penguatan perekonomian dipacu untuk mencapai pertumbuhan yang semakin prima/unggul melalui: (1) Penguatan keunggulan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; (2) Penguatan keunggulan keberdayaan pelaku industri dan sarana prasarana industri; (3) Penguatan keunggulan perizinan dan kestabilan harga; (4) Penguatan keunggulan sarana distribusi perdagangan dan ekspor; (5) Penguatan keunggulan perlindungan terhadap konsumen; (6) Penguatan keunggulan peran jasa konstruksi dan jasa angkutan; (7) Penguatan keunggulan daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata

alam dan lingkungan; (8) Penguatan keunggulan desa wisata budaya; (9) Penguatan keunggulan sumber daya ekonomi kreatif; (10) Penguatan keunggulan desa kreatif; (11) Penguatan keunggulan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat; (12) Penguatan keunggulan kinerja koperasi dan UMKM; dan (13) Penguatan keunggulan promosi dan pelayanan perijinan investasi.

c. Penguatan Keunggulan Infrastruktur

Penguatan keunggulan infrastruktur dimaksudkan untuk semakin memberdayakan pertumbuhan ekonomi dan memberdayakan pemenuhan pelayanan dasar. Penguatan keunggulan infrastruktur yang semakin memberdayakan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar secara berkelanjutan/berkesinambungan ini dilakukan melalui: (1) Penguatan keunggulan kondisi kualitas jalan, jembatan dan drainase; (2) Penguatan keunggulan fasilitas perhubungan darat, sungai dan laut; (3) Penguatan keunggulan ketersediaan air bersih konsumsi domestik; (4) Penguatan keunggulan fasilitas perdagangan pasar tradisional; (5) Penguatan keunggulan pelayanan irigasi; (6) Penguatan keunggulan drainase lingkungan perumahan/permukiman; (7) Penguatan keunggulan sarana prasarana sanitasi perumahan/permukiman; (8) Penguatan keunggulan rumah layak huni; (9) Penguatan keunggulan jangkauan layanan informasi digital dan sistem informasi pelayanan publik; (10) Penguatan keunggulan pengendalian pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan; dan (11) Penguatan keunggulan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah.

d. Penguatan Profesionalitas Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki tata kelola pemerintahan semakin kuat dan didukung aparatur yang professional serta dapat memberikan pelayanan publik yang semakin prima/unggul serta berperan dalam memperkuat perekonomian daerah melalui: (1) Penguatan profesionalitas dalam perencanaan, dan evaluasi pembangunan; (2) Penguatan profesionalitas dalam penyusunan dokumen pelaporan, pembinaan dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah; (3) Penguatan profesionalitas dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar; (4) Penguatan profesionalitas dalam mewujudkan zona integritas yang bebas korupsi, bersih dan melayani; (5) Penguatan profesionalitas dalam pengelolaan pendapatan pajak, retribusi, dan sumber-sumber lainnya; (6) Penguatan profesionalitas dalam pelaksanaan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; (7) Penguatan profesionalitas dalam penyediaan akses informasi publik yang akurat dan up to date; (8) Penguatan profesionalitas dalam cakupan layanan publik; dan (9) Penguatan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

6) Tahap Pemantapan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan

Tahun 2026 merupakan tahapan VI atau “Tahapan Pemantapan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan” dalam RPJMD Kabupaten Malinau periode tahun 2021 - 2026, dimana tema/fokus pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2026 adalah “Pemantapan Keunggulan SDM, Perkenomian, Infrastruktur dan Profesionalitas Pemmerintah dalam kemantapan Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan Masyarakat”. Dalam hal ini, pemnatapan dimaksud berarti

pemerintah Kabupaten Malinau secara berkesinambungan melakukan upaya untuk semakin memperkuat pengembangan dan pembangunan untuk mencapai kemajuan sesuai tujuan dan sasaran yang dikehendaki, meliputi kemantapan dalam aspek keunggulan SDM, tata Kelola pemerintahan, infrastruktur dan ekonomi. Secara rinci makna dari tema pembangunan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

a. Pemantapan Keunggulan SDM

Pemerintah Kabupaten Malinau terus melakukan upaya memperkuat/ memperkuat pengembangan dan pembangunan keunggulan SDM yaitu sumber daya manusia yang semakin mantap/kokoh dari sisi kesehatan, kecerdasan, inovasi, keterampilan, dan karakternya melalui: (1) Pemantapan layanan kesehatan masyarakat; (2) Pemantapan layanan pendidikan; (3) Pemantapan produktivitas tenaga kerja; (4) Pemantapan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan; (5) Pemantapan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat; (6) Pemantapan peran dan partisipasi gender dalam pembangunan; dan (7) Pemantapan karakter bangsa, kehidupan keagamaan, politik dan budaya.

b. Pemantapan Keunggulan Perekonomian

Pemantapan perekonomian dipacu untuk mencapai pertumbuhan yang sangat prima/unggul melalui: (1) Penguatan keunggulan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; (2) Penguatan keunggulan keberdayaan pelaku industri dan sarana prasarana industri; (3) Penguatan keunggulan perizinan dan kestabilan harga; (4) Penguatan keunggulan sarana distribusi perdagangan dan ekspor; (5) Penguatan keunggulan perlindungan terhadap konsumen; (6) Penguatan keunggulan peran jasa konstruksi dan jasa angkutan; (7) Penguatan keunggulan daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata

alam dan lingkungan; (8) Penguatan keunggulan desa wisata budaya; (9) Penguatan keunggulan sumber daya ekonomi kreatif; (10) Penguatan keunggulan desa kreatif; (11) Penguatan keunggulan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat; (12) Penguatan keunggulan kinerja koperasi dan UMKM; dan (13) Penguatan keunggulan promosi dan pelayanan perijinan investasi.

c. Pemantapan Keunggulan Infrastruktur

Pemantapan pengembangan infrastruktur dimaksudkan untuk semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat pemenuhan pelayanan dasar. Pemantapan keunggulan infrastruktur yang semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan/berkesinambungan ini dilakukan melalui: (1) Pemantapan keunggulan kondisi kualitas jalan, jembatan dan drainase; (2) Pemantapan keunggulan fasilitas perhubungan darat, sungai dan laut; (3) Pemantapan keunggulan ketersediaan air bersih konsumsi domestik; (4) Pemantapan keunggulan fasilitas perdagangan pasar tradisional; (5) Pemantapan keunggulan pelayanan irigasi; (6) Pemantapan keunggulan drainase lingkungan perumahan/permukiman; (7) Pemantapan keunggulan sarana prasarana sanitasi perumahan/permukiman; (8) Pemantapan keunggulan rumah layak huni; (9) Pemantapan keunggulan jangkauan layanan informasi digital dan sistem informasi pelayanan publik; (10) Pemantapan keunggulan pengendalian pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan; dan (11) Pemantapan keunggulan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah.

d. Pemantapan Profesionalitas Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki tata kelola pemerintahan semakin mantap/kokoh dan didukung aparatur yang professional serta dapat memberikan pelayanan publik yang sangat prima/unggul serta berperan dalam memantapkan/memperkokoh perekonomian daerah serta berperan dalam memantapkan/memperkokoh perekonomian daerah melalui: (1) Pemantapan profesionalitas dalam perencanaan, dan evaluasi pembangunan; (2) Pemantapan profesionalitas dalam penyusunan dokumen pelaporan, pembinaan dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah; (3) Pemantapan profesionalitas dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar; (4) Pemantapan profesionalitas dalam mewujudkan zona integritas yang bebas korupsi, bersih dan melayani; (5) Pemantapan profesionalitas dalam pengelolaan pendapatan pajak, retribusi, dan sumber-sumber lainnya; (6) Pemantapan profesionalitas dalam pelaksanaan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah; (7) Pemantapan profesionalitas dalam penyediaan akses informasi publik yang akurat dan up to date; (8) Pemantapan profesionalitas dalam cakupan layanan publik; dan (9) Pemantapan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tabel 2.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Malinau

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul			
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi	1.Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Peningkatan kualitas layanan Kesehatan masyarakat	1. Memantapkan UKP, UKM dan ketersediaan farmasi, makanan minuman dan alat kesehatan 2. Meningkatkan kompetensi SDM dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
	2.Meningkatnya kesempatan pendidikan masyarakat	1. Peningkatan kesempatan pendidikan masyarakat	1. Memantapkan pengelolaan pendidikan jenjang SD, SMP, PAUD dan kesetaraan/non formal
			2. Mengembangkan kurikulum muatan lokal, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
			3. Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat
2.Menciptakan suasana kondusif yang mendukung pengembangan Sumber daya Manusia	1.Terciptanya kehidupan yang aman, tenteram dan harmonis serta bebas bencana	1. Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat	1. Meningkatkan pemberdayaan perlindungan masyarakat
		2. Penguatan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana	1. Meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana
	2. Meningkatkan kesetaraan gender	1. Peningkatan peran dan partisipasi gender dalam pembangunan	1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan
			2. Meningkatkan cakupan layanan dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan
	3.Mantapnya kehidupan keagamaan serta karakter dan budaya masyarakat	1. Penguatan karakter bangsa, kehidupan keagamaan, politik dan budaya	1. Memperkuat ideologi pancasila
			2. Memperkuat kerukunan umat beragama, budaya politik dan fasilitasi penanganan konflik
MISI 2: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Daerah, karakteristik dan Kearifan Lokal			
1. Mewujudkan Pertumbuhan dan	1. Meningkatkan produktifitas sektor sektor	1. Peningkatan produksi dan produktivitas	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan



Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi dan Karakteristik Daerah	ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	pertanian dalam arti luas	dan peternakan	
	2. Meningkatkan nilai tambah sektor industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berorientasi pada potensi dan karakteristik wilayah	1. Pengembangan kea neragaman dan kualitas produk industri lokal	2. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan	
		2. Penguatan industri perdagangan dan jasa daerah	1. Memberdayakan pelaku industri dan Mengembangkan sarana prasarana industri	1. Mengendalikan perizinan dan menstabilkan harga
			2. Mengembangkan sarana distribusi perdagangan dan ekspor	2. Mengembangkan sarana distribusi perdagangan dan ekspor
			3. Memantapkan perlindungan terhadap konsumen	3. Memantapkan perlindungan terhadap konsumen
			4. Menguatkan peran jasa konstruksi dan jasa angkutan	4. Menguatkan peran jasa konstruksi dan jasa angkutan
		3. Peningkatan kunjungan wisata	1. Meningkatkan daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata alam dan lingkungan	1. Meningkatkan daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata alam dan lingkungan
			2. Mengembangkan desa wisata budaya	2. Mengembangkan desa wisata budaya
			1. Mengembangkan sumber daya ekonomi kreatif	1. Mengembangkan sumber daya ekonomi kreatif
	2. Mengembangkan desa kreatif	2. Mengembangkan desa kreatif		
3. Mantapnya kemandirian ekonomi masyarakat	1. Penguatan kemandirian masyarakat serta koperasi dan UMKM	1. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat		
2. Mengembangkan dan meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM	2. Mengembangkan dan meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM			
	4. Meningkatkan profesionalitas tenaga kerja	1. Peningkatan produktivitas tenaga kerja	1. Memantapkan perencanaan dan penempatan tenaga kerja	
		2. Pemantapan hubungan kerja dan pengendalian ketenagakerjaan	2. Meningkatkan pelatihan tenaga kerja	
	5. Meningkatkan ketahanan pangan	1. Peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan	1. Menguatkan hubungan industrial bidang ketenagakerjaan	
			1. Meningkatkan kedaulatan dan keamanan pangan	1. Meningkatkan kedaulatan dan keamanan pangan
2. Meningkatkan diversifikasi pangan	2. Meningkatkan diversifikasi pangan			
3. Meningkatkan peran angan kerawanan pangan	3. Meningkatkan peran angan kerawanan pangan			
	4. Meningkatkan Investasi Daerah	1. Penciptaan iklim usaha penanaman modal yang kondusif	1. Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan investasi	
			1. Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan investasi	
MISI 3: Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan				
1. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	1. Terbangun dan berkembangnya infrastruktur pemerataan ekonomi	1. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur perhubungan	1. Meningkatkan kondisi kualitas jalan, jembatan dan drainase	
			2. Meningkatkan fasilitas perhubungan darat,	



	berwawasan lingkungan	2. Peningkatan infrastruktur air bersih	1. Meningkatkan ketersediaan air bersih konsumsi domestik
		3. Peningkatan infrastruktur perdagangan	1. Mengembangkan fasilitas perdagangan pasar tradisional
		4. Peningkatan jaringan pengairan/irigasi	1. Meningkatkan pelayanan irigasi
		1. Pembangunan sarana prasarana perumahan/permukiman	1. Membangun drainase lingkungan perumahan/permukiman 2. Membangun sarana prasarana sanitasi perumahan/permukiman 3. Membangun rumah layak huni
	3. Berkembangnya sistem teknologi informasi yang membuka keterisolan daerah	1. Peningkatan kualitas pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika didukung sarana dan prasarana yang memadai	1. Meningkatkan jangkauan layanan informasi digital
	4. Berkembangnya dukungan sistem informasi pelayanan publik	1. Pengembangan dukungan sistem informasi pelayanan publik	1. Mengembangkan sistem informasi pelayanan publik
2. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan kualitas lahan, air dan udara	1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Mengendalikan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan
			2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah

MISI 4: Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (<i>good governance</i>)	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	1. Penguatan perencanaan, dan evaluasi pembangunan	1. Memantapkan perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis kinerja
		2. Peningkatan kualitas pelaporan dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah	1. Meningkatkan kualitas pelaporan pembangunan berbasis kinerja 2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
	2. Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih	1. Meningkatkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar

		2. Peningkatan zona integritas yang bebas korupsi	1. Meningkatkan WBK dan WBBM
	3. Meningkatnya Ke- mandirian Keuangan Daerah	1. Intensifikasi peningkatan pendapatan pajak, retribusi, dan sumber-sumber lainnya	1. Meningkatkan pendapatan pajak, retribusi, dan sumber-sumber lainnya
	4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date	1. Peningkatan cakupan layanan pengukuran IKM 2. Peningkatan akses informasi publik 3. Meningkatkan cakupan layanan publik 4. Menyediakan informasi publik yang akurat dan up to date
	5. Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan berbasis desa	1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Meningkatkan pelayanan umum dan tata kelola pemerintahan desa

Sumber RPJMD BAB 6

6. PROGRAM

Program Pembangunan Daerah

Pencapaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malinau periode tahun 2021-2026 sangat ditentukan oleh program-program yang akan dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah, baik program yang langsung berpengaruh terhadap pencapaian indikator kinerja maupun program yang secara tidak langsung berpengaruh. Program-program tersebut terdiri atas berbagai kegiatan dan sub kegiatan turunan yang lazimnya merupakan tahapan terselesaikannya program. Secara rinci program-program pembangunan Kabupaten Malinau sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malinau periode tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 2.3. dibawah ini :

Tabel 2.3
Program-Program Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran Impact/ Outcomes)
MISI 1: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL	
Tujuan 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Fasilitas Kesehatan Dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alkes Dan Ketersediaan Obat Essensial Yang Sesuai Standar
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
	Cakupan Faskes Yg Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Ketersediaan Sdmk Sesuai Standar Di Faskes
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Kecamatan Dengan Pemberian Izin Operasi, Pembinaan Dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Kecamatan Dengan Kegiatan Advokasi, Kemitraan, Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Serta Pelaksanaan UKBM
Sasaran 2. Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Angka)
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka partisipasi Sekolah
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditempatkan sesuai analisis kebutuhan per wilayah
Sasaran 3. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
Program standarisasi perlindungan konsumen	



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran Impact/ Outcomes)
Tujuan 2. Menciptakan Suasana Kondusif Yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Ketahanan Nasional
Sasaran 1. Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tentram Dan Harmonis Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas
Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Proporsi Orang Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Proporsi Orang Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian
	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Indeks Resiko Bencana
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Dalam Rangka Pencegahan, Mitigasi Dan Penyelamatan Serta Evakuasi Korban Bencana
Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kecamatan yang mendapat pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran
Sasaran 2. Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender
Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pengarustamaan Gender
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perlindungan Perempuan
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Sistem Data Gender Dan Anak



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran Impact/ Outcomes)
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Pemenuhan Hak Anak
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Perlindungan Khusus Anak
Sasaran 3. Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter Dan Budaya Masyarakat	1. Indeks Kerukunan Beragama (Poin)
	2. Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman Karakter Kebangsaan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik Untuk Parpol Yang Ada Di Kabupaten Malinau
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kualitas Keadaan Aman, Nyaman Dan Damai Di Lingkungan Masyarakat
MISI 2: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERBASIS PADA POTENSI DAERAH, KARAKTERISTIK DAN KEARIFAN LOKAL	
Tujuan 1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Dan Karakteristik Daerah	1. Pertumbuhan PDRB (%)
	2. Indeks Gini (Poin)
	3. Angka Kemiskinan
	4. Laju Inflasi
Sasaran 1. Meningkatnya Produktifitas Sektor Sektor Ekonomi Primer Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Lokal	1. Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB (%)
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran Impact/ Outcomes)
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perizinan Usaha Pertanian
Program Penyuluh Lapangan	Persentase Penyuluh Lapangan
Sasaran 2. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	1. Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB (%)
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha sektor industri
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Prosentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Peningkatan jumlah Sarana Distribusi Perdagangan
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Prosentase peningkatan jumlah konsumen yang dilindungi
	2. Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata
Sasaran 3. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil Dan Mikro Yang Berkualitas	1. Persentase Koperasi Berkualitas
	2. Pesentase Peningkatan Usaha Mikro Dan Kecil (%)
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Peningkatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Kualitas Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan
Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	Prosentase peningkatan jumlah Diklat Koperasi yang diadakan
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Prosentase UMKM yang Diberdayakan
Sasaran 4. Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Program Pengelolaan Sumber Daya	Persentase Infrastruktur



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran Impact/ Outcomes)
Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Pendukung Kemandirian Pangan Dalam Kondisi Baik
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu Dan Keamanan Pangan
Sasaran 3. Meningkatnya Profesionalitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pelatihan Dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar Dan Ditempatkan
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, Lks Bipartit, Strukur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta Bpjs Ketenagakerjaan)
Sasaran 4. Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah (Rp Milyar)
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Peminat Investasi
Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Atas Pelayanan Perizinan
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA Dan PMDN
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Informasi Yang Tersampaikan Kepada Masyarakat
MISI 3: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	
Tujuan 1. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Dan Pelayanan Dasar	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Ikli)(Poin)
Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang	1. Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)



Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran Impact/ Outcomes)
Berwawasan Lingkungan	
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (%)
	2. Persentase Pemukiman Yang Layak (%)
Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Di Tangani
	3. Rasio Rumah Layak Huni (Rasio)
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Atau Warga Korban Bencana Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni
	4. Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi (%)
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang beroperasi
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan pelayaran
	5. Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak
	6. Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi (%)
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di Ws Kewenangan Kab/Kota
Sasaran 3. Meningkatnya layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah	Persentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Penyebaran Informasi Publik
Program Aplikasi Informatika	Persentase Penggunaan Aplikasi Informatika
Tujuan 4. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Iklh)

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran Impact/ Outcomes)
Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)
	2. Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)
	3. Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik
MISI 4: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN	
Tujuan 1: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik (Good Governance)	1. Indeks RB
Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1. Nilai SAKIP
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Program Pembangunan Daerah
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Perangkat Daerah
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian yang diimplementasikan dalam Perencanaan Pembangunan
	2. Nilai LPPD
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan Terhadap Objek Pemeriksaan
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Unit Kerja Yang Mendapat Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran Impact/ Outcomes)
Sasaran 2. Terselenggaranya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari KKN	1. Opini BPK
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah
Sasaran 3. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pelaksanaan Pemungutan Pbb P2 Dan Bphtb
Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Pendampingan Yang Dilaksanakan
Sasaran 5. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri
Program Penataan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa Yang Melakukan Kerjasama Antara Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa Yang Baik

Sedangkan keterkaitan program-program pembangunan Kabupaten Malinau dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2022 – 2026 diilustrasikan pada gambar 2.1 sebagai berikut :



Gambar 2.3

Keterkaitan Program-Program Pembangunan Kabupaten Malinau Dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026

Dalam rangka lebih memfokuskan program-program pembangunan, dilakukan melalui pendekatan program inovasi daerah. Hal ini dimaksudkan agar visi “***Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai Dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional***” dapat direalisasikan sesuai harapan masyarakat Malinau. Program-program inovasi daerah tersebut terdiri atas 5 (lima) program, yaitu:

1. Program Desa Sarjana;
2. Program Milenial Mandiri;
3. Program Rasda Plus;
4. Program RT-Bersih;
5. Program Wajib Belajar Malinau Maju

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2022.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.



**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,94
2	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,50
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran perkapita	Ribu Rupiah	10.150,00
4	Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenang dan Harmonis Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas	Persen	0,58
		Indeks Resiko Bencana	Poin	124,4
5	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	83,36
6	Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama	Poin	79,25
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	78,5
7	Meningkatnya Produktifitas Sektor-Sektor Ekonomi Primer Berorientasi Pada Potensial Karakteristik Lokal	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	Persen	4,82
8	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata yang Berorientasi Pada Potensi dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB	Persen	2,70
		Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	1,84
9	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro Yang Berkualitas	Persentase Koperasi Peningkatan Berkualitas	Persen	70
		Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil	Persen	70,60
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Poin	73,65

11	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,14
12	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah	Rp Milyar	90.500.000.000
13	Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	50,0
		Persentase Pemukiman Yang Layak	Persen	77
		Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	1:1,074
		Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi	Persn	65
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	Persen	67
		Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi (%)	Persen	28,01
14	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah	Persentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi (%)	Persen	96,33
15	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	Nilai	100
		Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	Nilai	53,65
		Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	Nilai	91,25
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	Nilai	64,20
		Nilai LPPD	Nilai	2.930
17	Terselenggaranya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari KKN	Opini BPK		WTP
18	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	Persen	5
19	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Nilai	81

20	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (%)	Persen	13,76
----	--	--	--------	-------

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka usia harapan hidup (Tahun)	71,94
2	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,50
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran perkapita (Ribuan Rupiah)	10.150,00



4	Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram dan Harmonis Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas (%)	0.58
		Indeks Resiko Bencana (Poin)	124,4
5	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	83,36
6	Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama (Poin)	79,25
		Indeks Pembangunan Kebudayaan/ Masyarakat (Poin)	78,5
7	Meningkatnya produktifitas sektor-sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB (%)	4,82
8	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB (%)	2,70
		Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	1,84
9	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro Yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas (%)	70
		Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil (%)	70,60
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Poin)	73,65
11	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,14
12	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah (Rp Milyar)	90.500.000.000
13	Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	50,0
		Persentase Pemukiman Yang Layak (%)	77
		Rasio Rumah Layak Huni (Rasio)	1:1,074
		Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi (%)	65
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	67
		Persentase Irigasi Kabupaten Yang	28,01



		Berfungsi (%)	
14	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah	Persentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi (%)	96,33
15	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	100
		Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	53,65
		Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	91,25
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	64,20
		Nilai LPPD	2.930
17	Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	Opini BPK	WTP
18	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	5
19	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	81
20	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (%)	13,76

PROGRAM

ANGGARAN

1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	50.544.598.098
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	20.462.980.739
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	2.255.861.140
Program pengendalian Penduduk	Rp	73.416.600
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	1.366.074.700
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	563. 720.000

2 Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat

Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	84.308.714.920
--------------------------------	----	----------------



	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	15.300.000.000
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat		
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp	3.525.082.600
	Program standarisasi perlindungan konsumen	Rp	90.000.000
4	Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tentram dan Harmonis Serta Bebas Bencana		
	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp	126.039.600
	Program Penanggulangan Bencana	Rp	249.600.000
	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	1.111.208.000
5	Meningkatnya Kesetaraan Gender		
	Program Perlindungan Perempuan	Rp	50.000.000
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	388.103.800
	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	180.000.000
	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	50.000.000
	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	230.000.000
6	Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat		
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	400.000.000
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp	600.000.000
7	Meningkatnya Produktifitas Sektor Sektor Ekonomi Primer Berorientasi Pada Potensi dan Karakteristik Lokal		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	407.983.000
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	245.019.600
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	418.007.800
	Program Penyuluh Pertanian	Rp	50.000.000
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	365.850.000
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	272.486.375
8	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah		



	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp	3.835.339.350
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	379.940.045
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	298.000.000
	Program Pemasaran Pariwisata	Rp	249.998.500
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	65.000.000
9	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro yang Berkualitas		
	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Rp	600.798.176
	program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	2.848.437.250
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan		
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	400.000.000
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	75.000.000
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	50.000.000
11	Meningkatnya Profesionalitas Tenaga Kerja		
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	1.080.000.000
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	634.952.000
	Program Hubungan Industrial	Rp	300.000.000
12	Meningkatnya Investasi daerah		
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	383.914.000
13	Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur Berwawasan Lingkungan		
	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	40.484.526.586
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp	6.257.712.770
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	1.056.328.650
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	11.897.625.400
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	5.074.973.826
	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	4.783.805.499
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	24.162.198.250
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	1.799.995.458
	Program Pengembangan Permukiman	Rp	6.999.852.865
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	5.083.349.200
14	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah		
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	80.000.000
	Program Aplikasi Informatika	Rp	2.450.000.035
15	Meningkanya Kualitas Lahan, Air Dan Udara		



Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	1.150.693.069
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp	405.000.000
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	6.700.000.000
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	5.083.349.200
16 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	1.007.325.100
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	230.000.000
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	966.895.000
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp	217.000.000
17 Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	1.499.950.365
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	341.455.050.941
18 Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah		
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	2.898.201.000
19 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	
20 Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa		
Program Penataan Desa	Rp	49.982.000
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	419.976.200
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	6.057.475.250

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja serta hasil evaluasi Tim SAKIP Pemerintah Kabupaten Malinau.

Pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun 2022 dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran yang telah ditetapkan secara umum semuanya telah dapat dicapai dengan baik.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka usia harapan hidup (Tahun)	71,94	71,50	99,38%
2	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,50	9,41	99,05%
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran perkapita (Ribu Rupiah)	10.150,00	10.304,00	101,52%
4	Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram dan Harmonis Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas (%)	0,58%	0,09%	184%
		Indeks Resiko Bencana (Poin)	124,4	155,85	125,28%
5	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	83,36	82,61	99,10%
6	Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama (Poin)	79,25	80,95	102,14%
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (Poin)	78,5	50,08	63,79
7	Meningkatnya produktifitas sektor-sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB (%)	4,82%	2,86%	59,33%
8	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa	Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB (%)	2,70%	2,85%	105,55%



	Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	1,84%	1,67%	90,76%
9	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro Yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas (%)	70%	72,4%	103,43%
		Persentase Peningkatan Usaha Mikro Dan Kecil (%)	70,60%	81,90%	116,01%
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Poin)	73,65	67,25	91,31%
11	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,14	3,30	120,28%
12	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah (Rp Milyar)	90.500.000.000	1.030.086.378.749	1138%
13	Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	50,0%	12,16%	24,32%
		Persentase Pemukiman Yang Layak (%)	77%	81,16%	105,41%
		Rasio Rumah Layak Huni (Rasio)	1:1,074	1:1,15	29,41%
		Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi (%)	65%	94%	114,61%
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	67%	78,83%	117,66%
		Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi (%)	28,01%	23,87%	85,20%
14	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah	Persentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi (%)	96,33%	96,33%	100%
15	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	100	100	100%
		Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	53,65	62,38	116,27%

		Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	91,25	95,20	104,33
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	64,20	60,02	93,48
		Nilai LPPD	2.930	-	-
17	Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	Opini BPK	WTP	WTP	100%
18	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	5%	3,73%	74,6%
19	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	81	80,71	99,64%
20	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (%)	13,76%	13,76%	100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Malinau didukung oleh perangkat daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.

Perolehan capaian 32 indikator sasaran terhadap 20 sasaran selama tahun 2022 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian rendah. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta analisis capaiannya.

Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul

Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi

1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Pengukuran sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja sasaran angka usia harapan hidup, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pembangunan di bidang kesehatan terus dilaksanakan di Kabupaten Malinau dalam rangka mewujudkan misi pertama yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Indikator kinerja angka usia harapan hidup dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,94	71,50	99,38%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

Tahun 2022 pencapaian sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran angka usia harapan hidup dengan target RPJMD tahun 2021-226 adalah 71,94. Realisasi angka harapan hidup tahun 2022 adalah 71,50, sehingga capaian kinerja untuk tahun 2022 adalah 99,38%.

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,50	71,45	71,49	99,93%	99,98%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi angka harapan hidup tahun 2022 sebesar 71,50 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 71,45 atau realisasi capaian kinerja 99,93% dan realisasi tahun 2021 sebesar 71,49 atau realisasi capaian kinerja 99,98%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 0,07% terhadap capaian tahun 2020 dan kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 0,01% terhadap capaian tahun 2021.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,50	72,38	98,78%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi angka harapan hidup tahun 2022 sebesar 71,50 Tahun dengan target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 72,38 Tahun, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 sebesar 98,78% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Perbandingan realisasi kerja tahun ini dengan standar nasional

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target nasional dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2022
1	2	3	4	5
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,50	71,85	99,51%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi nasional tahun 2022 adalah perbandingan realisasi angka usia harapan hidup tahun 2022 sebesar 71,50 tahun dengan realisasi nasional tahun 2022 sebesar 71,85 Tahun, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 sebesar 99,51% terhadap realisasi nasional tahun 2022.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Angka Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu negara. Capaian yang masih rendah dibanding target dikarenakan beberapa faktor diantaranya yaitu faktor sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Malinau, Pemerintah telah mengupayakan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dengan penempatan tenaga kesehatan strategis (dokter, bidan, perawat, analis, sanitarian, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian) baik PTT daerah maupun tenaga Nusantara Sehat di Puskesmas terpencil dan pustu, penyediaan sarana prasarana, obat-obatan dan alat kesehatan, serta kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta GERMAS.

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Komitmen pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam penyediaan anggaran untuk bidang Kesehatan, baik dalam peningkatan fasilitas kesehatan maupun dalam peningkatan layanan kesehatan.



Gambar Penyediaan Prasarana Listrik Puskesmas
(Solar Cell) di Puskesmas Perbatasan.

- 2) Kerjasama dengan maskapai penerbangan MAF (*Mission Aviation Fellowship*) sebagai transportasi rujukan gawat darurat;
- 3) Dukungan dan kerjasama yang baik antara lintas program dan lintas sektor;

- 4) Perubahan perilaku masyarakat seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan dengan adanya kemudahan akses terhadap informasi kesehatan;
- 5) Dukungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam penempatan tenaga kesehatan di daerah terpencil.
- 6) Strategi pelayanan kesehatan pada kondisi pandemi Covid-19 oleh Puskesmas cukup optimal.





- 7) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS Pratama, yaitu dengan penilaian oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2017 - 2019 yaitu : 1 RS Pratama terakreditasi Dasar dan dari 17 Puskesmas yang ada di Kabupaten Malinau, 16 Puskesmas sudah terakreditasi dengan rincian terakreditasi Utama 1 Puskesmas, Madya 7 Puskesmas, Dasar 8 Puskesmas, dan satu Puskesmas rencana Akreditasi di Tahun 2023 yaitu Puskesmas Metut.

Penyebab kegagalan atau penurunan kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Kondisi geografis di Kabupaten Malinau terutama di daerah perbatasan dan sangat terpencil memerlukan pembiayaan kesehatan yang cukup tinggi termasuk dengan akses pelayanan kesehatan dari desa ke Puskesmas Induk. Sebagai informasi bahwa Kabupaten Malinau memiliki 1 (satu) RSUD, 2 RS Pratama (RS Pratama Long Ampung dan RS Pratama Langap) serta 17 Puskesmas yang mana 8 Puskesmas berada di wilayah perbatasan dan sangat terpencil.
- 2) Belum semua Puskesmas dan Puskesmas Pembantu memiliki tenaga kesehatan baik tenaga kesehatan tetap (ASN) maupun tenaga kontrak terutama daerah terpencil/sangat terpencil. Hal ini disebabkan minat tenaga medis untuk bekerja di perbatasan masih rendah, padahal Pemerintah Daerah sudah menyediakan anggaran yang cukup untuk penyediaan gaji dan insentif tenaga medis dan paramedis.

- 3) Adanya Pandemi COVID-19 sampai pertengahan tahun 2022, hal ini membatasi aktifitas masyarakat untuk berkumpul dan keluar rumah kecuali kebutuhan mendesak, sehingga cakupan pelayanan di fasilitas kesehatan dan posyandu tidak maksimal.
- 4) Sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan belum maksimal.

Alternative solusi yang dilakukan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau atas kegagalan/penurunan kinerja sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan upaya pencegahan kematian ibu dan bayi baru lahir melalui serangkaian program dan kegiatan (Ponek, AMP, Perbaikan Gizi, Rujukan, Jampersal, pemberian Vitamin bagi remaja putri, dll)
- 2) Meningkatkan upaya pencegahan kematian Bayi dan Balita dengan Immunisasi, Pencegahan Stunting/Wasting, Pencegahan penyakit menular.
- 3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
- 4) Memperbaiki status gizi keluarga
- 5) Perbaikan kesehatan lingkungan
- 6) Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat;
- 7) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan di daerah terpencil;
- 8) Pembinaan/peningkatan kapasitas tenaga kesehatan secara berkala;
- 9) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam program kesehatan;
- 10) Meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- 11) Peningkatan upaya promosi kesehatan;
- 12) Mengadakan evaluasi pencapaian kinerja untuk fasilitas pelayanan kesehatan secara berkala (per triwulan).

e. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja angka usia harapan hidup sebesar Rp. 55.497.925.903, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 73.490.790.137 atau capaian realisasi sebesar 75,52% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 99,38%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.17.992.864.234 atau sebesar 24,48%

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	99,38%	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	71,86%
			Peningkatan kapasitas sumber	87,96%

			daya manusia kesehatan	
			Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	21,71%
			Pengendalian Penduduk	79,49%
			Pembinaan keluarga berencana (KB)	69,56%
			Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	10,59%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

Dari tabel 3.2.4 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Hasil capaian kinerja dan realisasi capain keuangan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program-program yang mendukung indikator kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat

Pengukuran sasaran meningkatnya kesempatan pendidikan masyarakat dengan indikator kinerja sasaran angka rata-rata lama sekolah, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pembangunan di bidang pendidikan terus dilaksanakan di Kabupaten Malinau dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Angka Rata-Rata Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel. 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,50	9,41	99,05%

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2022

Tahun 2022 rata-rata lama sekolah Kabupaten Malinau Yang ditargetkan dalam RPJMD adalah 9,50 dengan realisasi untuk tahun 2022 adalah 9,41 sehingga capaian kinerja untuk rata-rata lama sekolah Kabupaten Malinau tahun 2022 adalah 99,05%.

- a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka	9,41	8,63	8,95	91,71%	95,11%

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi angka rata-rata lama sekolah tahun 2022 sebesar 9,41 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 8,63 atau realisasi capaian kinerja 91,71% dan realisasi tahun 2021 sebesar 8,95 atau realisasi capaian 95,11%. Dengan demikian maka, hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar

9,03% terhadap capaian tahun 2020 dan kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 5,13% terhadap capaian tahun 2021.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka	9,41	10,57	89,02%

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi rata-rata lama sekolah tahun 2022 sebesar 9,41 tahun dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 10,57 tahun, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2022 pencapaiannya sebesar 89,02% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Perbandingan realisasi kerja tahun ini dengan standar nasional

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan standar nasional dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,41	8,69	108,29%

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi standar nasional tahun 2022 adalah perbandingan realisasi rata-rata lama sekolah tahun 2022 sebesar 9,41 tahun dengan realisasi standar nasional tahun 2022 sebesar 8,69 tahun, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2022 pencapaiannya sebesar 108,29% terhadap standar nasional tahun 2022.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / *Mean years of schooling* (MYS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Asumsi dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Perhitungan angka rata-rata lama sekolah pada usia 25 tahun keatas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP. Dalam perhitungan rata-rata lama sekolah, penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Langkah penghitungan angka rata-rata lama sekolah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan seleksi terhadap penduduk usia 25 tahun keatas
2. Mengelompokkan jenjang pendidikan yang pernah/ sedang diduduki
3. Mengelompokkan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki
4. Mongkonversi tahun lama sekolah menurut ijazah terakhir
5. Menghitung lamanya bersekolah sampai kelas terakhir
6. Menghitung lamanya bersekolah

Untuk menghitung rata-rata lama sekolah digunakan rumus berikut :

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

dimana :

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

x_i = Lama sekolah penduduk ke- i yang berusia 25 tahun

N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Malinau pada tahun 2022 bergeser keangka 9 tahun. Setiap tahun untuk angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Malinau selalu mengalami peningkatan. Pertumbuhan per tahun 1,54 persen, sehingga dapat disimpulkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Malinau semakin baik.

Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, Pemerintah Kabupaten Malinau melaksanakan program unggulan daerah yaitu Program Wajib Belajar 16 Tahun. Hal-hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pendidikan untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Membangun sekolah mulai dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs sampai ke pelosok desa dan kecamatan, dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun sekolah khususnya PAUD.
- b. Membebaskan pungutan biaya pendidikan dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs.
- c. Meningkatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam bidang pendidikan.
- d. Optimalisasi peran serta masyarakat melalui pembentukan Dewan Pendidikan, PGRI dan Komite Sekolah.
- e. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk penyediaan buku perpustakaan sekolah, buku paket pelajaran siswa, buku penghubung siswa dengan sekolah dan pendukung lainnya.
- f. Pengadaan tenaga pendidik.
- g. Peningkatan pendidikan, kompetensi dan kualifikasi akademik bagi tenaga pengajar.
- h. Penyediaan layanan transportasi bagi anak sekolah.



Penyerahan perlengkapan belajar siswa PAUD, SD dan SMP

e. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja angka rata-rata lama sekolah sebesar Rp. 90.589.896,588 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 99.608.714.920 atau capaian realisasi sebesar 93,20% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 99,05%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.9.018,818,332 atau sebesar 6,8% .

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi guru, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran proses belajar mengajar di sekolah sehingga guru dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	99,05%	Pengelolaan Pendidikan	89,94%
			Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	96,46%

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2022

Dari tabel 3.3.4 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Hasil capaian kinerja dan realisasi capaian keuangan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program-program yang mendukung indikator kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Pengukuran sasaran meningkatnya daya beli masyarakat dengan indikator kinerja sasaran pengeluaran perkapita, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran yaitu pengeluaran perkapita dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.4
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	10.150,00	10.304,00	101,52%

Sumber : Bappeda dan Litbang Tahun 2022

Pada Tabel 3.3 diatas dapat dilihat perbandingan pengeluaran perkapita dengan target yang telah ditetapkan pada RPJMD 2016-2025 di tahun 2022 adalah 10.150,00 dan realisasi untuk tahun 2022 adalah 10.304,00

sehingga capaian kinerja untuk pengeluaran perkapita tahun 2022 adalah 101,52%.

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	10.304,00.	9.611,00	9.928,00	93,27%	96,36%

Sumber : Bappeda dan Litbang Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi pengeluaran perkapita tahun 2022 sebesar 10.304,00 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 9.611,00 atau realisasi capaian kinerja sebesar 93,27% dan realisasi tahun 2021 sebesar 9.928,00 atau realisasi capaian kinerja sebesar 96,36%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 7,21% terhadap capaian tahun 2020 dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 3,78% terhadap capaian tahun 2021.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	10.304,00	10.750,00	95,85%

Sumber : Bappeda dan Litbang Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan pengeluaran perkapita tahun 2022 sebesar 10.304,00 Ribu Rupiah dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 10.750,00 Ribu Rupiah, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 95,85% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2022 ada peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Malinau sebesar 3,78% jika dibandingkan dengan tahun 2021, hal ini disebabkan pandemi covid 19 sudah berangsur-angsur membaik yang didukung oleh kesadaran masyarakat melakukan vaksinasi sehingga masyarakat dapat beraktifitas dengan leluasa.

Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi inflasi seperti operasi pasar murah, bantuan modal UMKM serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) cukup memberi dampak yang positif terhadap daya beli masyarakat.

Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang berangsur-angsur menurun, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengaktifkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun oleh Pemda, seperti mengadakan kegiatan festival budaya dari 11 lembaga adat dan beberapa paguyuban, demikian juga pelaksanaan turnamen-turnamen olahraga. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut UMKM dipersilahkan untuk memasarkan produk-produk baik kerajinan tangan maupun makanan dan minuman jadi disetiap even festival budaya atau turnamen olahraga yang turut mendorong perputaran ekonomi dan

merupakan alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang masih rendah dan bermuara pada peningkatan daya beli.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas dan kelompok pengeluaran (rupiah) 2022 paling besar disumbang dari belanja makanan dan minuman jadi sebesar Rp. 162.829 per bulan.

Sasaran ke-3 pada misi pertama RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2025 adalah Meningkatkan Daya Beli Masyarakat dengan indikator Tujuan adalah Pengeluaran Perkapita. Pengeluaran Perkapita adalah salah satu unsur pembentuk indikator Tujuan ke-1 RPJMD 2021-2025 yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga sangat penting menjadikan Pengeluaran Perkapita menjadi IKU daerah dalam rangka mewujudkan IPM Kabupaten Malinau yang semakin baik.

Pengeluaran Perkapita digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan setiap golongan ekonomi rumah tangga. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat secara umum apakah rumah tangga dengan golongan termiskin memiliki pengeluaran perkapita jauh dibawah rumah tangga terkaya. Pengeluaran Perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yangtelah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Rumus perhitungan pengeluaran perkapita :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Data	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita (Ribuan Rupiah)	$Y_t = \frac{Y_t}{PPP}$	BPS, Bappeda dan Litbang	Bappeda dan Litbang

Faktor keberhasilan pencapaian kinerja IKU tersebut adalah Pengeluaran konsumsi masyarakat meningkat ditahun 2022 baik primer, sekunder maupun tersier. Pengeluaran konsumsi masyarakat yang meningkat di tahun 2022 mengindikasikan meningkatnya pendapatan

masyarakat Kabupaten Malinau yang berarti perekonomian semakin membaik dan peredaran uang semakin tinggi sejak mewabahnya covid-19 di awal tahun 2020.

d. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja pengeluaran perkapita sebesar Rp. 2.763.372.844, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 3.525.082.600 atau capaian realisasi sebesar 78,39% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 101,51%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.761.709.756 atau sebesar 21,61% .

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita (Ribuan Rupiah)	101,51%	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	78,31%

Sumber : Bappeda dan Litbang Tahun 2022

Dari tabel 3.4.4 diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan capaian kinerja 101,51% dan realisasi keuangan 78,31%. Hal ini menunjukkan bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Tujuan 2 : Menciptakan Suasana Kondusif Yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia

4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenang dan Harmonis Serta Bebas Bencana

Pengukuran sasaran terciptanya kehidupan yang aman, tenang dan harmonis serta bebas bencana dengan indikator kinerja sasaran angka kriminalitas yang tertangani dan indeks resiko bencana, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran yaitu angka kriminalitas yang tertangani dan indeks resiko bencana dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.5
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4
Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tentram dan Harmonis
Serta Bebas Bencana

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Angka Kriminalitas	Persen	0,58%	0,09%	184%
Indeks Resiko Bencana	Poin	124,4	155,85	125,28%

Sumber : Satpol PP dan BPBD Tahun 2022

Pada Tabel 3.4 diatas dapat dilihat perbandingan angka kriminalitas dengan target RPJMD 2021-2026 adalah 0,58% dan realisasi untuk tahun 2022 adalah 0,09%, sehingga capaian kinerja untuk angka kriminalitas tahun 2022 adalah 184%. Untuk indikator kinerja Indeks Resiko Bencana dengan target RPJMD 2021-2026 adalah 124,4 dan realisasi untuk tahun 2022 adalah 155,85, sehingga capaian kinerja untuk Indeks Resiko Bencana tahun 2022 adalah 125,28%.

ANGKA KRIMINALITAS

- a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu	Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun
			2021	2021
1	2	3	4	5
Angka Kriminalitas	Persen	0,09	-	-

Sumber : Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 belum disajikan karena indikator kinerja angka kriminalitas baru dilaksanakan tahun 2022.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5.2

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2022	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2022
1	2	3	4	5
Angka Kriminalitas	Persen	0,09	0,35	25,71%

Sumber : Satpol PP Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi angka kriminalitas tahun 2022 sebesar 0,09% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 0,35%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya angka kriminalitas yang tertangani sebesar 27,71% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Angka kriminalitas adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 100.000 penduduk. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah Petugas pengamanan dalam hal ini Polres, TNI dan Satpol PP secara dini mengantisipasi terjadinya tindak Kriminal di setiap tempat, pihak keamanan

secara rutin melakukan Patroli, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelanggaran hukum.

Adapun alasan Satpol PP Memilih indikator kinerja utama angka kriminalitas yang tertangani adalah :

1. Sesuai dengan tujuan RPJMD yaitu Tenciptanya Suasana Kondusif yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Sesuai dengan tugas dan fungsi satpol PP dan Pemadam Kebakaran yaitu Menegakkan Perda, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, mengupayakan terlaksananya kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian Kinerja adalah:

- a. Adanya visi dan misi yang jelas dalam mendukung terciptanya Masyarakat Malinau yang aman, nyaman dan damai
- b. Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau ;
- c. Budaya dalam masyarakat Kabupaten Malinau yang masih terpelihara dengan baik;
- d. Terjalannya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja OPD;
- e. Adanya upaya mengoptimalkan fungsi dan ketugasan anggota Satpol PP dan Damkar;
- f. Secara kuantitas Satpol PP dan Damkar memiliki SDM pegawai yang cukup yang berada diwilayah Kabupaten Malinau.

Faktor-faktor yang menjadi Penghambat pencapaian Kinerja adalah:

- a. Sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau belum optimal dalam mendukung aktifitas sebagai pelaksana penegak Peraturan Daerah, penanggulangan bencana kebakaran dan perlindungan masyarakat
- b. Partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal;

- c. Belum terpenuhinya standarisasi dan kompetensi SDM antara kebutuhan personil/pegawai dengan bidang serta volume tugas yang diemban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

d. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja angka kriminalitas yang tertangani sebesar Rp. 124.737.000, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 126.039.600 atau capaian realisasi sebesar 98,97% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 184%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.1.302.600 atau sebesar 1,03%.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram Dan Harmonis Dan Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas	184%	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	98,97%

Sumber : Satpol PP Tahun 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2022 capaian kinerja mencapai angka 184% dengan realisasi keuangan 98,97%. Hal ini menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

INDEKS RESIKO BENCANA

- a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Resiko Bencana	Poin	155,85	124,4	155,85	91,36%	100%

Sumber : BPBD Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi indeks resiko bencana tahun 2022 sebesar 155,85 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 124,4 atau realisasi capaian kinerja sebesar 91,36% dan realisasi tahun 2021 sebesar 155,85 atau realisasi capaian kinerja sebesar 100% dengan demikian maka, hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebesar 25,28% terhadap capaian tahun 2020 dan tidak ada kenaikan dan penurunan realisasi capaian kinerja tahun 2022 terhadap capaian tahun 2021.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2022	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2022
1	2	3	4	5
Indeks Resiko Bencana	Poin	155,58	124,4	125,06%

Sumber : BPBD Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi indeks resiko bencana tahun 2022 sebesar 155,58 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 124,4, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 125,06% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Perbandingan Realisasi Kerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan standar nasional dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Indeks Resiko Bencana	Poin	155,85	134,16	116,17%

Sumber : BPBD Tahun 2022

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indeks Resiko Bencana adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia. Indeks Resiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat resiko bencana tiap kabupaten/kota di Indonesia.

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas, Indeks Resiko Bencana terjadi kenaikan Status Resiko Bencana dan Target 124,4 Poin (Sedang) menjadi 155,85 poin (Tinggi) yang berarti terjadi kenaikan sebesar 25,28% dari yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan ada beberapa data dukung IKD (Indek Ketahanan Daerah) masih banyak yang tidak tersedia diantaranya dokumen KRB (Kajian Resiko Bencana) dan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) yang sudah disahkan/dilegalkan (Tahun 2023 baru tersedia kegiatannya) serta data lintas sektoral yang masih kurang.

Alternatif solusi yang akan dilakukan kedepan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk memenuhi indikator ketahanan daerah.
2. Menyusun dokumen penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan kualitas pencatatan data dan informasi terkait kebencanaan.



Simulasi kegiatan BPBD di SMP Negeri 1 Malinau Kota





d. Analisis atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja indeks resiko bencana sebesar Rp. 423.213.000 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.479.600.000 atau capaian realisasi sebesar 88,24% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 125,28%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.56.387.000 atau sebesar 11,76% .

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dilaksanakan melalui optimalisasi sumber daya manusia yang tersedia serta melengkapi sarana prasarana penunjang kelancaran proses penanganan penanggulangan bencana sehingga dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5.7
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram dan Harmonis Serta Bebas Bencana	Indeks Resiko Bencana	125,28%	Program Penanggulangan Bencana	78,13%

Sumber : BPBD Tahun 2022

Dari tabel 3.5.7 diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program penanggulangan bencana dengan capaian kinerja mencapai angka

125,28% dengan realisasi keuangan 78,13%. Hal ini menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

5. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesenjangan Gender

Pengukuran sasaran meningkatnya kesetaraan gender dan indikator kinerja sasaran indeks pembangunan gender, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran yaitu indeks pembangunan gender dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya Kesenjangan Gender

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Indeks Pembangunan Gender	Poin	83,36	82,61	99,10%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2022

Tahun 2022 pencapaian sasaran meningkatnya kesetaraan gender dengan indikator indeks pembangunan gender yang ditarget dalam dokumen RPJMD 2021-2026 adalah 83,36 dan realisasi untuk tahun 2022 adalah 82,61 dengan capaian kinerja untuk indeks pembangunan gender tahun 2022 adalah 99,10%.

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.6.1

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Pembangunan Gender	Poin	82,61	81,36	81,95	98,48%	99,20%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi indeks pembangunan gender tahun 2022 sebesar 82,61 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 81,36 atau realisasi capaian kinerja sebesar 98,48% dan realisasi tahun 2021 sebesar 81,95 atau realisasi capaian kinerja sebesar 99,20%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 1,53% terhadap capaian tahun 2020 dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 0,80% terhadap capaian tahun 2021.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.6.2

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Indeks Pembangunan Gender	Poin	82,61	87,36	99,56%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi indeks pembangunan gender tahun

2022 sebesar 82,61 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 87,36, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 99,56% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diformulasikan sebagai rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki. Nilai indeks pembangunan perempuan dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin dekat angka indeks pembangunan gender ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Untuk menghitung indeks pembangunan gender formulasi yang digunakan adalah :

$$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki} - \text{Laki}} \times 100\%$$
$$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki} - \text{Laki}} \times 100\%$$

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau untuk meningkatkan indeks pembangunan gender antara lain melakukan sosialisasi peningkatan pemahaman tentang hak-hak dasar perempuan dan pengembangan kapasitas pengurus organisasi dan lembaga perempuan serta meningkatkan kegiatan organisasi perempuan.

Kegagalan capaian indeks pembangunan gender dalam meningkatkan kesetaraan gender karena belum optimalnya dukungan anggaran dalam menunjang program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kesetaraan gender dan sumber daya manusia masih kurang.

d. Analisis Atas Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja indeks resiko bencana sebesar Rp. 1.245.304.379 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.248.103.800 atau capaian realisasi sebesar 99,78% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 99,10%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.2.799.421 atau sebesar 0,22%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	99,10%	Program Perlindungan Perempuan	99,96%

Dari tabel 3.6.4 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja didukung oleh program-program. Hasil capaian kinerja dan realisasi capaian keuangan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program yang mendukung indikator kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

6. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat

Pengukuran sasaran mantapnya kehidupan keagamaan serta karakter dan budaya masyarakat dan indikator kinerja sasaran indeks kerukunan beragama dan indeks pembangunan kebudayaan, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran yaitu indeks kerukunan beragama dan indeks pembangunan kebudayaan dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6
Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Indeks Kerukunan Beragama	Poin	79,25	80,95	102,14%
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	78,5	50,08	63,79

Sumber : Badan Kesbangpol dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pada Tabel 3.7 diatas dapat dilihat perbandingan indeks kerukunan beragama dengan target RPJMD 2016-2022 adalah 79,25 dan realisasi untuk tahun 2022 adalah 80,95 sehingga capaian kinerja indeks kerukunan beragama tahun 2022 adalah 102,14%. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagai salah satu isu strategis pembangunan Indonesia, tidak hanya bagaimana kebudayaan itu ada dan berkembang di dalam suatu masyarakat, namun kebudayaan adalah modal dalam pembangunan. Perhitungan IPK diharapkan dapat membantu para pengambil kebijakan untuk dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan yang knowledge based, agar perumusan kebijakan pembangunan kebudayaan dapat lebih presisi sesuai kondisi daerah.

Berdasarkan Surat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 005/60/Budpar-III bahwa indikator kinerja indeks pembangunan kebudayaan belum bisa dihitung dikarenakan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 55 tahun 2022 Tantang Indeks Pembangunan Kebudayaan yakni Bab I pasal 1 dan 2 yang menyatakan bahwa indeks pembangunan kebudayaan disingkat IPK adalah suatu ukuran nilai yang menggambarkan capaian kinerja dalam pembangunan kebudayaan tingkat nasional dan provinsi, juga IPK bertujuan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan bidang kebudayaan pada tingkat nasional dan provinsi.

INDEKS KERUKUNAN BERAGAMA

- a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.7.1

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	5	6	8	9
Indeks Kerukunan Beragama	Poin	80,95	-	-	-	-

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 tidak dapat disajikan dikarenakan indikator kinerja indeks kerukunan beragama baru dilaksanakan pada tahun 2022.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.7.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Indeks Kerukunan Beragama	Poin	80,95	83,3	97,17%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi indeks kerukunan beragama tahun 2022 sebesar 80,95 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 83,3 maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 97,17% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pengertian kerukunan sebagaimana dikutip dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2006/8 Tahun 2006 yaitu keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dan saling menghargai; kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Indeks kerukunan umat beragama digunakan untuk memberikan informasi dan masukan bagi instansi/lembaga terkait tentang kondisi kerukunan umat beragama. Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan :

1. Saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama.
2. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu.
3. Umat beragama diberi kebebasan beribadah sesuai dengan agama masing-masing.

Indeks kerukunan beragama sendiri dihitung berdasarkan sejumlah indikator seperti tingkat toleransi antar agama, partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan tingkat konflik yang terjadi dalam masyarakat. Semakin tinggi indeks kerukunan beragama, semakin harmonis hubungan antar umat beragama di suatu wilayah.

Tujuan pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama:

1. Alat untuk mengukur kinerja seluruh unit teknis di Kementerian Agama terkait capaian *outcome* kerukunan.
2. Alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi dan deteksi dini.

Adapun faktor-faktor keberhasilan yang mendukung indikator kinerja indeks kerukunan umat beragama yaitu :

1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama dengan pemerintah.
2. Membangun harmonis sosial dan persatuan dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun.
3. Tidak adanya keberatan penganut agama lain dalam membangun rumah ibadat setelah mendapat izin dari pemerintah setempat.
4. Warga Negara Indonesia, apapun agamanya berhak menjadi Kepala Daerah.
5. Bersedia terlibat usaha yang dikelola bersama teman/sahabat berbeda agama.

Faktor-faktor penghambat kerukunan hidup beragama yaitu cara-cara agresif dalam dakwah agama yang ditujukan kepada orang yang telah beragama, pendirian tempat ibadat tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Solusi yang akan dilakukan kedepan adalah memaksimalkan usaha-usaha pemeliharaan kerukunan dan pencegahan konflik mulai dari tingkat keluarga, lembaga pendidikan, sampai tingkat masyarakat.

d. Analisis Atas Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja indeks kerukunan beragama sebesar Rp. 600.000.000 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 600.000.000 atau capaian realisasi sebesar 100% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 104,14%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.0 atau sebesar 0%.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.7.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter Dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama	104,14%	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. Pada tahun 2022 capaian kinerja Indeks Kerukunan Beragama mencapai angka 104,14% dengan realisasi keuangan 100%. Hal ini menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.7.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	5	6	8	9
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	50,08		-		-

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 tidak dapat disajikan dikarenakan indikator kinerja indeks pembangunan kebudayaan baru dilaksanakan pada tahun 2022.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Point	50,08	82,5	60,70

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2022 sebesar 50,08 % dengan target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 78,5 %, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 63,79 % terhadap target akhir RPJMD tahun 2022.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indeks Pemajuan Kebudayaan merupakan suatu ukuran nilai yang menggambarkan capaian kinerja dalam Pembangunan Kebudayaan yang bertujuan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan.

Pemajuan merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya krisis karakter yang disebabkan oleh Pengaruh Kebudayaan Asing. Dengan adanya Pemajuan Kebudayaan berdampak positif pada kelestarian dan keberlangsungan kebudayaan suatu daerah.

Untuk mengetahui Indeks Pembangunan Kebudayaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IPK} = \text{Jumlah Bobot Dimensi} \times \text{Jumlah Indeks Dimensi}$$

Pada Tahun 2022, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak melakukan penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan dikarenakan Penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan hanya dilakukan pada tingkat Pusat dan Provinsi. Sebagai acuan realisasi capaian, Dinas Kebudayaan mengikuti data perhitungan dari Provinsi Kalimantan Utara. Adapun yang menjadi Faktor Penyebab Keberhasilan dan Penghambat dalam penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Tingkat Kabupaten sebagai berikut

1. Faktor penyebab Keberhasilan

- a. Ketersediaan tenaga ahli yang profesional di Bidang Kebudayaan untuk mengelola, mengembangkan dan melestarikan budaya
- b. Ketersediaan Anggaran
- c. Partisipasi masyarakat dalam menghargai, melestarikan dan mengembangkan budaya
- d. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pembangunan kebudayaan
- e. Adanya upaya pelestarian dan pemeliharaan warisan budaya

2. Faktor Penghambat

- a. Belum tersedianya aturan yang memuat tentang petunjuk teknis penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tingkat Kabupaten
- b. Belum adanya tim/OPD yang menjadi *leading sector* (Penanggung jawab) dalam melakukan penghitungan Indeks Pemajuan Kebudayaan mengingat bahwa dalam Rumus penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan terdiri dari 7 Dimensi dan 34 Indikator, dimana masing-masing Dimensi dan Indikator berada di OPD yang berbeda.

Dalam mengatasi Hambatan-hambatan, perlu dilakukan Langkah alternatif sebagai upaya perbaikan untuk kedepannya. Adapun alternatif yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Melakukan Koordinasi pada Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, Pemerintah Provinsi mengenai penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan
- b. Membentuk Tim yang bertanggung jawab/ bertugas melakukan penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Tingkat Kabupaten, khususnya Kabupaten Malinau.

d. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar Rp. 150.000.000,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 150.000.000,- atau capaian realisasi sebesar 97,92 % apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 63,79 %. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 150.000.000 atau sebesar 97,92 %.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan

antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.7.6
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	63,79	Pengembangan Kebudayaan	97,92 %

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022

Dari tabel 3.9.6 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Hasil capaian kinerja dan realisasi capain keuangan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program-program yang mendukung indikator kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan.



Cagar Budaya (Kuburan Tua) yang berada di Kabupaten Malinau

Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal

Tujuan 1: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Dan Karakteristik Daerah

7. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi Primer Berorientasi Pada Potensi dan Karakteristik Lokal

Pengukuran sasaran meningkatnya produktivitas sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal dengan indikator kinerja sasaran kontribusi pertanian terhadap PDRB, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran yaitu kontribusi pertanian terhadap PDRB dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.8
Evaluasi Pencapaian Sasaran 7
Meningkatnya produktifitas sektor sektor ekonomi primer
berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	Persen	4,82%	1,96%	40,66%

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2022

Pada Tabel 3.8 diatas dapat dilihat perbandingan kontribusi pertanian terhadap PDRB dengan target RPJMD 2016-2022 adalah 4,82% dan realisasi untuk tahun 2022 adalah 1,96% sehingga capaian kinerja untuk kontribusi pertanian terhadap PDRB tahun 2022 adalah 40,66%.

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.8.1

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	Persen	1,96%	3,03%	3,48%	64,68%	82,18%

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi kontribusi pertanian terhadap PDRB tahun 2022 sebesar 1,96 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 3,03 atau realisasi capaian kinerja sebesar 64,68% dan realisasi tahun 2021 sebesar 3.48 atau realisasi capaian kinerja sebesar 82,18%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 40,66% terhadap capaian tahun 2020 dan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 41,42% terhadap capaian tahun 2021.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.8.2**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	Persen	1,96%	5%	39,2%

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi kontribusi pertanian terhadap PDRB tahun 2022 sebesar 2,86% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 5%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 39,2% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke- n terhadap nilai pada tahun ke $n-1$ (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke $n-1$, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB Dibandingkan Realisasi Tahun Lalu Sebesar 3.48% terdapat penurunan sebesar 1.52% Hal ini terjadi menurut penjelasan BPS adalah karena, perhitungan di gabungan dengan kehutanan dan Perikanan, sehingga nilai pembagi di bagi ke tiga sektor, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, untuk ke depan BPS akan berusaha, melakukan Perhitungan masing-masing sektor PDRB, sehingga di harapkan Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB bisa Meningkat dan memenuhi target dari RPJMD.

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan akan berhasil tercapai. Factor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja ini adalah, meningkatnya produksi sektor Pertanian (Tanaman Pangan), Perkebunan dan Peternakan setiap Tahunnya, dukungan dana APBD dan APBN untuk Sektor Pertanian (Dalam Arti Luas) Meningkatnya dan pertambahnya Sarana dan Prasarana Pertanian, meningkatnya minat masyarakat dalam usaha Pertanian. Dan hal ini secara langsung akan meningkatkan pendapatan dan PDRB Pertanian di Tahun-tahun selanjutnya.





d. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja kontribusi pertanian terhadap PDRB sebesar Rp. 993.166.210,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.120.979.400,00 atau capaian realisasi sebesar 88,59%. apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 40.66%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 127.813.190,00 atau sebesar 59,34%.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.8.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Produktivitas Sektor Ekonomi Primer Berorientasi Pada Potensi dan Karakteristik Lokal	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB	40,66%	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	85,47%
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	98,64%
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	84,41%
			Program Penyuluh Pertanian	100%

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2022

Dari tabel 3.8.3 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Hasil capaian kinerja dan realisasi capain keuangan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program-program yang mendukung indikator kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

8. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah

Pengukuran sasaran meningkatnya nilai tambah sektor industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berorientasi pada potensi dan karakteristik wilayah dengan indikator kinerja kontribusi industri, perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi pariwisata terhadap PDRB, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran kontribusi industri, perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi pariwisata terhadap PDRB dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.9
Evaluasi Pencapaian Sasaran 8
Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata
Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB	Persen	2,70%	2,85%	105,55%
Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	1,84%	1,67%	90,76%

Sumber : Dinas Perindag dan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Tahun 2022

Pada Tabel 3.9 diatas dapat dilihat perbandingan kontribusi industri, perdagangan dan jasa terhadap PDRB dengan target di tahun 2022 adalah 2,70 realisasi 2,85 dan capaian kinerja untuk kontribusi industri, perdagangan dan jasa terhadap PDRB tahun 2022 adalah 105,55%. Untuk indikator kinerja kontribusi pariwisata terhadap PDRB dengan target di tahun 2022 adalah 1,84 realisasi untuk tahun 2022 adalah 1,67 dengan capaian kinerja untuk rata-rata kontribusi pariwisata terhadap PDRB tahun 2022 adalah 90,76%

KONTRIBUSI INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA TERHADAP PDRB

- a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.9.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB	Persen	2,85%	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 tidak dapat disajikan dikarenakan indikator kinerja Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB baru dilaksanakan pada tahun 2022.

- b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.9.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB	Persen	2,85%	3,00%	95%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi kontribusi industri, perdagangan dan jasa terhadap PDRB tahun 2022 sebesar 2,85% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 3,00% maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 95% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam satu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana semakin tinggi PDRB maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Untuk itu pemerintah khususnya kabupaten Malinau berusaha untuk terus menerus meningkatkan PDRB-nya khususnya dari sektor industri, perdagangan dan jasa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Uum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pengeluaran pemerintah daerah dan tenaga kerja. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Sektor industri, perdagangan dan jasa merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.

Pertumbuhan industri Kabupaten Malinau di Tahun 2022 ini terjadi pada industri kecil maupun industri menengah, sementara industri besar cenderung tetap. Hal ini mengingat bahwa kebijakan tata ruang Kabupaten Malinau yang terbatas untuk adanya penambahan jumlah industri besar. Sedangkan untuk jenis dan kelompok usahanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9.3
Jenis dan Kelompok Usaha Industri di Kabupaten Malinau Tahun 2022

No.	Jenis Industri	Aneka Usaha
1.	Pangan/Agro	1. Pembuatan Roti & Kue 2. Penggilingan Daging 3. Penggilingan Padi 4. Depo Air Minum 5. Tahu & Tempe 6. Pembuatan Mie 7. Kopi Bubuk 8. Obat Tradisional 9. Minyak Sawit
2.	Logam	1. Bengkel 2. Las, Teralis dan Bubut 3. Pandai Besi 4. Penggilingan Aspal 5. Pembuatan Perahu 6. Pengolahan Aluminium 7. Servis Elektronik 8. Percetakan
3.	Bahan Bangunan	1. Bata / Batako / Paving 2. Moulding
4.	Kerajinan	1. Anyaman 2. Manik-manik 3. Ukiran
5.	Furniture	1. Meubelair
6.	Konveksi	1. Penjahitan

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022

Realisasi persentase pertumbuhan industri pada Tahun 2022 sebesar 17,22% masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Perkembangan usaha industri pada tahun 2022 sebanyak 269 pelaku usaha. Upaya mempertahankan kinerja Persentase pertumbuhan industri adalah :

1. Terus meningkatkan sarana / prasarana dan kebijakan yang memberikan ruang gerak bagi pelaku industri .
2. Menjalin kerjasama dengan asosiasi yang ada untuk pengembangan industri kreatif.

3. Memotivasi pelaku industri kreatif dalam pemanfaatan bahan baku yang cukup.
4. Terus meningkatkan daya kreatifitas terutama pada sektor industri kuliner.
5. Mendorong pertumbuhan industri berdasarkan Rencana Pembangunan Industri
6. Meningkatkan pemasaran produk unggulan tingkat lokal, nasional maupun internasional

Upaya kedepan yang dilakukan untuk pencapaian persentase peningkatan jumlah pertumbuhan industri adalah :

1. Pembinaan dan menumbuhkan usaha baru dan pengawasan terhadap usaha baru yang ada
2. Pelatihan SDM baik Kriya dan Aneka Kuliner
3. Fasilitasi bantuan mesin peralatan industri
4. Fasilitasi berkenaan HAKI, Paten Sertifikasi Halal, SNI Produk dan Pelatihan Keamanan Pangan.



Kerajinan Tas Rotan dan Batik Malinau

Kinerja Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan pada tahun 2022 dapat terealisasi 40,75%. Dalam beberapa tahun terakhir ini Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan semakin bagus merupakan kontribusi sektor perdagangan dalam pembentukan struktur perekonomian. Hal ini sejalan pula bertambahnya jumlah pelaku usaha di Malinau. Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki izin sesuai ketentuan pada tahun 2022 sebanyak 1.053 pelaku usaha.

Kendala yang dihadapi untuk pencapaian target adalah :

1. Tingkat kesadaran pelaku usaha/pedagang di pasar untuk menjaga kebersihan masih rendah,
2. Kesadaran membayar biaya pemanfaatan, masih rendah dan tidak tepat waktu
3. Tingkat keamanan masih rendah.

Upaya kedepan yang dilakukan untuk pencapaian target pengelolaan sarana distribusi perdagangan adalah :

1. Mengoptimalkan, Asosiasi dan pelaku usaha/pedagang untuk menjaga keamanan pasar
2. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam kondisi baik.
3. Terus melakukan revitalisasi pasar sesuai standar.



d. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja kontribusi industri, perdagangan dan jasa terhadap PDRB sebesar Rp. 4.016.864.540 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 4.215.279.395 atau capaian realisasi sebesar 96,29%. apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 105,55%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 198.414.855 atau sebesar 3,71%.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.9.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB	105,55	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	94,82%
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022

Dari tabel 3.9.3 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Hasil capaian kinerja dan realisasi capain keuangan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program-program yang mendukung indikator kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PDRB

- a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun (%)	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	5	6	8	9
Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	1,67	1,83	1,92	109	114

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB tahun 2022 sebesar 1,67 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 1,83 atau realisasi capaian kinerja sebesar 109 % dan realisasi tahun 2021 sebesar 1,92 atau realisasi capaian kinerja sebesar 114 %, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2022 sebesar -8,74% terhadap capaian tahun 2020 dan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2022 sebesar -13,02 % terhadap capaian tahun 2021.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9.6
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	1,67%	1,86%	89,78%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi kontribusi pariwisata terhadap PDRB tahun 2022 sebesar 1,67% dengan target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 1,84%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 90,76% terhadap target akhir RPJMD tahun 2022.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Daerah dikarenakan Pariwisata dapat memberikan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kekayaan suatu daerah.

Pengaruh pariwisata dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terlihat dari kontribusi jasa pariwisata, penerimaan dan sektor pendukungnya. Sektor pariwisata merupakan sektor yang berbasis jasa dan sebagai salah satu sektor unggulan yang strategis dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pariwisata tidak lepas dari jasa penyedia makanan dan minuman yaitu restoran, serta penyediaan akomodasi (hotel, penginapan)

Untuk mengetahui kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100$$

Target kontribusi sektor pariwisata pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,84% dengan realisasi sebesar 1,67%. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Terdapat objek wisata sebagai destinasi wisata di Kabupaten Malinau.
2. Adanya kunjungan wisatawan.
3. Penyediaan jasa makan dan minum (Restoran dan Rumah Makan), penyediaan jasa akomodasi yang berkembang di Kabupaten Malinau.
4. Adanya dukungan dari instansi terkait dalam upaya peningkatan kualitas penyediaan jasa dan akomodasi pada sektor pariwisata melalui kegiatan pelatihan antara lain pelatihan pemandu wisata alam, pelatihan homestay dan lainnya.

Dalam pencapaian kinerja tidak hanya di pengaruhi faktor pendukung ada juga faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kunjungan wisatawan pasca Covid-19.
2. Pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

Menindaklanjuti hambatan-hambatan tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan alternatif perbaikan untuk solusi kedepannya sebagai berikut:

1. Melakukan promosi pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan.
2. Melakukan pendataan secara berkelanjutan terhadap usaha pariwisata yang ada.
3. Melakukan peningkatan dan pengembangan pada objek pariwisata.

d. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja kontribusi pariwisata terhadap PDRB sebesar Rp. 463.138.751 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 547.998.500 atau capaian realisasi sebesar 84,51% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 90,76%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 84.859.749 atau sebesar 15,49%.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.9.7
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	90,76%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	85,08%
			Program Pemasaran Pariwisata	88,84%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022

Dari tabel 3.9.6 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Hasil capaian kinerja dan realisasi capaian keuangan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program-program yang mendukung indikator kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

9. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro Yang Berkualitas

Pengukuran sasaran meningkatnya pertumbuhan koperasi serta usaha kecil dan mikro yang berkualitas dengan indikator kinerja sasaran persentase peningkatan koperasi berkualitas dan persentase peningkatan usaha mikro dan kecil, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran yaitu persentase peningkatan koperasi berkualitas dan pesentase peningkatan usaha mikro dan kecil dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.10
Evaluasi Pencapaian Sasaran 9
Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil
dan Mikro Yang Berkualitas

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	Persen	70%	72,4%	103,43%
Persentase Peningkatan Usaha Mikro Dan Kecil	Persen	70,60%	81,90%	116,01%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022

Pada Tabel 3.10 diatas dapat dilihat perbandingan persentase peningkatan koperasi berkualitas dengan target RPJMD 2021-2026 adalah 70% dan realisasi untuk tahun 2022 adalah 72,4% sehingga capaian kinerja untuk persentase peningkatan koperasi berkualitas tahun 2022 adalah 103,43%. Persentase peningkatan usaha mikro dan kecil dengan target RPJMD 2021-2026 adalah 70,60% dan realisasi untuk tahun 2022 adalah 81,90% sehingga capaian kinerja untuk persentase peningkatan usaha mikro dan kecil tahun 2022 adalah 116,01%.

PERSENTASE PENINGKATAN KOPERASI BERKUALITAS

- a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.10.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	5	6	8	9
Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	Persen	72,4%	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 tidak dapat disajikan dikarenakan indikator kinerja Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB baru dilaksanakan pada tahun 2022.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.10.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	Persen	72,4%	80%	90,5%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi persentase peningkatan koperasi berkualitas tahun 2022 sebesar 72,4% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 80%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 90,5% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Dalam beberapa tahun terakhir ini adanya peningkatan Koperasi Aktif dari tahun sebelumnya. Jumlah Koperasi Aktif pada tahun 2022 sebanyak 42 Koperasi. Hal ini dikarenakan adanya pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dengan berbagai kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

Hal ini juga disebabkan oleh beberapa koperasi yang naik kelas menjadi binaan Kabupaten. Selain itu, upaya yang dilakukan untuk mempertahankan persentase Koperasi Aktif adalah terus menginventarisir Koperasi yang Tidak Aktif untuk dimasukkan dalam Program pembubaran koperasi oleh pemerintah dan menjaga Koperasi Aktif agar tidak turun menjadi Koperasi Tidak Aktif melalui monitoring dan motivasi RAT.

Adapun faktor yang menghambat koperasi aktif adalah :

1. Sumber daya manusia Koperasi masih belum memadai.
2. Kurangnya pemahaman gerakan Koperasi dalam penyelenggaraan Rapat Anggota koperasi dan partisipasi, pengawasan anggota dan pengelolaan koperasi untuk pengembangan koperasi.
3. belum adanya pengembangan sistem yang memudahkan perangkat koperasi melaporkan aktivitas kelembagaannya.
4. Belum optimalnya Koperasi dapat meningkatkan produk unggulan daerah menjadi komoditas ekspor yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan devisa daerah.

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan pembinaan terhadap Lembaga koperasi.
2. Meningkatkan kompetensi SDM pengurus koperasi.
3. Terus meningkatkan kepatuhan koperasi terhadap perundang-undangan.
4. Terus meningkatkan partisipasi anggota terhadap usaha koperasi.
5. Terus meningkatkan Kerjasama pembiayaan dengan pihak ketiga.
6. Terus meningkatkan unit usaha yang dikelola koperasi.



Kegiatan RAT Koperasi



Kegiatan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi

d. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase peningkatan koperasi berkualitas sebesar Rp. 446.773.553 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 600.798.176 atau capaian realisasi sebesar 74,86% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 103,43%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 154.024.623 atau sebesar 25,14%.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi

keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.10.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro Yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	103,43%	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	74,36%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program pendidikan dan pelatihan perkoperasian dengan hasil capaian kinerja mencapai angka 103,43% dengan realisasi keuangan 74,36%. Hal ini menunjukkan bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

PERSENTASE PENINGKATAN USAHA MIKRO DAN KECIL

- Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.10.4

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	5	6	8	9
Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil	Persen	81,90%	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 tidak dapat disajikan dikarenakan indikator kinerja Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil baru dilaksanakan pada tahun 2022.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.10.5

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil	Persen	81,90%	100%	81,90%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi persentase peningkatan usaha mikro dan kecil tahun 2022 sebesar 81,90% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa

sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 81,90% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Jumlah UMK wira usaha baru pada tahun 2022 sebanyak 345 UMKM. Hal ini dikarenakan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau dengan menumbuhkan kembangkan UMKM dalam meningkatkan kompetensi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah:

1. Terus memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk melengkapi perizinan yang diperlukan untuk berusaha.
2. Terus melaksanakan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku wirausaha.
3. Terus meningkatkan Kerjasama pemasaran baik secara online maupun offline.



Sentra Pemasaran Produk UMKM yang dilaksanakan setiap hari sabtu dan minggu



Bantuan Modal Usaha ke pelaku usaha Malinau

d. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja pesentase peningkatan usaha mikro dan kecil sebesar Rp. 2.670.967.410 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.848.437.250 atau capaian realisasi sebesar 93,77% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 116,01%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 177.469.840 atau sebesar 6,23%.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.10.6
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil Dan Mikro Yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Dan Kecil	116,01%	Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	93,77%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022

Dari tabel 3.10.6 diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan hasil capaian kinerja mencapai angka 116.01% dengan realisasi keuangan 93,77%. Hal ini menunjukkan bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

10. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan

Pengukuran sasaran meningkatnya ketahanan pangan dengan indikator kinerja sasaran indeks ketahanan pangan, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran yaitu indeks ketahanan pangan dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.11
Evaluasi Pencapaian Sasaran 10
Meningkatnya Ketahanan Pangan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Indeks Ketahanan Pangan	Poin	73,65	67,25	91,31%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022

Pada Tabel 3.11 diatas dapat dilihat hasil capaian indikator kinerja indeks ketahanan pangan dengan target RPJMD 2016-2022 adalah 73,65 dan realisasi untuk tahun 2022 adalah 67,25 dengan capaian kinerja tahun 2022 adalah 91,31%.

- a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.11.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	5	6	8	9
Indeks Ketahanan Pangan	Poin	67,25	70,78	73,66	105,24%	109,53%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi indeks ketahanan pangan tahun 2022 sebesar 67,25 poin dengan realisasi tahun 2020 sebesar 70,78 poin atau realisasi capaian kinerja sebesar 105,24% dan realisasi tahun 2021 sebesar 73,66 poin atau realisasi capaian kinerja sebesar 109,53%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 4,98 % terhadap capaian tahun 2020 dan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 8,70% terhadap capaian tahun 2021.

- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.11.2**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Indeks Ketahanan Pangan	Poin	67,25	79,4	84,69%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi indeks ketahanan pangan tahun 2022 sebesar 67,25 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 79,4, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 84,69% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau terkait dengan tugas pokoknya yaitu Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten,

Indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) langsung dihitung oleh Badan Ketahanan Pangan tingkat Nasional yang digolongkan ke dalam 3 aspek, yaitu: (a) Aspek Ketersediaan Pangan; (b) Aspek Akses Terhadap Pangan; (c) Aspek Pemanfaatan Pangan, yang tercerminkan melalui 9 indikator ketahanan pangan dan gizi. Sembilan (9) indikator yang dipilih tersebut sebagai dasar penentuan IKP adalah sebagai berikut :

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih

Rasio konsumsi normatif per kapita per hari terhadap ketersediaan bersih pangan komoditas padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan sagu merupakan petunjuk kecukupan pangan pada suatu wilayah. Sedangkan ketersediaan bersih merupakan angka pendekatan dari produksi dan stok

pangan yang sudah dikurangi dengan susut, tercecer, penggunaan untuk benih, pakan dan industri non pangan.

Konsumsi normatif didefinisikan sebagai jumlah pangan komoditas sereal yang harus dikonsumsi oleh seseorang per hari untuk memperoleh kilo kalori energi dari komoditas tersebut. Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2018, didapat bahwa standar kebutuhan kalori per kapita per hari sebesar 2100 kkal dengan pola konsumsi pangan di Indonesia menunjukkan hampir 50% nya berasal dari komoditas sereal. Sehingga untuk mencapai 50% kebutuhan kalori dari komoditas sereal dan umbi-umbian maka seseorang harus mengonsumsi kurang lebih 300 gram per hari komoditas tersebut. Oleh sebab itu dalam perhitungan indikator ini, menggunakan nilai 300 gram sebagai nilai konsumsi normatif (konsumsi yang direkomendasikan).

Perlu dijelaskan bahwa dalam indikator ini dipilih konsumsi normative daripada penggunaan konsumsi aktual (konsumsi sehari-hari) dikarenakan konsumsi aktual dipengaruhi oleh banyak hal di luar aspek ketersediaan pangan itu sendiri seperti daya beli, pasar, kemampuan penyerapan makanan dan kebiasaan/kebudayaan. Data ketersediaan bersih yang digunakan menggunakan data yang bersumber dari Dinas Pertanian se Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, Bulog dan BPS Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021.

2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

Indikator ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan seseorang untuk hidup secara layak. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi ketahanan pangan keluarga (DKP dan WFP 2013; FAO 2015; Kavosi et al. 2014; Riyadi et al. 2011; Ramli et al. 2009; Lubis 2010; Sofiati 2009; dan Misselhorn 2005). Data persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021.

3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan suatu rumah tangga, maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi.

Distribusi pengeluaran untuk pangan dari total pengeluaran merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga. Teori Engel menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan akan mengalami penurunan.

Pengeluaran pangan merupakan proksi yang baik untuk mengukur kesejahteraan dan ketahanan pangan (Suhardjo 1996; Azwar 2004). Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara, maka pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil (Deaton dan Muellbauer 1980). Data persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran bersumber dari hasil SUSENAS yang diestimasi dengan metode Small Area Estimation (SAE) oleh BPS tahun 2021.

4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik

Tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan. Hal ini merupakan indikasi kesejahteraan suatu wilayah atau rumah tangga yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; Wiranthi et al. 2014; Sabarella 2005; dan Sofiati 2009). Rumah tangga tanpa akses listrik diduga akan berpengaruh positif terhadap kerentanan pangan dan gizi. Data persentase rumah tangga tanpa akses listrik bersumber dari hasil SUSENAS yang diestimasi dengan metode Small Area Estimation (SAE) oleh BPS tahun 2021.

5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun

Rata-rata lama sekolah perempuan adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tingkat pendidikan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi, dan menjadi hal yang sangat penting dalam pemanfaatan pangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pendidikan berhubungan erat dengan penyerapan pangan dan ketahanan pangan (Khan dan Gill 2009; Arif 2005; Molnar 1999; dan Mahmood et al. 1991). Data rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun bersumber dari hasil SUSENAS yang diestimasi dengan metode Small Area Estimation (SAE) oleh BPS tahun 2021. Sumber data lain berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.

6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih

Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung dan air hujan (termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 m. Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untuk pencapaian ketahanan pangan karena di daerah yang akses terhadap air bersihnya rendah ditemukan kejadian malnutrisi yang tinggi (DKP dan WFP 2009; Sofiati 2009). Akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting dalam mengurangi masalah penyakit secara khusus diare, sehingga memperbaiki status gizi melalui peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh (DKP dan WFP 2015; Pemprov NTT et al. 2015; Kavosi et al. 2014; Khan dan Gill 2009; Burger and Esrey 1995; dan Thomas dan Strauss 1992). Data persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih bersumber dari hasil SUSENAS yang diestimasi dengan metode Small Area Estimation (SAE) oleh BPS tahun 2021.

7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk

Indikator ini mengukur sejauh mana kesesuaian ketersediaan tenaga kesehatan dan jumlah masyarakat yang dilayaninya. Tenaga kesehatan terdiri dari dokter umum, dokter gigi, bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk akan mempengaruhi tingkat kerentanan pangan suatu wilayah (Lubis 2010 dan Sofiati 2009). Indikator ini dihitung dengan membagi jumlah penduduk di suatu wilayah dengan jumlah tenaga kesehatan. Hasilnya kemudian dibagi dengan kepadatan penduduk untuk memperoleh jumlah populasi terkoreksi yang dilayani per tenaga kesehatan. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin rentan daerah tersebut. Data rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara serta BPS Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021.

8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)

Balita stunting adalah anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin (Standar WHO, 2005). Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang sangat baik digunakan pada kelompok penyerapan pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita adalah situasi ketahanan pangan rumah tangga, status gizi dan kesehatan ibu, pendidikan ibu, pola asuh anak, akses terhadap air bersih dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang tepat waktu. Data persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting) bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021.

9. Persentase angka kesakitan

Angka kesakitan/morbiditas adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan merupakan gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena

kecelakaan atau hal-hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Data persentase angka kesakitan bersumber dari hasil SUSENAS yang diestimasi dengan metode Small Area Estimation (SAE) oleh BPS tahun 2021.

Berdasarkan pendekatan metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah dengan menggunakan metode pembobotan.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0 – 100).
2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus :

$$Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i x_{ij}$$

Dimana:

Y_j : Skor komposit kecamatan ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator ke-i

i : Indikator ke 1, 2, ..., 9

j : Kecamatan ke 1, 2, ..., dst

3. Mengelompokkan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Rendahnya nilai IKP di Kabupaten Malinau juga disebabkan oleh permasalahan-permasalahan dari beberapa indikator yang berbeda-beda, maka intervensi program untuk meningkatkan nilai IKP tersebut pun idealnya harus lebih spesifik terhadap lokasi wilayah agar nantinya menjadi solusi yang tepat terhadap kondisi setempat.

Badan Ketahanan Pangan mengelola data IKP bersumber dari data BPS Pusat, pendekatan peningkatan nilai IKP dilakukan secara holistic berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya nilai IKP di wilayah tersebut, seperti :

1. Jika permasalahan disebabkan oleh masalah ketersediaan maka perlu upaya-upaya peningkatan produksi;
2. Masalah akses ekonomi/daya beli yang rendah dapat diatasi dengan penyediaan lapangan kerja atau jarring pengamanan sosial;
3. Keterbatasan infrastruktur diatasi dengan pembangunan dan peningkatan fasilitas penunjang seperti jalan, jembatan, Pelabuhan dan Gudang untuk penyimpanan stok pangan;
4. Masalah kesehatan dan gizi diatasi dengan penyuluhan tentang gizi, konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman dan sanitasi lingkungan serta pemerataan tenaga kesehatan
5. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) bersifat dinamis dan perlu dilakukan kerjasama antar OPD yang terkait dari 9 Indikator perhitungan IKP dan di update setiap tahun untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai oleh suatu wilayah. IKP juga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan intervensi dan lokus program penguatan ketahanan pangan.
6. Perlu di bentuk Tim Khusus dan suport dana terkait 9 Indikator penilaian IKP yang melibatkan beberapa OPD dan bekerjasama dengan BPS Kabupaten Malinau untuk mendukung perhitungan IKP oleh Badan Ketahanan Pangan tingkat Nasional

d. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja indeks ketahanan pangan sebesar Rp. 508.062.000 dari anggaran

yang disediakan sebesar Rp 525.000.000 atau capaian realisasi sebesar 96,77% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 91,31%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 16.938.000. atau sebesar 3,23%.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.11.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	91,13%	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	97,23%
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	94,36%
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	96,72%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022

Dari tabel 3.11.3 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja didukung oleh program-program. Hasil capaian kinerja dan realisasi capaian keuangan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program-program yang mendukung indikator kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

11. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Profesionalitas Tenaga Kerja

Pengukuran sasaran meningkatnya profesionalitas tenaga kerja dan indikator kinerja sasaran tingkat pengangguran terbuka, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran yaitu tingkat pengangguran terbuka dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.12
Evaluasi Pencapaian Sasaran 11
Menurunnya Angka Pengangguran

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,14%	3,30%	120,28%

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022

Berdasarkan Tabel di atas, pencapaian sasaran menurunnya angka pengangguran dengan indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka dengan target 4,14% dan terealisasi 3,30%. Untuk tahun 2022 capaian kinerja sebesar 120,28%, dengan demikian berarti ada peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2021.

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.12.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,30	5,08	4,14	154%	125%

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2022 sebesar 3,30 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 5,08 atau realisasi capaian kinerja sebesar 154% dan realisasi tahun 2021 sebesar 4,14 atau realisasi capaian kinerja sebesar 125%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 dimana tahun 2022 pengangguran terbuka menurun sekitar -35,03% terhadap capaian tahun 2020 dan pengangguran terbuka menurun sekitar 20,28% terhadap capaian tahun 2021.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.12.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,30	4,00	117,5%

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2022 adalah perbandingan Tingkat Pengangguran tahun 2022 sebesar 3,30 dengan target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 4,00 tahun, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 117,5% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan pencapaian kinerja tahun 2022 bahwa sasaran menurunnya angka pengangguran dengan indikator tingkat pengangguran terbuka untuk tahun 2022 capaian kinerjanya sebesar 120,28% dari target 4,14% dan realisasi 3,30%.

Tabel 3.12.3
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan
Kabupaten Malinau Tahun 2022

Jenis Kegiatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Bekerja	29.445	17.127	46.582
Pengangguran	925	667	1.592
Bukan Angkatan Kerja	5.013	12.315	17.328
Total	35.393	30.109	65.502

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, Tahun 2022

Realisasi indikator tingkat pengangguran terbuka dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat pengangguran} = \frac{\text{Jumlah yg menganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$$

Maka berdasarkan data Angkatan kerja tahun 2022 Jumlah angka pengangguran terbuka tahun 2022 sebanyak 1.592 jiwa/jumlah penduduk Angkatan kerja sebanyak 48.174 jiwa x 100% = 3,30%.

Data jumlah Angkatan kerja pada tahun 2022 di Kabupaten Malinau adalah 48.174 orang/jiwa atau sekitar 73,55% persen dari jumlah penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 73,55%, dengan

jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tersebut menunjukkan besarnya partisipasi angkatan kerja aktif dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Malinau. Dari jumlah 48.174 orang/jiwa, proporsi angkatan kerja laki-laki lebih besar dibandingkan dengan angkatan kerja perempuan dimana 63,06 persen (30.380 jiwa) adalah angkatan kerja laki-laki dan 36,94 persen (17.794 jiwa) penduduk perempuan.

Jumlah angkatan kerja terbagi menjadi dua kategori yaitu jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan sebesar 46.582 orang (96,69%), sedangkan jumlah penduduk yang belum atau tidak memiliki pekerjaan (Pengangguran Terbuka) sebanyak 1.592 orang (3.30%).

Capaian kinerja tahun 2022 yaitu 120,28%, berarti ada peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesempatan kerja yang cukup besar pada sektor-sektor usaha baik pada sector industri, perbankan maupun sektor UMKM mandiri dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Malinau.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat atau angka pengangguran di Kabupaten Malinau belum menurun secara signifikan karena;

- a. Dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 membuat banyak usaha/pengusaha, perusahaan dan UMKM tidak dapat membuka lowongan pekerjaan dan bahkan malah mengurangi tenaga kerja atau karyawannya.
- b. Kurang maksimalnya penyerapan Tenaga Kerja Lokal di berbagai sector industry karena kurangnya keterampilan/Skil yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan industry saat ini.
- c. Masih terdapat pengangguran terbuka baru akibat hilangnya mata pencaharian /pekerjaan atau usaha akibat pandemi covid-19.
- d. Jumlah pencari kerja terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, demikian pula laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap bersaing mengisi peluang pasar kerja serta tidak terlepas dari kecenderungan terus meningkatnya tamatan lembaga-lembaga pendidikan formal.

d. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka sebesar Rp. 1.576.859.469 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 1,714,952.000 atau capaian realisasi sebesar 91,94% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 120,28%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.138.092.531 atau sebesar 8,06%.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.12.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	120,28	1. Program Penempatan Tenaga Kerja	99,28
			2. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	73,60

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022

Dari tabel 3.12.4 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Hasil capaian kinerja dan realisasi capain keuangan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program-program yang mendukung indikator kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

12. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah

Pengukuran sasaran meningkatnya investasi daerah dan indikator kinerja sasaran nilai investasi daerah dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran nilai investasi daerah dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.13
Evaluasi Pencapaian Sasaran 12
Meningkatnya Investasi Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Nilai Investasi Daerah	Rupiah	90.500.000.000	1.030.086.378.749	1.138%

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022

Pencapaian sasaran meningkatnya nilai investasi daerah dengan target RPJMD 2021-2026 adalah 90.500.000.000 dan terealisasi untuk tahun 2022 adalah Rp. 1.030.086.378.749, sehingga capaian indikator kinerja nilai investasi daerah tahun 2022 adalah 1.138%.

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.13.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	5	6	8	9
Nilai Investasi Daerah	Rupiah	1.030.086.378.749	-	-	-	-

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 tidak dapat disajikan dikarenakan indikator kinerja Nilai Investasi Daerah baru dilaksanakan pada tahun 2022.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.13.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Nilai Investasi Daerah	Rupiah	1.030.086.378.749	94.000.000.000	1095%

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi nilai investasi daerah tahun 2022 sebesar Rp. 1.030.086.378.749 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar Rp. 94.000.000.000, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 1095% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Persentase Nilai Investasi Daerah adalah persentase jumlah nilai dana atau modal atau barang yang di investasi dalam jangka Panjang melalui penanaman modal Asing maupun penanaman modal dalam negeri dibawah koordinasi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Malinau. Indikator ini dipilih dengan pertimbangan dapat mengukur sejauh mana investasi bertumbuh serta membuka peluang bagi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten malinau serta peningkatan perekonomian daerah. Untuk mengukur Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota adalah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi nilai investasi daerah tahun 2022 sebesar 1.030.086.378.748. dengan realisasi tahun 2020 sebesar 92.077.524.030 atau realisasi capaian kinerja sebesar -98,7 % dan realisasi tahun 2021 sebesar 314.470.808.689 atau realisasi capaian kinerja sebesar 241,53 %, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022.

Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja :

1. Anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Malinau;
2. Aparatur pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya;
3. Telah ditetapkan jadwal dan KAK pelaksanaan kegiatan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
4. Komitmen OPD melaksanakan tupoksinya dengan baik.
5. Keberhasilan dalam menyampaikan informasi tentang investasi melalui keikutsertaan dalam pameran promosi potensi investasi Daerah .
6. Pembinaan penanaman modal berkelanjutan.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja :

1. Adanya keterlambatan terbitnya Juknis pada kegiatan DAK dan menunggu pergeseran/ perubahan anggaran sesuai Junis Kementrian sehingga kegiatan dalam melaksanakan kegiatan terbatas
2. Adanya Keterlambatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal oleh Pelaku usaha (LKPM) yang menjadi penghambat dalam mendapatkan Update data Nilai Realisasi Investasi tiap Triwulannya.

d. Analisis atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja nilai investasi daerah sebesar Rp. 251.319.785 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 383.914.000 atau capaian realisasi sebesar 65,46%. apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 1138%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi

penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 132.594.215 atau sebesar 34,54%.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.13.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi daerah	1138%	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	65,46%

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan capaian kinerja mencapai angka 1138% dengan realisasi keuangan 65,46%. Hal ini menunjukkan bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Tujuan 1: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan dasar

13. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

Pengukuran Tujuan Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan dasar melalui Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran persentase panjang jalan dalam kondisi mantap, persentase pemukiman yang layak, rasio rumah layak huni, persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi, persentase penduduk berakses air minum dan persentase irigasi kabupaten yang berfungsi dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.14
Evaluasi Pencapaian Sasaran 13
Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	50,00%	12,16%	24,32%
Persentase Pemukiman yang Layak	Persen	77%	81,16	105,41%
Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	1:1,074	1:1,150	1:08%
Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi	Persen	65%	94%	98,94%
Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	67%	78,83%	117,66%
Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi	Persen	28,01%	23,87%	85,20%

Sumber : Dinas PUPRPerkim dan Dinas Perhubungan Tahun 2022

PERSENTASE PANJANG JALAN DALAM KONDISI MANTAP

Pada tabel 3.13 di atas pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dengan indikator kinerja sasaran persentase panjang jalan dalam kondisi baik atau mantap untuk tahun 2022 ditargetkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 adalah 50,00%. Tahun 2022 realisasi dari indikator kinerja sasaran persentase panjang jalan dalam keadaan mantap mencapai 12,16% dengan capaian kinerja sebesar 24,32%.

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	12,16%	49,70%	45,10%	408%	370%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap tahun 2022 sebesar 12,16% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 49,70% atau realisasi capaian kinerja sebesar 408% dan realisasi tahun 2021 sebesar 45,10% atau realisasi capaian kinerja sebesar 370%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 35,53% terhadap capaian tahun 2020 dan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 37,03% terhadap capaian tahun 2021.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	12,16%	64,40%	18,88%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi persentase panjang jalan dalam kondisi mantap tahun 2022 sebesar 12,16% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 64,40%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2022 sebesar 18,88% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Dari tabel-tabel yang telah disajikan diatas, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase jalan dalam kondisi baik atau mantap yaitu :

$$\frac{\text{panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$$

Penyelenggaraan jalan pada tahun 2022, capaian indikator kinerja yaitu Kabupaten Malinau dalam mencapai jalan dalam kondisi baik sebesar 12,16 persen untuk jalan kabupaten pada akhir tahun 2022 mengalami penurunan

dari target 50 persen menurun menjadi 37,84 persen yang disebabkan perubahan laju penurunan kondisi jalan yang tidak diimbangi dengan upaya peningkatan jalan dan tidak terpenuhinya standar pemeliharaan rutin jalan serta meningkatnya kerusakan jalan. Dan perubahan penilaian kriteria kondisi jalan sedang yang sebelumnya jalan agregat masuk dalam kondisi mantap (baik+sedang) sementara untuk tahun 2022 jalan agregat masuk dalam kondisi rusak sehingga menjadi menurun panjang jalan dalam kondisi sedang. Hal ini secara prinsip diupayakan penyelesaiannya dengan perhatian terus menerus dan berkesinambungan terhadap sarana pendukung serta kebijakan penganggaran APBD yang lebih proporsional dan pemanfaatan dana pusat.

Program Pembangunan Jalan Tahun 2022



**Tabel 3.14.3
Data Status Jalan Kabupaten Malinau**

URAIAN	JALAN KABUPATEN		
	2020	2021	2022
PANJANG JALAN BERDASARKAN JENIS PEMUKIMAN (KM)			
a. Aspal	167.42	120.07	120.07
b. Kerikil	231.77	440.67	440.67
c. Tanah/Belum Tembus	644.01	436.92	436.92
d. Lapen Macadam		43.84	43.84
e. Rigid Beton		1.70	1.70
TOTAL PANJANG JALAN	1043,20	1043,20	1043,20
PANJANG JALAN BERDASARKAN KONDISI JALAN (KM)			
a. Baik	79.14	111.36	111.36
b. Sedang	439.50	358.61	358.61
c. Rusak Ringan	108.33	222.18	222.18
d. Rusak Berat	416.22	351.06	351.06
TOTAL PANJANG JALAN	1043.2	1043,2	1043,2
PANJANG JALAN BERDASARKAN KELAS JALAN (KM)			
a. Kelas III	1043.2	1043.2	1043.2
TOTAL PANJANG JALAN	1043.2	1043.2	1043.2
PENDANAAN APBD BIDANG JALAN			
a. APBD Kabupaten Malinau	25,625,021,300	53.665.530.400	53.665.530.400
b. DAK Bidang Jalan	41,305,633,000	23.876.581.000	23.876.581.000
TOTAL JUMLAH PENDANAAN	66,930,654,300	77.542.111.400	77.542.111.400

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2022

d. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.

2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase panjang jalan dalam kondisi mantap sebesar Rp. 39.079.858.666 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 40.484.526.586 atau capaian realisasi sebesar 96,53%. apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 24,32%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.1.404.667.920 atau sebesar 3,47%.

Efisiensi SDM khususnya SDM Bidang Bina Marga, UPTD dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup atau sedang yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jenjang pendidikan tinggi S1 hingga S3 masih rendah meskipun demikian efektivitas SDM cukup memuaskan yakni dengan melihat penurunan pelanggaran yang dilakukan dan insentif yang diterima sehingga pencapaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan baik.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.14.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	24,32	Program Penyelenggaraan Jalan	96,53%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2022

Dari tabel 3.14.4 diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh beberapa program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Hasil capaian indikator kinerja Persentase jalan dalam kondisi mantap mencapai angka 24,32%. Program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut diatas adalah program penyelenggaraan jalan dengan realisasi keuangan 96,53%.

PERSENTASE PEMUKIMAN YANG LAYAK

- a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Pesentase Pemukiman Yang layak	Persen	81,16	-	-	-	-

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dihitung dikarenakan indikator kinerja persentase pemukiman yang layak baru dilaksanakan ditahun 2022.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.6
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase Pemukiman Yang layak	Persen	81,16	81,97	99,01%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Persentase Pemukiman Yang layak tahun 2022 sebesar 81,16% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 81,97%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 99,01% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja persentase pemukiman yang layak antara lain :

1. Tersedianya SDM yang kompeten;
2. Tersedianya anggaran baik itu dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat yakni APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dan APBD Murni;
3. Komitmen dan penekanan pimpinan DPU-PR.PERKIM untuk melakukan strategi percepatan pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing PPK/PPTK;

4. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak stakeholders.

Kelemahan penyedia jasa dalam menyelesaikan administrasi pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan dapat mengganggu pencapaian kinerja seperti yang telah ditargetkan, namun hal ini tidak terlalu banyak berpengaruh pada pekerjaan fisik di lapangan. Dengan melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan pencapaian target baik fisik maupun keuangan.



d. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase pemukiman yang layak sebesar Rp. 5.080.555.475 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 5.083.349.200 atau capaian realisasi sebesar 99,95% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 105,41%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 2.793.725 atau sebesar 0,05%.

Efisiensi SDM khususnya SDM Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup atau sedang yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jenjang pendidikan tinggi S1 hingga S2 masih rendah meskipun demikian efektivitas SDM cukup memuaskan yakni dengan melihat penurunan pelanggaran yang dilakukan dan insentif yang diterima sehingga pencapaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan baik.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.14.7
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Pesentase Pemukiman Yang layak	105,41%	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah	99,95%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dengan capaian kinerja mencapai angka 105,41% dan realisasi keuangan 99,95%. Hal ini menunjukkan bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

RASIO RUMAH LAYAK HUNI

- a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Hasil persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.8
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	1:1,15	-	-	-	-

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dihitung dikarenakan indikator kinerja Rasio Rumah Layak Huni merupakan salah satu indikator kinerja yang baru dilaksanakan ditahun 2022.

- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.9
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	1:1,15	1:1,062	1:1,082

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Rasio Rumah Layak Huni tahun 2022 sebesar 1:1,15 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 1:1,062, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 1:1,082 terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja persentase pemukiman yang layak antara lain :

1. Tersedianya SDM yang kompeten;
2. Tersedianya anggaran dari Pemerintah Daerah melalui APBD Murni;
3. Komitmen dan penekanan pimpinan DPU-PR.PERKIM untuk melakukan strategi percepatan pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing PPK/PPTK;
4. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak stakeholders.

Kelemahan penyedia jasa dalam menyelesaikan administrasi pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi keuangan, namun hal ini tidak terlalu banyak berpengaruh pada pekerjaan fisik di lapangan.

Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan pencapaian target baik fisik maupun keuangan.

d. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja rasio rumah layak huni sebesar Rp. 6.777.657.328 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 6.999.852.865 atau capaian realisasi sebesar 96,83%. apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 1:08. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 222.195.537 atau sebesar 3,17%.

Efisiensi SDM khususnya SDM Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup atau sedang yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jenjang pendidikan tinggi S1 hingga S2 masih rendah meskipun demikian efektivitas SDM cukup memuaskan yakni dengan melihat penurunan pelanggaran yang dilakukan dan insentif yang diterima sehingga pencapaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan baik.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program,

kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.14.10
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Rasio Rumah Layak Huni	1:08	Program pengembangan Permukiman	96,83%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program pengembangan pemukiman dengan capaian kinerja mencapai angka 1:08% dengan realisasi keuangan 96,83%. Hal ini menunjukkan bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

PERSENTASE DESA YANG TERHUBUNG DENGAN MODA TRANSPORTASI

- a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.11
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Pesentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi	Persen	94	94	95	100%	101%

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi Pesentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi tahun 2022 sebesar 94% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 94% atau realisasi capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi tahun 2021 sebesar 95% atau realisasi capaian kinerja sebesar 101%, dengan demikian hasil perbandingan tersebut menunjukkan tidak adanya persentase penurunan atau kenaikan capaian kinerja tahun 2022 terhadap capaian tahun 2020 dan adanya persentase penurunan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 1,05% terhadap capaian tahun 2021.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.12
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Pesentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi	Persen	94	85	110%

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan Pesentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi tahun 2022 sebesar 94% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 85%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 110% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Dari tabel-tabel yang telah disajikan diatas, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan dalam kondisi baik dan memadai serta memenuhi standar pelayanan minimal.
2. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kabupaten Malinau serta terjalinnya kerjasama/koordinasi yang baik antar elemen untuk meningkatkan kondisi lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman.

Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi ini bermakna bahwa dari 109 Desa yang ada dalam 15 Wilayah Kecamatan Se-kabupaten Malinau pada Tahun 2020 telah mencapai 94%, bahkan pada tahun 2021 telah mencapai 95% dan kembali mencapai 94% pada tahun 2022 artinya ada sekitar 103 Desa yang sudah terhubung dengan Moda Transportasi baik melalui Udara, Sungai dan Darat.

Disamping itu pengertian lain dari Desa yang terhubung dengan Moda Transportasi ini secara umum juga mencakup Sarana dan Prasarana yang sudah ada maupun akan diadakan yang tercermin pada Dua Program yaitu Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai Aplikasi Perwujudannya.

Oleh karenanya IKU tersebut masih layak untuk diajukan sebagai IKU Dinas Perhubungan dengan harapan pada Tahun 2026 sudah mencapai 100% yang artinya semua Desa di Kabupaten Malinau sudah dapat terhubung dengan Moda Transportasi, tentunya tergantung pada Faktor yang mampu mendukung keberhasilannya atau bahkan dapat terjadi Faktor Penghambat atas capaian kinerja yang diharapkan.

Faktor-faktor yang mendukung Keberhasilan indikator kinerja pesentase desa yang terhubung dengan moda transportasi antara lain adalah:

1. Sumber dana yang memadai
2. SDM yang Profesional.
3. Perencanaan yang matang.

4. Data dan informasi yang valid.
5. Faktor alam yang mendukung.
6. Pelaksanaan yang bertanggung Jawab.
7. Pengawasan (Evaluasi dan Monitoring) yang baik.

Faktor-faktor yang menghambat indikator kinerja persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi adalah:

1. Sumber Dana Belum Memadai
2. SDM yang belum Profesional
3. Perencanaan belum maksimal sering terjadi pergeseran Anggaran
4. Data dan Informasi yang sulit cenderung sering tidak Valid
5. Faktor Alam yang tidak mendukung seperti banjir, Jeram (Giram), Jalan Darat yang terputus dsb.nya.
6. Adanya Sarana Prasarana yang Rusak
7. Pelaksanaan yang belum maksimal dan sering terlambat
8. Pengawasan (Evaluasi dan Monitoring) belum maksimal
9. Pelaporan tidak tepat waktu.

d. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi sebesar Rp. 355.632.100 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.056.828.650 atau capaian realisasi sebesar 33,66% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 98,94%. Capaian realisasi kinerja program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) sangat rendah dikarenakan terbebtur

kewenangan anatar jalan nasional dan jalan kabupaten. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp700.696.550atau sebesar 66,34%.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.14.13
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Pesentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi	98,94	Penyelenggaraan lalulintas dan Angkutan Jalan	33,66%

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program Penyelenggaraan lalulintas dan Angkutan Jalan dengan capaian kinerja mencapai angka 98,94% dengan realisasi keuangan 33,66%. Hal ini menunjukkan bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM

- a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.14
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Pesentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	78,83	78,31	100	99,34%	78,83%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi Pesentase Penduduk Berakses Air Minum tahun 2022 sebesar 78,83% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 78,31% atau realisasi capaian kinerja sebesar 99,34% dan realisasi tahun 2021 sebesar 100% atau realisasi capaian kinerja sebesar 78,83%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 0,66% terhadap capaian tahun 2020 dan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2022 sekitar 21,17% terhadap capaian tahun 2021.

- b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.15
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	78,83%	87%	90,60%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Persentase Penduduk Berakses Air Minum tahun 2022 sebesar 78,83% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 87%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 90,60% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dapat tercapai melalui pencapaian program dan didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2022 capaian dari output kegiatan tersebut. Sasaran Strategis Meningkatnya infrastruktur sumber air minum layak didukung oleh sasaran Program “Persentase rumah tangga yang terlayani SPAM JP” yang diukur dengan menggunakan 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Program.





d. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase penduduk berakses air minum sebesar Rp. 11.822.311.289 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 11.897.625.400 atau capaian realisasi sebesar 99,37%. apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 117,66%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 75.314.111 atau sebesar 0,63%.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya

membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.14.16
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Pesentase Penduduk Berakses Air Minum	117,66%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	99,87%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan capaian kinerja mencapai angka 117,66% dengan realisasi keuangan 99,87%. Hal ini menunjukkan bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

PERSENTASE IRIGASI KABUPATEN YANG BERFUNGSI

- a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.17
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Pesentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi	Persen	23,87	-	-	-	-

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dihitung dikarenakan indikator kinerja persentase irigasi kabupaten yang berfungsi baru dilaksanakan ditahun 2022.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.14.18
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi	Persen	23,87%	36,92%	64,65%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2022 adalah perbandingan realisasi Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi tahun 2022 sebesar 23,67, dengan target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 36,92, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 64,65% terhadap target akhir RPJMD tahun 2022.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Prasarana Sumber Daya Air yang ada di Kabupaten Malinau pada tahun 2022 mampu meningkatkan infrastruktur irigasi sebagai dukungan ketahanan air bagi pertanian. Target Kinerja Irigasi tahun 2022 sebesar 28,01 persen target realisasi mengalami penurunan menjadi 23,87 persen yang disebabkan rendahnya pemeliharaan rutin jaringan irigasi dan rendahnya penanganan jaringan irigasi pada daerah kewenangan kabupaten untuk itu

dibutuhkan sarana pendukung serta kebijakan penganggaran APBD yang lebih proporsional.

1. Tersedianya SDM yang kompeten;
2. Tersedianya anggaran baik itu dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat yakni APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dan APBD Murni;
3. Komitmen dan penekanan pimpinan DPU-PR.PERKIM untuk melakukan strategi percepatan pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing PPK/PPTK;
4. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak stakeholders.

Target Kinerja Irigasi tahun 2022 sebesar 28,01 % target realisasi mengalami penurunan menjadi 23,87% dengan capaian sebesar 85,20% hal ini disebabkan rendahnya pemeliharaan rutin jaringan irigasi dan rendahnya penanganan jaringan irigasi pada daerah kewenangan kabupaten. Berkoordinasi dengan instansi terkait, mengkaji dan menata kembali perencanaan anggaran agar dapat dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Koordinasi baik ditingkat daerah maupun pusat untuk penyediaan anggaran perbaikan dan pembangunan infrastruktur guna mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

d. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja pesentase irigasi kabupaten yang berfungsi sebesar Rp. 4.855.441.599 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 5.074.973.826 atau capaian realisasi sebesar 95,67%. apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 85,20%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 219.532.227 atau sebesar 4,33%.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.14.19
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Pesentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi	85,20%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	95,67%

Sumber : Dinas PUPRPerkim Tahun 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan capaian kinerja mencapai angka 85,20% dengan realisasi keuangan 95,67%. Hal ini menunjukkan bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

14. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisolasian Daerah

Pengukuran sasaran meningkatnya layanan teknologi informasi yang membuka keterisolasian daerah dengan indikator kinerja sasaran persentase desa yang terlayani komunikasi, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran persentase desa yang terlayani komunikasi dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.15
Evaluasi Pencapaian Sasaran 14
Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisolasian Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi	Persen	96,33%	96,33%	100%

Sumber : Dinas Kominfo Tahun 2022

Tahun 2022 pencapaian sasaran meningkatnya layanan teknologi informasi yang membuka keterisolasian daerah dengan indikator kinerja persentase desa yang terlayani telekomunikasi dengan target RPJMD tahun 2021-2026 terkhusus tahun 2022 adalah 96,33%, Realisasi 96,33%, sehingga capaian kinerja untuk tahun 2023 adalah 100%.

- a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.15.1

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Pesentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi	Persen	96,33%	95,41%	95,41%	99,04%	99,04%

Sumber : Dinas Kominfo Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi Pesentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi tahun 2022 sebesar 96,33% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 95,41% atau realisasi capaian kinerja sebesar 99,04% dan realisasi tahun 2021 sebesar 95,41% atau realisasi capaian kinerja sebesar 99,04%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 0,96.% terhadap capaian tahun 2020 dan 2021.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.15.2

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Pesentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi	Persen	96,33%	100%	96,33%

Sumber : Dinas Kominfo Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi persentase desa yang terlayani telekomunikasi tahun 2022 sebesar 96,33% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 96,33% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Target RPJMD tahun 2022 untuk sasaran strategis meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan dengan indikator kinerja persentase desa yang terjangkau komunikasi yang dibebankan pada Dinas Kominfo dengan target 100% dan hasil realisasinya pada tahun 2021 adalah 95,41% dan capaian kinerja 95,41%, yakni tidak tercapai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase desa yang terjangkau komunikasi yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah desa yang terjangkau komunikasi}}{\text{jumlah keseluruhan desa}} \times 100$$

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Pada tahun 2021 untuk meningkatkan persentase desa yang terjangkau komunikasi, Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan target 98,1% dan realisasi 95,41% sehingga capaian kinerja 97,25%, yakni tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya realisasi dari target yang telah ditentukan yaitu:

1. Belum terealisasinya jaringan komunikasi di daerah (desa) tersebut;
2. Infrastruktur jaringan komunikasi seluler belum tersedia, baik yang dikerjakan oleh pusat, provinsi maupun daerah.
3. Kondisi wilayah/desa yang sangat terpencil dengan jumlah penduduk dan juga sangat sedikit.

Disamping beberapa kendala diatas yang mempengaruhi realisasi yang tidak memenuhi target yang ditetapkan tetapi adanya keseriusan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam bekerja dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan yaitu mempercepat pembangunan prasarana dan sarana komunikasi dan informasi serta melakukan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Provider terkait.

Tabel 3.15.3

Kondisi Akses Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Malinau

NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
1	Mentarang				
		1	Pulau Sapi	4G	Telkomsel (Swasta)
		2	Long Gafid	Sinyal Telkomsel dari Desa Pulau Sapi	
		3	Long Bisai		
		4	Temalang		
		5	Long Liku		
		6	Lidung Kemenci		
		7	Mentarang Baru		
		8	Paking	4G	Telkomsel
		9	Harapan Maju	Sinyal Telkomsel dari Desa Paking	
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
2	Malinau Kota				
		1	Batu Lidung	3G	Telkomsel, IM3
		2	Malinau Kota	4G	Telkomsel, IM3
		3	Pelita Kanaan	4G	Telkomsel, IM3
		4	Malinau Hulu	4G	Telkomsel, IM3
		5	Malinau Hilir	4G	Telkomsel, IM3
		6	Tanjung Keranjang	3G	Telkomsel, IM3
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
3	Malinau Utara				
		1	Kaliamok	4G	Telkomsel, IM3
		2	Luso	Eg	Telkomsel
		3	Malinau Seberang	4G	Telkomsel, IM3
		4	Putat	Eg	Telkomsel



		5	Salap	Eg	Telkomsel
		6	Seruyung	Blankspot	
		7	Respen Tubu	Eg	Telkomsel, IM3
		8	Belayan	Eg	Telkomsel
		9	Sembuak Warod	Eg	Telkomsel
		10	Lubak Manis	4G	Telkomsel, IM3
		11	Kelapis	3G	Telkomsel
		12	Semengaris	4G	Telkomsel, IM3
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
4	Malinau Barat				
		1	Long Bila	Sinyal Telkomsel dari Desa Setulang	
		2	Long Kenipe		
		3	Sentaban		
		4	Punan Bengalun	4G	Telkomsel
		5	Sesua	Eg	Indosat
		6	Tanjung Lapang	4G	Telkomsel, IM3
		7	Taras	4G	Telkomsel
		8	Kuala Lapang	4G	Telkomsel, IM3
		9	Sempayang	3G	Telkomsel
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
5	Malinau Selatan				
		1	Bila Bekayuk	4G	Indosat
		2	Long Loreh	Eg	Telkomsel
		3	Langap	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Loreh	
		4	Laban Nyarit	Blankspot	
		5	Nunuk Tanah Kibang	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Loreh	
		6	Pelencau	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Loreh	
		7	Paya Seturan	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Loreh	
		8	Punan Rian	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Loreh	
		9	Sengayan	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Loreh	
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
6	Malinau Selatan Hilir				
		1	Setulang	4G	Telkomsel



		2	Setarap	2G	Telkomsel
		3	Punan Setarap	Sinyal Telkomsel dari Desa Setarap	
		4	Batu Kajang	4g	Indosat
		5	Gong Solok	4g	Indosat
		6	Punan Gong Solok	4g	Indosat
		7	Long Adiu	4g	Indosat
		8	Punan Long Adiu	4g	Indosat
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
7	Malinau Selatan Hulu				
		1	Long Lake	Blankspot	
		2	Punan Mirau	4G	Indosat
		3	Long Rat	Blankspot	
		4	Halanga	Blankspot	
		5	Metut	4G	Indosat
		6	Long Jalan	4G	Indosat
		7	Nahakramo	Blankspot	
		8	Tanjung Nanga	4G	Telkomsel
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
8	Mentarang Hulu				
		1	Lung Fala	4G	Telkomsel
		2	Lung Kebinu	4G	Indosat
		3	Lung Mekatip	4G	Indosat
		4	Lung Simau	4G	Indosat
		5	Lung Barang	Eg	Telkomsel
		6	Lung Sulit	4G	Indosat
		7	Lung Semamu	4G	Indosat
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
9	Sungai Tubu				
		1	Long Nyau	4G	Indosat
		2	Long Titi	4G	Indosat
		3	Long Ranau	4G	Indosat
		4	Rian Tubu	4G	Indosat
		5	Long Pada	4G	Telkomsel
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
10	Pujungan				
		1	Long Pujungan	Eg	Telkomsel



		2	Long Ketaman	4G	Telkomsel
		3	Long Pua	4G	Telkomsel
		4	Long Aran	4G	Telkomsel
		5	Long Lame	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Aran	
		6	Long Jelet	4G	Telkomsel
		7	Long Paliran	4G	Telkomsel
		8	Long Bena	4G	Telkomsel
		9	Long Belaka Pitau	4G	Telkomsel
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
11	Kayan Hilir				
		1	Data Dian	Eg	Telkomsel
		2	Long Pipa	4G	Telkomsel
		3	Long Sule	2G	Telkomsel
		4	Sungai Anai	4G	Telkomsel
		5	Long Metun	4G	Telkomsel
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
12	Kayan Hulu				
		1	Long Nawang	Eg	Telkomsel
		2	Nawang Baru	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Nawang	
		3	Long Temuyat		
		4	Long Betaoh	4G	Telkomsel
		5	Long Payau	4G	Telkomsel
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
13	Sungai Boh				
		1	Mahak Baru	Eg	Telkomsel (Swasta)
		2	Dumu Mahak	Sinyal Telkomsel dari Desa Mahak Baru	
		3	Long Lebusan	4G	Indosat & Telkomsel
		4	Long Top	4G	Indosat
		5	Agung Baru	2G	Telkomsel
		6	Data Baru	Sinyal Telkomsel dari Desa Mahak Baru	
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
14	Kayan Selatan				
		1	Long Ampung	Eg	Telkomsel

					(Pemda)
		2	Long Uro	4G	Indosat
		3	Lidung Payau	4G	Telkomsel
		4	Sungai Barang	4G	Telkomsel
		5	Metulang	Sinyal Telkomsel dari Desa Long Ampung	
NK	Kecamatan	ND	Desa	Sinyal Selular	
				Kelas	Penyedia
15	Bahau Hulu				
		1	Long Uli	4G	Indosat
		2	Long Alango	Eg	Telkomsel (Pemda)
		3	Long Berini	4G	Telkomsel
		4	Long Tebulo	4G	Indosat
		5	Apau Ping	4G	Telkomsel
		6	Long Kemuat	4G	Indosat

Sumber : Dinas Kominfo Tahun 2022

d. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase desa yang terlayani telekomunikasi sebesar Rp. 2.205.213.208 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 2.530.000.035 atau capaian realisasi sebesar 91,52%. apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 324.786.827 atau sebesar 8.48%.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.15.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Layanan Teknologi Yang Membuka Keterisolasian Daerah	Pesentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi	100%	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	96,18%
			Program Aplikasi Informatika	86,87%

Sumber : Dinas Kominfo Tahun 2022

Dari tabel 3.15.4 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Hasil capaian kinerja dan realisasi capain keuangan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program-program yang mendukung indikator kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Tujuan 2: Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup

15. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lahan, Air, dan Udara

Pengukuran sasaran **Meningkatnya Kualitas Lahan, Air, dan Udara** dengan indikator kinerja sasaran indeks kualitas tutupan lahan, indeks kualitas air dan indeks kualitas udara dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran indeks kualitas tutupan lahan, indeks kualitas air dan indeks kualitas udara dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.16
Evaluasi Pencapaian Sasaran 15
Meningkatnya Kualitas Lahan, Air, dan Udara

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100)	Poin	100	100	100%
Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)	Poin	53,65	62,38	116,27%
Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100)	Poin	91,25	95,20	104,33%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2022

Hasil pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lahan, air dan udara dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100) dengan target RPJMD 2022 adalah 100 poin, realisasi 100 poin dan capaian 100%. Untuk indikator kinerja indeks kualitas air dengan target RPJMD tahun 2022 dengan 53,65 poin, realisasi 62,38 poin dan capaian kinerja 116,27% sedangkan indikator kinerja indeks kualitas udara dengan target tahun 2022 sebesar 91,25 poin, realisasi 95,20 poin dan capaian kinerja 104,33%

INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN

- a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.16.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100)	Poin	100	100	100	100%	100%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100) tahun 2022 sebesar 100 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 100 atau realisasi capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi tahun 2021 sebesar 100 atau realisasi capaian kinerja sebesar 100%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan nilainya cenderung stabil dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100 poin dengan tahun-tahun sebelumnya.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.16.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100)	Poin	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100) tahun 2022 sebesar 100 dengan target akhir RPJMD tahun 2026

sebesar 100, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 100% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Perbandingan Realisasi Kerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan standar nasional dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.16.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100)	Poin	100	63,5	157,48

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2022

Adapun target nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Tahun 2022 untuk Indeks Kualitas Lahan/Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 63,5 poin sehingga capaian untuk indeks kualitas tutupan lahan tahun 2022 dengan standar nasional mencapai 157,48 persen.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Adapun rumus perhitungan indeks kualitas tutupan lahan adalah :

$$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

Berdasarkan informasi dari Direktorat Kerusakan Pemulihan Lahan Akses Terbuka, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2018, diperoleh data sebagai berikut :

- Luas wilayah (LW) = 4031167,6569

- Luas Hutan (LH) = 3833081,1211
- Luas Belukar Dalam Kawasan (LBDK) = 50712,8983
- Luas Belukar Luar Kawasan (LBLK) = 27062,8957

Dengan menggunakan rumus perhitungan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) diatas, maka nilai IKTL Tahun 2022 adalah :

$$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$\text{Tutupan Lahan (TL)} = \frac{(LH + ((LBDK + LBLK) \times 0,6))}{LW}$$

$$TL = \frac{(3833081,1211 + ((50712,8983 + 27062,8957) \times 0,6))}{4031167,6569}$$

$$TL = 0,96$$

Nilai IKTL Tahun 2022 adalah :

$$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$IKTL = 100 - \left((84,3 - (0,96 \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

$$IKTL = 110,77 \text{ atau } 100,00$$

Dari hasil perhitungan diatas, maka diperoleh nilai indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) pada tahun 2022 adalah sebesar 100,00 (poin) dari target 100,00 (poin) atau 100,00%. Dengan demikian, karena persentase capaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 80-100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan Baik.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal dari poin-poin yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa capaian kinerja secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil dengan besaran capaian akuntabilitas kinerja dengan kategori Sangat Baik. Dalam proses pencapaian keberhasilan pencapaian target tersebut terdapat hal-hal yang mempengaruhi, diantaranya adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Capaian kinerja pada indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) terhadap target yang tersusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang selaras dengan RPJMD Tahun 2022 sebesar 100 poin terealisasi sebesar

100,00 poin dan capaian kinerja 100% termasuk dalam pencapaian akuntabilitas kinerja dengan kategori Baik.

Tercapainya target pada indikator komponen Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diatas merupakan suatu capaian yang menunjukkan keberhasilan atas berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator-indikator tersebut meliputi :

➤ Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan Tahun 2022, dapat direspon sebesar 100% tertangani. Total jumlah pengaduan di Tahun 2022 sebanyak 1 (satu) pengaduan dan semua pengaduan dapat ditangani.

➤ Penertiban atau penegakan hukum lingkungan yang dilaksanakan dapat mendorong kepada pelaku usaha/kegiatan/perusahaan untuk taat terhadap peraturan yang berlaku. Sehingga, dengan adanya kesadaran kepada pelaku usaha/kegiatan/perusahaan dapat meminimalisir pencemaran baik terhadap kualitas air maupun udara.

Ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Berikut ini adalah beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

- Minimnya anggaran program dan kegiatan yang mendukung untuk pencapaian komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, dan IKL/IKTL).
- Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan yang menyeluruh terhadap semua kegiatan dan/atau usaha yang ada di wilayah Kabupaten Malinau, dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

e. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja indeks kualitas tutupan lahan sebesar Rp. 793.158.500 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 6.700.000.000 atau capaian realisasi sebesar 11,84%. apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.5.906.841.500 atau sebesar 88,16%.

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.16.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0-100)	100%	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	11,84%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program pengelolaan keanekaragaman hayati dengan capaian kinerja mencapai 100% dengan realisasi keuangan 11,84%. Hal ini menunjukkan bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

INDEKS KUALITAS AIR

- a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.16.5

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)	Poin	62,38	50	50	80,15	80,15

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100) tahun 2022 dan 2021 dan realisasi tahun 2021 sebesar 62,38 atau realisasi capaian kinerja sebesar 80,15%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 24,76% terhadap capaian tahun 2020 dan 2021.

- b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.16.6

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)	Poin	62,38	54,05	115,41%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2022

Pada tabel 3.15.6 di atas, target akhir RPJMD dengan indikator indeks kualitas air (IKA) adalah 54,05 poin. Nilai target Indeks Kualitas Air (IKA) di wilayah kabupaten/kota pada Tahun 2022 disesuaikan dengan realisasi 62,38 poin. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai persentase capaian terhadap target RPJMD akhir tahun sebesar 115,41%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan Sangat Baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk indikator Indeks Kualitas Air telah tercapai, bahkan melebihi target yang dicantumkan pada target RPJMD Tahun 2021-2026.

c. Perbandingan Realisasi Kerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Berdasarkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.16.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)	Poin	62,38	55,3	112,80

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2022

Pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019-2024 terdapat indikator komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Adapun target nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Tahun 2022 untuk Indeks Kualitas Air adalah 55,3 poin atau 112,80% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 62,38 poin. Sehingga dari tabel di atas dapat disimpulkan

bahwa pencapaian target indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau untuk Indeks Kualitas Air (IKA) telah mencapai atau bahkan melebihi target nasional dengan capaian sebagaimana tersebut di atas. Hal ini dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja Indeks Kualitas Air, berada pada kategori Sangat Baik.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kualitas Air merupakan suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. IKA merupakan nilai tunggal terhadap kualitas air yang diperoleh dari integrasi beberapa parameter penyusunnya pada waktu dan lokasi tertentu. Semakin tinggi nilai IKA maka semakin baik kualitas air tersebut. Acuan yang digunakan untuk menghitung IKA adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air Menteri Negara Lingkungan Hidup. Untuk menghitung IKA dilakukan dengan menggunakan metode STORET (Secara prinsip metoda STORET adalah membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya guna menentukan status mutu air) dan Indeks Pencemaran (*Indeks Pencemaran (Pollution Index)*) yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan (Nemerow, 1974). Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Pencemaran.

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2 M + (C_i / L_{ij})^2 A}{2}}$$

Hasil pengujian kualitas air pada 7 titik pantau air sungai yaitu (1) air Sungai Sesayap Desa Kuala Lapang, (2) air Sungai Sesayap Desa Long Uji, (3) air Sungai Sesayap Desa Sembuak, (4) air Sungai Sesayap Desa Pulau Sapi, (5) air Sungai Sesayap Intake PDAM Kuala Lapang, (6) air Sungai Sesayap Intake PDAM Malinau Kota, (7) air Sungai Sesayap Seturan selama 3 periode pengambilan sampel, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 21 sampel Air Sungai yang dilakukan pada Tahun 2022 menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 3.16.8

Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Air

Mutu AIR	Jumlah Titik Sampel Yang Memenuhi mutu Air	Persentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks Per Mutu Air
Memenuhi	13	62%	70	43.33
Cemar Ringan	8	38%	50	19.05
Cemar Sedang	0	0%	30	0.00
cemar Berat	0	0%	10	0.00
Total	21	100%		62.38
Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)				62,38

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2022

Berdasarkan tabel Nilai Indeks Kualitas Air tersebut di atas, diketahui bahwa pada Tahun 2022 nilai Indeks Kualitas Air mencapai 62,38 (poin) dari target yang ditentukan sebesar 53,65 (poin) atau capaian kinerja 116,27%. Karena persentase capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) >100, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan Sangat Baik.

Capaian kinerja pada indikator Indeks Kualitas Air (IKA) terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang selaras dengan RPJMD Tahun 2022 sebesar 53,65 poin terealisasi sebesar 62,38 poin atau 116,27% termasuk dalam pencapaian akuntabilitas kinerja dengan kategori Sangat Baik. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator-indikator tersebut adalah dengan cara Melakukan Pemantauan Kualitas Air. Sebagai dasar untuk penyediaan data kualitas air yang akan digunakan untuk penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang merupakan komponen dalam penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas air sesuai petunjuk teknis pemantauan yang tercantum dalam peraturan perundangan-undangan yaitu:

- Pemantauan dilaksanakan pada 8 (delapan) titik pantau yang secara umum terdiri dari sungai dan anak-anak sungai yang ada di wilayah Kabupaten Malinau yang menjadi prioritas dengan berbagai

pertimbangan diantaranya Sungai dan anak-anak sungai Malinau, sungai yang mengalir dari wilayah administrasi lain, sungai yang menjadi badan air pembuangan limbah usaha/kegiatan, serta sungai yang menjadi prioritas untuk kegiatan pengendalian pencemaran air lainnya. Kedelapan titik sampel yang diambil untuk dilakukan pengujian meliputi Air Sungai Sesayap Intake PDAM Malinau, Air Sungai Sesayap Pelabuhan Lama, Air Sungai Sembuak Jembatan Desa Luso, Air Sungai Sembuak Hilir RSUD, Air Sungai Malinau Intake PDAM Desa Tanjung Nanga, Air Sungai Malinau Intake PDAM Lama Desa Pulau Sapi, Air Sungai Mentarang Desa Pulau Sapi RT 4, dan Air Sungai Bengalun Jetty PT. BDMS.

- Kegiatan pemantauan hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun dan diharapkan dapat mewakili kondisi musim penghujan, musim peralihan dan musim kemarau. Hal ini lebih sedikit (kurang) dari periode pemantauan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu 2 (dua) kali dalam setahun.
- Kegiatan pengujian kualitas air dilaksanakan bekerja sama dengan Laboratorium yang telah terakreditasi yang dalam hal ini dilakukan oleh Laboratorium Balai Riset & Standardisasi Industri (Baristand Industri) Samarinda yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang berlokasi di Jl. M.T. Haryono, Jl. Banggeris Nomor 1 Samarinda, Kalimantan Timur Indonesia-75124; Email: BaristandSamarinda; Telp. 0541-7771364; Fax. 0541-745431.

Diharapkan melalui kegiatan pemantauan kualitas air ini didapatkan data kualitas air yang valid yang akan digunakan sebagai basis data penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA).

Pada Tahun 2022, DLH melaksanakan penghitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sesuai dengan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh KLHK terkait penghitungan Nilai IKLH, dengan beberapa pertimbangan teknis lainnya. Pertimbangan teknis lainnya yang dimaksud adalah terkait dengan jumlah titik lokasi yang digunakan untuk penghitungan nilai IKA. Jumlah titik lokasi yang digunakan sebagai dasar penghitungan IKA adalah 8 (delapan) titik pantau lokasi yang dipantau dengan kriteria sebagai berikut :

- ✓ Sungai Malinau yang terletak di wilayah hulu dan hilir yang berdampak akibat adanya kegiatan usaha dan/atau kegiatan.
- ✓ Sungai yang sumber airnya berada di wilayah Kabupaten Malinau dan melintas hanya di wilayah Kabupaten Malinau.

Dalam hal ini, anak-anak sungai yang mengalir dari wilayah administrasi lain dan berbatasan dengan Kabupaten Malinau tidak diikuti dalam penghitungan IKA. Hal ini dilakukan agar nilai IKA yang didapatkan dapat merepresentasikan kondisi kualitas air di wilayah Kabupaten Malinau dan tidak dipengaruhi oleh kondisi kualitas air dari sungai di wilayah administrasi lain yang secara langsung tidak dapat dikontrol kualitasnya oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Data Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2022 (data terlampir).

Ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Air antara lain :

- Minimnya anggaran program dan kegiatan yang mendukung untuk pencapaian komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, dan IKL/IKTL), terutama indeks kualitas air (IKA).
- Minimnya sumber daya aparatur yang cakap, profesional dan terakreditasi untuk melakukan pengambilan sampel dan uji air sehingga hal ini masih diantisipasi dengan melakukan kerjasama dengan Baristand Samarinda untuk melakukan uji dan pengambilan sampel air.
- Belum optimalnya pengelolaan UPTD laboratorium lingkungan sehingga sampai saat ini laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau belum dapat berjalan dengan baik.

e. Analisis Atas Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja indeks kualitas air sebesar Rp. 309.386.700 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 800.000.000,00 atau capaian realisasi sebesar 38,67% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 116,27%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.490.613.300 atau sebesar 61,33%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.16.9
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara	Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0-100)	116,27%	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	38,67%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja mencapai angka 116,27% dengan realisasi keuangan 38,67%. Hal ini menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

INDEKS KUALITAS UDARA

- a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.16.10
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100)	Poin	95,20	93,98	96,21	98,71%	101,06%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100) tahun 2022 sebesar 95,20 poin dengan realisasi tahun 2020 sebesar 93,98 poin atau realisasi capaian kinerja sebesar 98,71% dan realisasi tahun 2021 sebesar 96,21 poin atau realisasi capaian kinerja sebesar 101,06%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 1,3% terhadap capaian tahun 2020 dan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2022 sebesar -1,04% terhadap capaian tahun 2021.

- b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.16.11
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100)	Poin	95,20	91,68	103,83%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2022 adalah perbandingan realisasi Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100) tahun 2022 sebesar 95,20 poin dengan target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar 91,68 poin, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 103,83% terhadap target akhir RPJMD tahun 2022.

c. Perbandingan Realisasi Kerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Berdasarkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.16.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100)	Poin	95,20	84,3	112,66%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2022

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Metodologi perhitungan indeks kualitas udara mengadopsi program Uni Eropa melalui *European Regional Development Fund* pada *Regional Initiative Project*, yaitu “*Common Informatiob to European Air*” (*Citeair II*) dengan judul *CAQI Air Quality Index : Comparing Urban Air Quality Actross Borders – 2012. Common Air Quality Index (CAQI)* ini digunakan sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata per jam, harian, dan

tahunan. Sehubungan dengan baku mutu udara Indonesia masih mengacu pada PP 41/1999 yang bersifat longgar, maka dalam perhitungan indeks mengadopsi Direktif EU (*EU Directives*) sebagai berikut :

<i>nt</i>	<i>Polluta</i>	<i>Target Value/Limit Value</i>
daily	NO ₂	Year Average (40 µm/m ³)
	PM ₁₀	Year Average (40 µm/m ³)
	PM ₁₀	Number of daily averages above 40 µm/m ³ is 35 days
	Ozone	25 days with an 8-hour average value ≥ 120 µm/m ³
	PM _{2,5}	Year Average (20 µm/m ³)
	SO ₂	Year Average (20 µm/m ³)
	Benzen	Year Average (5 µm/m ³)
	CO	-

Indeks kualitas Udara dihitung dengan menggunakan rumus :

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$$

Sedangkan untuk nilai *I_{eu}* didapat dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} - I_{EU} \text{ NO}_2 &= \frac{\text{NO}_2 \text{ rata - rata}}{40} \\ - I_{EU} \text{ SO}_2 &= \frac{\text{SO}_2 \text{ rata - rata}}{20} \\ - I_{EU} &= \frac{I_{EU} \text{ NO}_2 + I_{EU} \text{ SO}_2}{2} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler* Kabupaten Malinau Tahun 2022 oleh Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan laman website: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login> yang dilakukan pada 4 lokasi (transportasi: Bandara R.A. Bessing Malinau, industri: Industri/Agro Industri SD Kelapis, pemukiman Taman Jajok, dan perkantoran Kantor Bupati Malinau Jl. Pusat Pemerintahan) selama 14 hari pemantauan menunjukkan NO₂ rata-rata 4,95 dan SO₂ rata-rata 4,98 sehingga perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara adalah :

$$\begin{aligned} I_{EU} \text{ NO}_2 &= \frac{\text{NO}_2 \text{ rata - rata}}{40} \\ I_{EU} \text{ NO}_2 &= \frac{\text{NO}_2 \text{ rata - rata}}{40} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{4,95}{40} &= \frac{4,98}{20} \\ &= 0,12 &= 0,25 \\ I_{EU} &= \frac{I_{EU} \text{NO}_2 + I_{EU} \text{SO}_2}{2} \\ &= \frac{0,12 + 0,25}{2} \\ &= 0,19 \\ IKU &= 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right) \\ &= 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (0,19 - 0,1) \right) \\ &= 95,20 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas, maka diperoleh nilai indeks kualitas udara (IKU) pada tahun 2022 adalah sebesar 95,20 (poin) dari target 91,25 (poin) atau 104,33%. Dengan demikian, karena persentase capaian kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) >100, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan Sangat Baik.

Capaian kinerja pada indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) terhadap target yang tersusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang selaras dengan RKPD Tahun 2022 sebesar 91,25 poin terealisasi sebesar 95,20 poin atau 104,33% termasuk dalam pencapaian akuntabilitas kinerja dengan kategori Sangat Baik.

Tercapainya target pada beberapa indikator komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, dan IKL/IKTL) dan Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota diatas merupakan suatu capaian yang menunjukkan keberhasilan atas berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator-indikator tersebut meliputi:

- Pemantauan Kualitas Udara

Pemantauan mutu udara ambien merupakan salah satu upaya untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan program pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hasil pemantauan mutu udara ambien dapat dijadikan indikator untuk menentukan prioritas program pengendalian

pencemaran udara yang perlu dilakukan. Saat ini, metode pemantauan mutu udara ambien yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara yaitu melalui metode otomatis kontinyu (AQMS) dan manual (*passive sampler*).

Menurut SOP Pelaksanaan Pemantauan SO₂ dan NO₂ di udara ambien Tahun 2011, metode *passive sampler* adalah suatu metode yang menggunakan sistem penyerapan gas secara difusi melalui media yang dipaparkan dalam waktu tertentu tanpa menggunakan pompa penghisap dengan memanfaatkan sifat fisis gas yang berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah.

Data kualitas udara merupakan data hasil pengukuran langsung yang mewakili area padat kendaraan (transportasi), area pemukiman, area perkantoran dan area industri pada 427 Kabupaten/Kota yang ada di 34 Provinsi. Pemilihan 4 lokasi yang mewakili 4 jenis aktivitas pada setiap Kabupaten/Kota tidak boleh berada dalam 1 lokasi yang sama, namun minimal berjarak 1 kilometer dari titik satu ke titik lainnya.

Pemilihan 4 lokasi tersebut adalah :

a) Transportasi

Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor terhadap kualitas udara di sekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya. Jarak titik pengambilan sampel kurang lebih 5-10 meter dari bahu jalan.

b) Pemukiman

Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan di sekitar pemukiman padat.

c) Perkantoran/pasar/komersil

Lokasi di daerah perkantoran/pasar/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/pasar/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/komersil.

d) Perkantoran/pasar/komersial

Lokasi di daerah perkantoran/pasar/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/komersil.

Pengukuran dilakukan secara otomatis dan atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata-rata tahunan. Parameter yang dipantau adalah NO₂ dan SO₂ dengan durasi pemantauan dalam setahun adalah sebagai berikut :

- a) Passive sampler: minimal 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali),
- b) Manual aktif: minimal 24 hari per tahun (2 kali per bulan @24 jam),
- c) AQMS fixed station: minimal 65% data (238 data harian per tahun),
- d) AQMS mobile station: minimal 20 data harian per bulan (240 data harian per tahun).

Untuk melihat Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2022, maka dapat dilihat pada tabel perhitungan Indeks Kualitas Udara (data terlampir).

- **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan**
Efektifnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan berupa perusahaan tambang batubara, berpengaruh terhadap nilai IKU. jika perusahaan penghasil emisi sumber tidak bergerak melakukan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dapat meminimalisir pencemaran pada udara.
- **Penanganan Pengaduan**
Penanganan pengaduan Tahun 2022, dapat direspon sebesar 100% tertangani. Total jumlah pengaduan di Tahun 2022 sebanyak 1 (satu) pengaduan dan semua pengaduan dapat ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- **Penertiban atau penegakan hukum**
Penertiban atau penegakan hukum lingkungan yang dilaksanakan dapat mendorong kepada pelaku usaha/kegiatan/perusahaan untuk taat terhadap peraturan yang berlaku. Sehingga, dengan adanya kesadaran kepada pelaku usaha/kegiatan/perusahaan dapat meminimalisir pencemaran baik terhadap kualitas udara.

Ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian nilai Indeks Kualitas Udara antara lain :

- Minimnya anggaran program dan kegiatan yang mendukung untuk pencapaian komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, dan IKL/IKTL), terutama indeks kualitas Udara (IKU).
- Minimnya sumber daya aparatur yang cakap, profesional dan terakreditasi untuk melakukan pengambilan sampel dan uji Udara sehingga hal ini masih diantisipasi dengan melakukan kerjasama dengan Baristand Samarinda untuk melakukan uji dan pengambilan sampel Udara.
- Belum optimalnya pengelolaan UPTD laboratorium lingkungan sehingga sampai saat ini laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau belum dapat berjalan dengan baik.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Selain upaya yang telah dipaparkan di atas, adapun dilakukan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan Kualitas air dan Udara. Salah satu inovasi yang dilakukan salah satunya adalah pembentukan Satgas Pengawas Pos Pantau yang ditempatkan di titik-titik sungai yang berdekatan dengan aktivitas perusahaan atau pertambangan batubara. Satgas ini terdiri dari 15 orang yang bertugas melakukan pemantauan secara rutin terhadap aktivitas pengelolaan limbah cair perusahaan tambang batubara agar sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan limbah batubara yang tertuang dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

e. Analisis Atas Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja indeks kualitas udara sebesar Rp. 264.617.000 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 350.695.069 atau capaian realisasi sebesar 75,45%. apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 104,33%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.86.078.069 atau sebesar 24,55%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.16.13
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIA KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara	Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0-100)	104,33%	Program PengendalianPencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	75,45%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh Program PengendalianPencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja mencapai angka 104,33% dengan realisasi keuangan 75,45%. Hal ini menunjukkan bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Tujuan 1: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik (Good Governance)

16. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Pengukuran Tujuan Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik (*Good Governance*) secara luas melalui Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Indikator kinerja sasaran Nilai SAKIP dan Nilai LPPD, Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran nilai SAKIP dan nilai LPPD dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.17
Evaluasi Pencapaian Sasaran 16
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Nilai SAKIP	Nilai	64,20	60,02	93,48%
Nilai LPPD	Nilai	2,930	-	-

Sumber : Bagian Organisasi dan Tapem Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2022

NILAI SAKIP

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi AKIP tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia, bahwa Pemerintah Kabupaten Malinau memperoleh nilai SAKIP tahun 2022 adalah 60,02 atau Predikat B.

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.17.1

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Nilai SAKIP	Nilai	60,02	56,32	57,14	93,83%	95,20%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi Nilai SAKIP tahun 2022 sebesar 60,02 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 56,32 atau realisasi capaian kinerja sebesar 93,83% dan realisasi tahun 2021 sebesar 57,14 atau realisasi capaian kinerja sebesar 95,20%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 6,56% terhadap capaian tahun 2020 dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 5,04% terhadap capaian tahun 2021.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.17.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Nilai SAKIP	Nilai	60,02	75,25	79,76

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan Nilai SAKIP tahun 2022 sebesar 60,02 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 75,25, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 persentase capaian nilai SAKIP sebesar 79,76% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan tujuan mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result orientid government*). Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau menunjukkan bahwa nilai sebesar 60,02 dengan predikat B. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik” yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Berikut disajikan rincian hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Malinau Tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

- Nilai **Perencanaan Kinerja** pada SAKIP Kabupaten Malinau tahun 2022 adalah 22,69, dimana belum memenuhi bobot penilaian yaitu 30%.
- Nilai **Pengukuran Kinerja** pada SAKIP Kabupaten Malinau tahun 2022 adalah 15,94, dimana belum memenuhi bobot penilaian yaitu 30%.

- Nilai **Pelaporan Kinerja** pada SAKIP Kabupaten Malinau tahun 2022 adalah 9,94, dimana belum memenuhi bobot penilaian yaitu 15%.
- Nilai **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** pada SAKIP Kabupaten Malinau tahun 2022 adalah 11,45 dimana belum memenuhi standar bobot penilaian yaitu 25%.

Tabel 3.17.3
Capaian Kinerja SAKIP Kabupaten Malinau Tahun 2022

KOMPONEN YANG DI NILAI	BOBOT	NILAI 2021
A. Perencanaan Kinerja	30%	22,69
B. Pengukuran Kinerja	30%	15,94
C. Pelaporan Kinerja	15%	9,94
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	11,45
Nilai Hasil Evaluasi	100%	60,02
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : Kemenpan RB Tahun 2022

Tahun 2022 penilaian evaluasi SAKIP Kabupaten Malinau mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, namun perlu adanya komponen-komponen yang perlu diperbaiki kedepan yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Pada perencanaan kinerja masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja yaitu Dokumen RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yang masih terdapat sasaran strategi yang belum sepenuhnya berorientasi *outcome*, indikator yang belum memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur sasaran, serta penentuan target kinerja yang belum sepenuhnya baik. Rumusan sasaran strategis Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya berorientasi *outcome*. Pohon kinerja yang disusun cenderung mengakomodir tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ada sebagai *ultimate outcome* dan *Critical Success Factor* (CSF) sehingga belum dapat mengoreksi dokumen perencanaan ataupun memberikan alternatif-alternatif kinerja lain dalam upaya untuk mencapai kinerja utama daerah.

2. Pengukuran Kinerja

Masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu belum adanya pedoman terkait mekanisme pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sebagai acuan dalam melakukan proses pengukuran kinerja baik di level pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah dan juga pelaksanaan pengukuran kinerja belum memanfaatkan aplikasi monitoring dan evaluasi yang memudahkan pimpinan dalam memantau progres capaian kinerja pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

3. Pelaporan kinerja

Pada pelaporan kinerja perangkat daerah belum menyajikan analisis secara spesifik dan mendalam terkait faktor-faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja, laporan kinerja perangkat daerah belum cukup menyampaikan informasi yang memadai tentang analisis efisiensi pengguna sumber daya dan dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.

4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Catatan yang disampaikan dalam LHE AKIP internal kurang spesifik dan belum terfokus untuk mengkritisi aspek kualitas dan pemanfaatan setiap komponen SAKIP dan juga evaluasi SAKIP yang dilakukan belum mengacu pada peraturan Menteri PANRB No.88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pada Tahun 2022 Nilai SAKIP Kabupaten Malinau belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan melihat beberapa hasil rekomendasi AKIP yang disampaikan oleh Kemenpan RB melalui surat Kemenpan perihal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022. Berikut beberapa hasil rekomendasi AKIP yang disampaikan oleh Kemenpan RB melalui surat Kemenpan RB, perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 ialah sebagai berikut :

- 1) Memaksimalkan/memanfaatkan momentum reviu dan perubahan RPJMD untuk memperbaiki kualitas beberapa sasaran strategis agar berorientasi pada *outcome*, memastikan seluruh indikator kinerja telah SMART dan cukup mengukur sasaran strategis dan meninjau kembali



penentuan target kinerja dari setiap indikator khususnya memastikan bahwa target kinerja progresif/meningkat setiap tahunnya dan menginterpretasikan sebuah kondisi yang baik;

- 2) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan PD untuk memastikan sasaran strategis berorientasi pada outcome dan indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART dan cukup mengukur sasaran strategis;
- 3) Mendorong seluruh Perangkat Daerah menyusun dan memperbaiki kualitas pohon kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Menyusun pedoman pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja berkala oleh setiap Perangkat Daerah;
- 5) Membangun aplikasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk mempermudah dan mengefektifkan proses pemantauan progres capaian kinerja level Pemda maupun Perangkat Daerah;
- 6) Meriviu dan memperbaiki kualitas dokumen laporan kinerja baik Perangkat Daerah diantaranya dengan menyajikan perbandingan data realisasi kinerja terhadap target kinerja akhir periode renstra. Selanjutnya menyajikan analisis faktor-faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara mendalam dan spesifik sehingga dapat dijadikan dapat dijadikan dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut atau solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai upaya untuk mencapai atau meningkatkan capaian kinerja di tahun selanjutnya;
- 7) Menyusun pedoman evaluasi AKIP internal yang sifatnya lebih teknis yang mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB No 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Internal Instansi Pemerintah, kemudian memanfaatkannya sebagai panduan dalam melakukan evaluasi AKIP seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
- 8) Meningkatkan kualitas evaluasi AKIP internal diantaranya dengan memperluas/memperbanyak data/dokumen yang dievaluasi,

mempertajam dan memperdalam analisis penilaian serta secara berkelanjutan dan melakukan peningkatan kompetensi para evaluator sehingga diharapkan simpulan akhir atas hasil penialain setiap PD sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya;

- 9) Memperjelas dan merinci catatan dan rekomendasi perbaikan yang terdapat didalam LKE AKIP pada setiap OPD sehingga dapat diketahui dengan pasti titik-titik mana saja pada setiap komponen SAKIP yang memerlukan perbaikan, tidak hanya berkaitan dengan catatan/rekomendasi yang sifatnya pemenuhan tetapi juga aspek kualitas/substansi dan aspek pemanfaatannya;
- 10) Merumuskan mekanisme monitoring yang efektif untuk memastikan setiap Perangkat Daerah menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan;
- 11) Memanfaatkan hasil penialain AKIP internal sebagai pertimbangan dalam memberikan reward dan punishment untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di seluruh PD.

Dari hasil rekomendasi AKIP diatas, Pemerintah Kabupaten Malinau telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP dalam upaya perbaikan sebagai berikut:

- 1) Telah memperbaiki kualitas beberapa sasaran strategis agar berorientasi pada *outcame*, memastikan seluruh indikator kinerja telah SMART dan cukup mengukur sasaran strategis dan meninjau kembali penentuan target kinerja dari setiap indikator khususnya memastikan bahwa target kinerja progresif/meningkat setiap tahunnya dan menginterpretasikan sebuah kondisi yang baik;
- 2) Telah melakukan evaluasi dan perbaikan dokumen perencanaan PD untuk memastikan sasaran strategis berorientasi pada *outcame* dan indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART dan cukup mengukur sasaran strategis;
- 3) Telah mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun dan memperbaiki kualitas pohon kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;



- 4) Telah Menyusun pedoman penyusunan dokumen SAKIP (pengukuran kinerja, Laporan Kinerja dan pengumpulan data kinerja) yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan Penyusunan dokumen SAKIP oleh setiap Perangkat Daerah;
- 5) Telah melakukan evaluasi dan memperbaiki kualitas dokumen laporan kinerja Perangkat Daerah diantaranya dengan menyajikan perbandingan data realisasi kinerja terhadap target kinerja akhir periode renstra. Selanjutnya menyajikan analisis faktor-faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara mendalam dan spesifik sehingga dapat dijadikan dapat dijadikan dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut atau solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai upaya untuk mencapai atau meningkatkan capaian kinerja di tahun selanjutnya;
- 6) Telah menyusun draf pedoman evaluasi AKIP internal yang sifatnya lebih teknis yang mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB No 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Internal Instansi Pemerintah, kemudian memanfaatkannya sebagai panduan dalam melakukan evaluasi AKIP seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
- 7) Telah meningkatkan kualitas evaluasi AKIP internal diantaranya dengan memperluas/memperbanyak data/dokumen yang dievaluasi, mempertajam dan memperdalam analisis penilaian serta secara berkelanjutan dan melakukan peningkatan kompetensi para evaluator sehingga diharapkan simpulan akhir atas hasil penialain setiap PD sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya;
- 8) Telah memperjelas dan merinci catatan dan rekomendasi perbaikan yang terdapat didalam LKE AKIP pada setiap OPD sehingga dapat diketahui dengan pasti titik-titik mana saja pada setiap komponen SAKIP yang memerlukan perbaikan, tidak hanya berkaitan dengan catatan/rekomendasi yang sifatnya pemenuhan tetapi juga aspek kualitas/substansi dan aspek pemanfaatannya;
- 9) Telah memanfaatkan hasil penialain AKIP internal sebagai pertimbangan dalam memberikan reward dan punishment untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di seluruh PD.



Gambar 3.1. Pendampingan Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

d. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja nilai SAKIP sebesar Rp. 1.954.770.826 dari anggaran program-program yang mendukung capaian kinerja indikator Nilai SAKIP sebesar Rp. 2.421.118.100 atau capaian realisasi keuangan sebesar 80,74% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 93,48%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 466.347.274 atau sebesar 19,26%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan pelatihan penyusunan dokumen SAKIP.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.17.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	93,48	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	93,81%
			Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	80,36
			Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	65,66%
			Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	87,58%

Sumber : Bappeda dan Litbang, Inspektorat dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2022

Dari tabel 3.17.4 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Hasil capaian kinerja dan realisasi capaian keuangan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program-program yang mendukung indikator kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan.



NILAI LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah yang disebut LPPD adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini merupakan wujud pertanggungjawaban tugas pokok, fungsi dan strategi Pemerintah Kabupaten Malinau sebagai pelaksanaan dari visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini mengacu pada surat edaran Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 120.04/6977/OTDA, tanggal 31 Desember 2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2020. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan instrumen pembinaan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga hak dan kewenangan daerah dalam mengelola otonomi tetap sejalan dengan cita-cita nasional.

Realisasi Nilai LPPD Tahun 2022 belum dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Dalam Negeri karena masih dalam proses penandatanganan. Realisasi Nilai LPPD untuk Tahun 2020 dan 2021 tidak dilakukan penilaian Karena adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 sehingga banyak daerah yang tidak menyerahkan laporannya ke pusat (Kementerian Dalam Negeri).

17. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Dari KKN

Pengukuran sasaran terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dengan indikator kinerja sasaran opini BPK dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran opini BPK dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.18
Evaluasi Pencapaian Sasaran 17
Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Dari KKN

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%

Sumber : BPKD tahun 2022

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.18.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100%	100%

Sumber : BPKD tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi opini BPK tahun 2022 adalah WTP dengan realisasi tahun 2020 adalah WTP atau realisasi capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi tahun 2021 adalah WTP atau realisasi capaian kinerja sebesar 100%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai tahun 2022 Kabupaten Malinau masih mendapat Opini BPK adalah WTP.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.18.2

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%

Sumber : BPKD tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi opini BPK tahun 2022 adalah WTP dengan target akhir RPJMD tahun 2022 WTP, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 100% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, capaian kinerja untuk indikator kinerja Status Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau tahun 2022 mencapai 100% yang artinya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil di capai berdasarkan standar pemeriksaan BPK.

Pencapaian WTP mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah melakukan penyusunan laporan keuangan daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan penyajian yang diungkapkan juga sesuai dengan ketentuan. Penilaian tersebut menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern telah dilakukan secara efektif. Analisis capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dengan realisasi maupun capaian kinerja seperti yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

Opini WTP juga menggambarkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah telah dipertanggungjawabkan pelaksanaannya sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun *stakeholder* terkait.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi atas kualitas laporan keuangan dengan mempertimbangkan indikator :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
3. Kualitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Selain itu, ada 5 kriteria yang menjadi dasar penilaian atas kewajaran atas laporan keuangan antara lain, (1) Keterjadian dan Keberadaan, (2) Penilaian, (3) Hak dan Kewajiban, (4) Kelangkaan, (5) Pengungkapan. Kabupaten Malinau senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan sampai pelaporan.

Keberhasilan dalam pencapaian target bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala. Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target antara lain :

- a. Data yang tidak akurat/data yang tidak valid
- b. Laporan Keuangan dari setiap SKPD yang lambat atau tidak tepat waktu
- c. Sumber daya manusia pengurus barang OPD/Pengurus Barang masih ada yang kurang memiliki kompetensi dibidang penatausahaan dibidang aset.

- d. Dari sisi data, data aset belum semua OPD tertata dengan baik/belum tertib.
- e. Dari sisi administrasi dan penyimpanan masih belum tertib.

Dalam upaya peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau pada tahun yang akan datang perlu dilakukan alternative maupun strategi sebagai berikut :

- a. Komitmen semua ASN dan *stakeholder* maupun pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Peran APIP dalam pemantauan penerapan SPI di masing-masing OPD perlu dioptimalkan
- c. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan melalui program peningkatan kapasitas aparatur, khususnya aparatur pengelola keuangan, maupun melalui upaya perbaikan sistem dan kebijakan sistem dan kebijakan akuntansi serta manajemen aset.
- d. Perbaikan sistem melalui rencana aksi (*action plan*) agar proses perbaikan yang dilakukan jelas, terarah, terukur dan terpadu. Sehingga kelemahan dalam pengelolaan keuangan tidak terulang dimasa yang akan datang.
- e. Memprioritaskan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset.
- f. Tertib penyampaian laporan keuangan.
- g. Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
- h. Mengadakan pelatihan/bimtek mengenai pengelolaan keuangan daerah pada SKPD.
- i. Menyelenggarakan bimtek dan sosialisasi penyusunan laporan keuangan.
- j. Melakukan sinkronisasi data keuangan setiap bulan dengan OPD terkait.
- k. Melakukan pendampingan ke tiap OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendampingan penyusunan laporan aset.
- l. Menyelenggarakan bimtek pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

d. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja opini BPK sebesar Rp. 1.479.402.290 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.499.950.365 atau capaian realisasi sebesar 98,63% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 20.548.075 atau sebesar 1,37%.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.18.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Dari KKN	Opini BPK	100%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	98,63%
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	83,35%

Sumber : BPKD tahun 2022

Dari tabel 3.18.4 diatas, tampak bahwa hasil capaian indikator kinerja di dukung oleh program-program. Hasil capaian kinerja dan realisasi capain

keuangan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program-program yang mendukung indikator kinerja berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

18. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Pengukuran sasaran meningkatnya kemandirian keuangan daerah dengan indikator kinerja sasaran persentase PAD terhadap pendapatan daerah, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran persentase PAD terhadap pendapatan daerah dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.19
Evaluasi Pencapaian Sasaran 18
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	5%	3,74%	74,8%

Sumber : BPKD tahun 2022

- a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.19.1

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	3,74%	4.46%	5.26%	119,25%	140,64%

Sumber : BPKD tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi persentase PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2022 sebesar 3,74% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 4,46% atau realisasi capaian kinerja sebesar 119,25% dan realisasi tahun 2021 sebesar 5,26% atau realisasi capaian kinerja sebesar 140,64%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 16,14% terhadap capaian tahun 2020 dan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 28,89% terhadap capaian tahun 2021.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.19.2

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	3,74%	7%	53,42%

Sumber : BPKD tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi persentase PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2022 sebesar 3,74% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 7%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 53,42% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Formula indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ini adalah jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikali 100%. Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator kemandirian keuangan daerah serta sebagai wujud semangat desentralisasi pengelolaan keuangan di daerah. Semakin tinggi Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun dasar, menunjukkan bahwa kondisi keuangan suatu daerah semakin mandiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi khusus secara nyata dan bertanggungjawab. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Secara umum pencapaian kinerja untuk sasaran pada tahun 2022 baik, meskipun masih terdapat sasaran yang belum mencapai 100%. Keberhasilan tidak terlepas dan penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal ini antara lain:

1. Adanya komitmen yang tinggi dan penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.
2. Perencanaan dan masing-masing kegiatan telah focus pada apa yang akan dicapai

3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja.
4. Telah dilaksanakannya rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisik, untuk mengantisipasi kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan antara lain :

Adanya pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dan penggunaan tenaga jasa ahli dalam pelaksanaan kegiatan. Selain terdapat penyebab yang mendukung keberhasilan kinerja, terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja, yaitu:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas.
2. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran berbasis kinerja. Sebagai alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodic.

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut diatas antara lain:

- a. Memaksimalkan penganggaran berbasis kinerja
- b. Mendorong penyempurnaan kualitas pelayanan publik.
- c. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan para stakeholder (horizontal maupun instansi vertikal).
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia BPKD Kabupaten Malinau dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- e. Pembaharuan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
- f. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran.



d. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase PAD terhadap pendapatan daerah sebesar Rp. 2.385.366.580 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.898.201.000 atau capaian realisasi sebesar 82,35%. apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 74,8%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 60.234.613.110 atau sebesar 17,65%.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Hubungan antara program, capaian kinerja dan realisasi keuangan program tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.19.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	74,8%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Daerah	82,35%

Sumber : BPKD tahun 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Daerah dengan capaian kinerja mencapai angka 74,8% dengan realisasi keuangan 82,35%. Hal ini menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

19. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pengukuran sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja sasaran nilai indeks kepuasan masyarakat, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran nilai indeks kepuasan masyarakat dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.20
Evaluasi Pencapaian Sasaran 19
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	80,71	99,64%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2022

Tahun 2022 capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat mencapai 99,64% dari target RPJMD 81, realisasi yang dicapai tahun 2022 sebesar 80,71. Dari capaian yang diperoleh di tahun 2022 ini maka, kualitas pelayanan publik Kabupaten Malinau Tahun 2022 masuk dalam predikat **“Baik”**.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu:

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.20.1

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,71	78,28	79,31	96,98%	98,26%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 sebesar 80,71 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 78,28 atau realisasi capaian kinerja sebesar 96,98% dan realisasi tahun 2021 sebesar 79,31 atau realisasi capaian kinerja sebesar 98,26%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 3,10% terhadap capaian tahun 2020 dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 1,76% terhadap capaian tahun 2021.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.20.2**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,71	88,50	91,19%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2022 adalah perbandingan realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 sebesar 80,71 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 88,50, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya sebesar 91,19% terhadap target akhir RPJMD tahun 2022.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Penyusunan IKM berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai IKM Kabupaten Malinau diperoleh dari OPD yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pelayanan publik. IKM di Kabupaten Malinau dilaksanakan secara mandiri (OPD melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara langsung tanpa bantuan pihak ketiga).

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari survei kepuasan masyarakat pada lokus 7 OPD. Capaian IKM tahun 2022 juga lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021 di mana pada tahun 2022 indeks kepuasan masyarakat terealisasi 80,71% atau meningkat sekitar 1,76% dari tahun sebelumnya. Data hasil hasil survei kepuasan masyarakat secara lengkap yang disusun sesuai peringkat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20.3
Peringkat Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Pada Pemerintahan Kabupaten Malinau Tahun 2021

No	NAMA OPD	NILAI IKM SETELAH DIKONVERSIKAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84,04	B	Baik
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	83,44	B	Baik
3	Dinas Kesehatan PPKB	80,03	B	Baik
4	Dinas Pendidikan	80,04	B	Baik
5	Dinas Perhubungan	81,05	B	Baik
6	RSUD	76,79	B	Baik
7	PKM di Kabupaten Malinau	79,62	B	Baik
NILAI IKM KAB. MALINAU		80,71	B	Baik

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2022

Dari data tabel diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa secara umum kualitas pelayanan pada OPD yang melaksanakan pelayanan publik di Kabupaten Malinau dipersepsikan baik oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu berkisaran di antara 76,62 - 84,04. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran antara lain:

- 1) Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan yang lebih berkualitas,
- 2) Penyediaan dan publikasi dokumen standar pelayanan, pengembangan sistem informasi pelayanan, penanganan pengaduan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik.
- 3) Budaya kerja aparatur dalam melayani masyarakat semakin baik.

Dari nilai unsur terendah masing-masing OPD dapat diketahui masalah atau kendala yang ada pada masing-masing OPD dalam memberikan pelayanan publik yang optimal berbeda-beda. Kendala-kendala yang menghambat keberhasilan capaian kinerja seperti;

- 1) Penyebaran kuesioner melalui media yang belum efektif.
- 2) Masih kurang SDM untuk melakukan penyebaran kuesioner kepada responden/masyarakat secara langsung.
- 3) Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Dari beberapa kendala yang menghambat pencapaian kinerja yang telah disebutkan diatas maka akan dilakukan alternatif solusi kedepan untuk perbaikan yaitu :

1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan kejelasan dan kepastian petugas pelayanan serta kenyamanan lingkungan.
2. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kesesuaian pelayanan pada OPD pelayanan publik di Kabupaten Malinau mendatang lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.
3. Penyebaran kuesioner diperlukan melalui media yang lebih efektif lagi.
4. Disiapkannya lebih banyak SDM untuk melakukan penyebaran kuesioner kepada reseponden/ masyarakat secara langsung.

d. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar Rp. 414.028.610 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 417.418.406 atau capaian realisasi sebesar 99,18% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 99,64%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.3.389.440 atau sebesar 0,82%.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Hubungan antara program, capaian kinerja dan realisasi keuangan program tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.20.4
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	99,64%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	99,18%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau tahun 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada tahun 2022 capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai angka 99,64% dengan realisasi keuangan 99,91%. Hal ini menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

20. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa

Pengukuran sasaran meningkatnya penyelenggaraan pembangunan berbasis desa dengan indikator kinerja sasaran persentase peningkatan status desa mandiri, dalam proses pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja diuraikan dalam penjelasan berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran persentase peningkatan status desa mandiri dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.21
Evaluasi Pencapaian Sasaran 20
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	13,76	13,76	100%

Sumber : DPMD Tahun 2022

Tahun 2022 pencapaian sasaran meningkatnya penyelenggaraan pembangunan berbasis desa dengan indikator persentase peningkatan status desa mandiri yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 adalah 13,76 dan realisasi 13,76 dengan capaian tahun 2022 100%.

- Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.21.1

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	13,76	8,30	12,04	68,93%	87,5%

Sumber : DPMD Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri tahun 2022 sebesar 13,76 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 8,30 % atau realisasi capaian kinerja sebesar 68,93% dan realisasi tahun 2021 sebesar 12,04% atau realisasi capaian kinerja sebesar 87,50%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 65,78% terhadap capaian tahun 2020 dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 14,28% terhadap capaian tahun 2021.

- b. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.21.2

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	13,76%	21,05%	65,36%

Sumber : DPMD Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 adalah perbandingan realisasi persentase peningkatan status desa mandiri tahun 2022 sebesar 13,76% dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 21,05%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya indikator kinerja persentase peningkatan status desa mandiri sebesar 65,36% terhadap target akhir RPJMD tahun 2026.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada Oktober 2016. IDM bisa dijadikan rujukan untuk pengentasan jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri di Indonesia. Penentuan IDM dengan meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama proses kemajuan dan pemberdayaan desa. IDM menggunakan pendekatan yang bertumpu pada kekuatan sosial, ekonomi dan ekologi tanpa melupakan kekuatan politik, budaya, sejarah, dan kearifan lokal. IDM ini sendiri dibuat untuk memperkuat pencapaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. IDM dipakai sebagai acuan dalam melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya untuk mewujudkan kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri. Desa Membangun Indonesia tetap dihadapkan pada kenyataan kemiskinan di Desa. Maka, ketersediaan data dan pengukuran sangat dibutuhkan. Khususnya dalam pengembangan intervensi kebijakan yang mampu menjawab persoalan dasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa menjadi lima status yakni Desa sangat tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Klasifikasi dalam lima status itu untuk mempertajam penetapan status perkembangan desa sekaligus sebagai rujukan intervensi kebijakan.

Desa berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan seperti goncangan ekonomi, bencana alam, atau konflik sosial maka dapat memengaruhi status Desa Berkembang

turun menjadi Desa Tertinggal. Sementara, apabila Desa Berkembang mempunyai kemampuan dalam mengelola potensi, informasi / nilai, inovasi / prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju. Indeks Desa Membangun merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

UU Desa tahun 2016 tersebut yang sekarang menjadi pendukung utama untuk mempercepat ketercapaian program pembangunan desa. Oleh karena itu masyarakat desa sebagai subjek utama dari program ini akan mendapatkan perhatian lebih oleh negara khususnya dalam peningkatan kualitas sumber dayanya agar menjadi manusia yang berdikari dan mandiri. Selanjutnya diharapkan akan berimplikasi terhadap kondisi desa yang maju, mampu mengolah dan memanfaatkan potensi yang ada untuk kemakmuran desa. desa adalah suatu wilayah yang ditempati sekumpulan manusia yang hidup bersama, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Berdasarkan pengertian di atas desa saat ini mempunyai kekuatan yang besar untuk mengolah segala potensi yang ada di desa. Hal ini akan diperkuat dengan ketersediaan SDM yang sudah ada di desa. Di era reformasi, menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan merupakan hal yang penting. Apalagi sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah pedesaan dengan jumlah penduduknya yang besar. Oleh karena itu menggali potensi desa dan sumber-sumber produksi yang selama ini ditelantarkan penting untuk diberdayakan. Salah satu ukuran bagaimana program ini berdampak positif terhadap pembangunan desa dengan melihat hasil dari indeks pembangunan desa. Indeks pembangunan desa ini yang kemudian direalisasikan dengan peraturan menteri desa no 80 Tahun 2022 tentang indeks desa membangun. Kementrian desa melalui permendesa no 2 tahun 2022 tersebut, telah menetapkan beberapa indikator yang memberikan kemudahan bagi desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desa. Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri, sedangkan tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah :

- a) menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
- b) menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa

Ketercapaian sasaran pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diperoleh dari perbandingan jumlah Desa Mandiri, berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun berjalan dengan jumlah Desa yang ada di Kabupaten Malinau dikalikan 100%. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Selain faktor-faktor yang mendukung keberhasilan di atas masih terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan pada tahun 2022 realisasi capaian tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala atau hambatan-hambatan yang dimaksud adalah karena desa sengayan belum bisa memenuhi poin yang ditargetkan untuk menjadi desa mandiri sehingga yang terealisasi hanya 2 Desa, adanya pendampingan yang dilakukan oleh DPMD bersama Tenaga ahli P3MD dan beberapa OPD yang terkait dalam mendukung kenaikan capaian kinerja peningkatan status desa mandiri serta

desa tersebut mengganggu kegiatan yang menjadi target pencapaian Desa Mandiri sehingga menambah point tersebut.

**Dokumentasi Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan
Kemandirian Desa.**



d. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase peningkatan status desa mandiri sebesar Rp.46,104.600 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.49.982.000 atau capaian realisasi sebesar 92,24% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 3.877.400 atau sebesar 7,76%.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.21.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	CAPAIAN ANGGARAN (%)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	100%	Program Penataan Desa	92,24%

Sumber : DPMD Tahun 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program penataan desa dengan capaian kinerja mencapai angka 100% dengan realisasi keuangan 92,24%. Hal ini menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

C. REALISASI ANGGARAN

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen bahwa anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui penyerahan sumber-sumber pendapatan daerah.

Tabel 3.22
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Konsolidasi)
Tahun Anggaran 2022
01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	2	3	$4 = \frac{3}{2} \times 100$	5
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	13.601.928.870,00	11.104.533.079,00	81,64	13.866.573.016,00
Pendapatan Retribusi Daerah	1.825.433.134,00	1.614.238.693,00	88,43	2.408.229.534,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.350.680.716,00	3.794.954.038,39	113,26	3.503.009.671,36
Lain-Lain PAD yang Sah	36.779.577.702,00	50.512.443.191,05	137,34	55.031.943.326,68
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	55.557.620.422,00	67.026.169.001,44	120,64	74.809.719.548,04
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	36,361.671.000,00	52.378.480.894,00	144,05	41.240.604.702,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	237.993.343.000,00	270.582.413.122,00	113,69	143.297.991.339,00



Dana Alokasi Umum	782.097.116.000,00	782.577.174.639,00	100,06	779.926.601.361,00
Dana Alokasi Khusus	115.660.853.000,00	91.471.372.964,00	79,09	108.405.677.011,00
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT - DANA PERIMBANGAN	1.172.112.983.000,00	1.197.009.441.619,00	102,12	1.072.870.874.413,00
TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT - LAINNYA				
Dana Insentif Daerah (DID)	8.126.663.000,00	8.126.663.000,00	100,00	19.625.186.000,00
Dana Desa	113.793.572.000,00	113.793.572.000,00	100,00	171.145.649.000,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT - LAINNYA	121.920.235.000,00	121.920.235.000,00	100,00	190.770.835.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	40.712.198.986,00	47.733.391.363,00	117,25	48.631.549.939,90
Bantuan Keuangan	16.759.093.069,00	12.584.743.068,33	75,09	12.183.140.910,00
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	57.471.292.055,00	60.318.134.431,33	104,95	60.814.690.850,37
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.351.504.510.055,00	1.379.247.811.050,33	102,05	1.324.456.400.263,37
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	-	-	-	2.511.000.000,00
Pendapatan Lainnya	4.500.000.000,00	4.457.008.753,00	99,04	18.035.254.000,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.500.000.000,00	4.457.008.753,00	99,04	20.546.254.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.411.562.130.477,00	1.450.730.988.804,77	102,77	1.419.812.373.811,41
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Tanah	2.550.000.000,00	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	467.805.193.175,00	430.317.069.854,54	91,99	368.895.538.503,19
Belanja Gedung dan Bangunan	49.749.035.396,00	34.412.435.875,00	69,17	14.725.005.950,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	43.187.478.686,00	41.324.973.425,00	95,69	30.695.745.068,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.027.537.000,00	960.387.456,00	93,46	1.034.439.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL	163.978.259.104,00	134.670.133.753,00	82,13	101.357.607.237,00
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	58.798.333.541,00	1.024.987.500,00	1,74	25.292.777.495,00
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	58.798.333.541,00	1.024.987.500,00	1,74	25.292.777.495,00
JUMLAH BELANJA	1.305.977.179.502,00	1.084.970.245.445,54	83,08	1.026.771.800.811,19
TRANSFER				
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
Belanja Bantuan Keuangan	269.427.308.000,00	269.427.308.000,00	100,00	326.779.385.000,00
JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KEDESA	269.427.508.000,00	269.427.308.000,00	100,00	326.779.385.000,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.575.404.487.502,00	1.354.397.553.445,54	85,97	1.353.551.185.811,19
SURPLUS/DEFISIT	(163.842557.025,00)	96.333.435.359,23	(58,80)	66.261.188.000,22
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SiLPA	163.842.357.025,00	154.984.253.565,73	94,59	100.581.169.024,69
Jumlah Penerimaan	163.842.357.025,00	154.984.253.565,73	94,59	100.581.169.024,69
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	3.000.000.000,00



Jumlah Pengeluaran	-	-	-	3.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO	163.842.357.025,00	154.984.253.565,73	94,59	97.581.169.024,69
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		251.317.688.924,96	-	163.842.357.024,91

Sumber Data : BPKD Kabupaten Malinau (SIPD)

Tabel 3.23
Anggaran, Realisasi dan Capaian Berdasarkan Indikator dan Program

TUJUAN/SASARAN / INDIKATOR SASARAN / PROGRAM		CAPAIAN KINERJA 2022	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi					
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat					
Angka Usia Harapan Hidup		99,38%	Rp 73.490.790.137	Rp 55.497.925.903	75,52%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			Rp 50.544.598.098	Rp 36.325.314.443	71,86%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			Rp 20.462.980.739	Rp 18.000.035.932	87,96%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			Rp 480.000.000	Rp 104.219.000	21,71%
Program pengendalian Penduduk			Rp 73.416.600	Rp 58.360.928	79,49%
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)			Rp 1.366.074.700	Rp 950.245.600	69,56%
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)			Rp 563.720.000	Rp 59.750.000	10,59
Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat					
Angka Rata-Rata Lama Sekolah		99,05%	Rp 99.608.714.920	Rp 90.589.896.588	93,2%
Program Pengelolaan Pendidikan			Rp 84.308.714.920	Rp 75.830.429.122	89,94%
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan			Rp 15.300.000.000	Rp 14.759.467.466	96,46%
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat					
Pengeluaran perkapita		101,52%	Rp	Rp	
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting			Rp 3.525.082.600	Rp 2.763.372.844	78,31%
Program standarisasi perlindungan konsumen			Rp 90.000.000	Rp	
Menciptakan Suasana Kondusif Yang Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia					
Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram Dan Harmonis Dan Serta Bebas Bencana					
Angka Kriminalitas		184%	Rp 126.039.600	Rp 124.737.000	98,97%
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			Rp 126.039.600	Rp 124.737.000	98,97%
Indeks Resiko Bencana		125,28%	Rp 479.600.000	Rp 423.213.000	88,24%
Program Penanggulangan Bencana			Rp 479.600.000	Rp 423.213.000	88,24%
Meningkatnya kesetaraan gender					
Indeks Pembangunan Gender		98,36%	1.248.103.800	1.245.304.379	99,78%
Program Perlindungan Perempuan			Rp 400.000.000	Rp 399.851.000	99,96%



TUJUAN/SASARAN/ INDIKATOR SASARAN / PROGRAM				CAPAIAN KINERJA 2022	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Rp 388.103.800	Rp 387.342.935	99,80%
			Program Pemberdayaan Sosial		Rp 180.000.000	Rp 179.235.010	99,58%
			Program Perlindungan Khusus Anak		Rp 50.000.000	Rp 49.433.400	98,87%
			Program Rehabilitasi Sosial		Rp 230.000.000	Rp 229.442.034	99,76%
Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter Dan Budaya Masyarakat							
		Indeks Kerukunan Beragama		102,14%			
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Rp 400.000.000	Rp 399.993.000	99,99%
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Rp 600.000.000	Rp 600.000.000	100%
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Dan Karekteristik Daerah							
	Meningkatnya Produktifitas Sektor Sektor Ekonomi Primer Berorientasi Pada Potensi dan Karakteristik Lokal						
	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB			59,33%	Rp 2.107.525.775	Rp 1.829.024.296	86,79%
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		Rp 407.983.000	Rp 346.689.400	84,97%
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Rp 245.019.600	Rp 241.682.000	98,63%
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Rp 418.007.800	Rp 352.825.810	84,41%
			Program Penyuluh Pertanian		Rp 50.000.000	Rp 49.969.000	99,94%
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Rp 714.029.000	Rp 653.694.111	88,21%
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Rp 272.486.375	Rp 184.163.975	67,58%
	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah						
		Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB			105,55%	Rp 4.215.279.395	Rp 4.016.864.540
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		Rp 3.835.339.350	Rp 3.636.924.495	94,82%	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Rp 379.940.045	Rp 379.940.045	100%	
Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB			90,76%	Rp 547.998.500	Rp 463.138.751	84,51%	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Rp 298.000.000	Rp 253.536.251	85,08%	
		Program Pemasaran Pariwisata		Rp 249.998.500	Rp 209.602.500	83,84%	
Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro yang Berkualitas							
	Persentase Peningkatan Koperasi berkualitas			103,43%	Rp 600.798.176	Rp 446.773.553	74,36%
		Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian		Rp 600.798.176	Rp 446.773.553	74,36%	
	Persentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil			116,01%	Rp 2.848.437.250	Rp 2.670.967.410	93,77%



TUJUAN/SASARAN / INDIKATOR SASARAN / PROGRAM			CAPAIAN KINERJA 2022	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
		program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)		Rp 2.848.437.250	Rp 2.670.967.410	93,77%
	Meningkatnya Ketahanan Pangan					
		Indeks Ketahanan Pangan	91,31	Rp 525.000.000	Rp 508.062.000	96,77%
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Rp 400.000.000	Rp 388.932.000	97,23%
		Program Penanganan Kerawanan Pangan		Rp 75.000.000	Rp 70.770.000	94,36%
		Program Pengawasan Keamanan Pangan		Rp 50.000.000	Rp 48.360.000	96,72%
	Menurunnya Angka Pengangguran					
		Tingkat Pengangguran Terbuka	120,28%	Rp 1.714.952.000	Rp 1.576.859.469	91,94%
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		Rp 1.080.000.000	Rp 1.004.949.134	93,05%
		Program Penempatan Tenaga Kerja		Rp 634.952.000	Rp 520.635.988	81,99%
	Meningkatnya Investasi Daerah					
		Nilai Investasi Daerah	1,183%	Rp 383.914.000	Rp 251.319.785	65,46%
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Rp 383.914.000	Rp 251.319.785	65,46%
	Mewujudkan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Daerah					
	Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur Berwawasan Lingkungan					
		Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	24,32%	Rp 40.484.526.586	Rp 39.079.858.666	96,53%
		Program Penyelenggaraan Jalan		Rp 40.484.526.586	Rp 39.079.858.666	96,53%
		Persentase Pemukiman Yang Layak	105,41%	Rp 5.083.349.200	Rp 5.080.555.475	99,95%
		Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah		Rp 5.083.349.200	Rp 5.080.555.475	99,95%
		Rasio Rumah Layak Huni	1:08	Rp 6.999.852.865	Rp 6.777.657.328	96,83%
		Program pengembangan Permukiman		Rp 6.999.852.865	Rp 6.777.657.328	96,83%
		Persentase Desa Yang Terhubung Moda Transportasi	114,61%	Rp 1.056.328.650	Rp 355.632.100	33,66%
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Rp 1.056.328.650	Rp 355.632.100	33,66%
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum	117,66%	Rp 11.897.625.400	Rp 11.822.311.289	99,37%
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Rp 11.897.625.400	Rp 11.822.311.289	99,37%
		Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi	85,20%	Rp 5.074.973.826	Rp 4.855.441.599	95,67%
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Rp 5.074.973.826	Rp 4.855.441.599	95,67%
	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisirliran Daerah					
		Persentase Desa yang Terlayani Telekomunikasi	100%	Rp 2.530.000.035	Rp 2.205.213.208	91,52%
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik		Rp 80.000.000	Rp 76.946.000	96,18%



TUJUAN/SASARAN/ INDIKATOR SASARAN / PROGRAM			CAPAIAN KINERJA 2022	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
		Program Aplikasi Informatika		Rp 2.450.000.035	Rp 2.128.267.208	86,87%
Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup						
Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara						
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	100%	Rp 6.700.000.000	Rp 793.158.500	11,84%
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		Rp 6.700.000.000	Rp 793.158.500	11,84%
		Indeks Kualitas air	116,27%	Rp 800.000.000	Rp 309.386.700	38,67%
		Indeks Kualitas Udara	104,33%	Rp 350.695.069	Rp 264.617.000	75,45%
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Rp 1.150.695.069	Rp 574.003.700	36,67%
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Governance)						
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah						
		Nilai SAKIP	93,48%	2.421.118.100	1.954.770.826	80,74%
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Rp 1.007.325.100	Rp 945.049.000	93,81%
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Rp 230.000.000	Rp 184.849.975	80,36%
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		Rp 966.895.000	Rp 634.903.851	65,66%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp 216.898.000	Rp 189.968.000	87,58%
Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN						
		Oini BPK	100%	Rp 342.955.001.306	Rp 282.699.840.121	90,49%
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Rp 1.499.950.365	Rp 1.479.402.290	98,63%
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Rp 341.455.050.941	Rp 281.220.437.831	82,35%
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah						
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	74,6%	Rp 2.898.201.000	Rp 2.385.366.580	82,35%
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Rp 2.898.201.000	Rp 2.385.366.580	82,35%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
		Indeks Kepuasan Masyarakat	99,64%	Rp 417.418.406	Rp 414.028.610	99,18%

TUJUAN/SASARAN/ INDIKATOR SASARAN / PROGRAM				CAPAIAN KINERJA 2022	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp 417.418.406	Rp 414.028.610	99,18%
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa				
			Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	100%	Rp 49.982.000	Rp 46.104.600	92,24%
			Program Penataan Desa		Rp 49.982.000	Rp 46.104.600	92,24%
			Program Administrasi Pemerintahan Desa		Rp 419.976.200	Rp 360.241.580	85,78%

Tabel 3.24
EFISIENSI ANGGARAN

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)		EFISIENSI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	Rp	%
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	73.490.790.137	55.497.925.903	17.992.864.234	24,48%
2	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	99.608.714.920	90.589.896.588	9.018.818.332	9,05%
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat				
4	Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram Dan Harmonis Dan Serta Bebas Bencana	605.639.600	547.950.000	57.689.600	9,53%
5	Meningkatnya kesetaraan gender	1.248.103.800	1.245.304.379	2.799.421	0,22%
6	Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter Dan Budaya Masyarakat				
7	Meningkatnya produktifitas sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	2.107.525.775	1.829.024.296	278.501.479	13,21%
8	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	4.763.277.895	4.480.003.291	283.274.604	5,95%
9	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro yang Berkualitas	3.449.235.426	3.117.740.963	331.494.463	9,61%
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan	525.000.000	508.062.000	16.938.000	3,23%
11	Menurunnya Angka Pengangguran	1.714.952.000	1.576.859.469	138.092.531	8,05%
12	Meningkatnya Investasi daerah	383.914.000	251.319.785	132.594.215	34,54%
13	Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	70.596.656.527	67.971.456.457	2.625.200.070	3,73%
14	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka	2.530.000.035	2.205.213.208	324.786.827	12,84%



	Keterisoliran Daerah				
15	Meningkanya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	7.850.695.069	1.367.162.200	6.483.532.869	82,59%
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2.421.118.100	1.954.770.826	466.347.274	19,27%
17	Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	342.955.001.306	282.699.840.121	60.255.161.185	9,51%
18	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	2.898.201.000	2.385.366.580	512.834.420	17,69%
19	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	417.418.406	414.028.610	3.389.796	0,81%
20	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	49.982.000	46.104.600	3.877.400	7,76%

BAB IV

PENUTUP

Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2022 yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Malinau, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Kabupaten Malinau. Meskipun disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan para *stakeholder* dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau selama tahun 2022 baik menyangkut keberhasilan maupun ketidakberhasilannya.

Di masa mendatang Pemerintah Kabupaten Malinau akan senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan untuk lebih menyempurnakan pelaporan kinerja ini. Berbagai hasil yang telah diraih oleh Kabupaten Malinau selama ini akan selalu dijadikan modal berharga untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang terjadi dijadikan pelajaran berharga untuk melangkah menuju Malinau yang lebih baik di hari esok.

Mengingat masih ada kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Malinau pada tahun 2022, dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk tahun-tahun mendatang akan tetap difokuskan pada :

- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Government*).
- Perbaikan dan peningkatan dalam pelayanan publik.
- Peningkatan kapasitas personil dan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik.
- Penegakan hukum dan perundang-undang, serta perbaikan dalam sistem informasi kinerja pemerintah daerah.
- Peningkatan kualitas perencanaan kinerja.
- Penyempurnaan mekanisme pengumpulan data kinerja.



Dengan tersusunnya Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2022 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergis, inovatif dan kolaboratif bersama masyarakat dan semua pihak.

LAMPIRAN



**DAFTAR PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN DARI PEMERINTAH PUSAT
SERTA LEMBAGA NIRLABA YANG DIANUGERAHKAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022**

NO	NAMA PENGHARGAAN
1	Piagam penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2022 pada bidang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki prestasi yang sangat baik yaitu selama sembilan tahun berturut-turut yaitu tahun anggaran 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 memperoleh piagam penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2	Piagam penghargaan predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 oleh Ombudsman RI Kategori B (Zona Hijau).
3	Piagam penghargaan kepada unit pelayanan sektoral yang memperoleh nilai tertinggi se-Kalimantan Utara kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau oleh Ombudsman RI Kategori B (Zona Hijau).
4	Piagam penghargaan sebagai Desa Mandiri kepada Pemerintah Desa Pelita Kanaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
5	Penghargaan kepada Bupati Malinau sebagai Bupati Peduli Olahraga dari SIWO PWI Pusat pada ajang Malam Anugerah Olahraga Golden Awards V SIWO PWI Pusat.
6	Piagam penghargaan kepada Posyantek Karya Mandiri sebagai juara I dalam lomba Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022
7	Piagam penghargaan kepada Aprem sebagai juara II dalam lomba Teknologi Tepat Guna unggulan tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022
8	Piagam penghargaan kepada Hasbullah sebagai juara III dalam lomba Teknologi Tepat Guna unggulan tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022



Piagam penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2022 pada bidang pengelolaan keuangan daerah



Piagam penghargaan predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 oleh Ombudsman RI Kategori B (Zona Hijau)



Piagam penghargaan kepada unit pelayanan sektoral yang memperoleh nilai tertinggi se Kalimantan Utara kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau oleh Ombudsman RI Kategori B (Zona Hijau)



Piagam penghargaan sebagai Desa Mandiri kepada Pemerintah Desa Pelita Kanaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI



Penghargaan kepada Bupati Malinau sebagai Bupati Peduli Olahraga dari SIWO PWI Pusat pada ajang Malam Anugerah Olahraga Golden Awards V SIWO PWI Pusat



Piagam penghargaan kepada Posyantek Karya Mandiri sebagai Juara I dalam lomba Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022



Piagam penghargaan kepada Aprem sebagai juara II dalam lomba
Teknologi Tepat Guna unggulan tingkat Provinsi Kalimantan
Utara tahun 2022



Piagam penghargaan kepada Hasbullah sebagai juara III dalam
lomba Teknologi Tepat Guna unggulan tingkat Provinsi
Kalimantan Utara tahun 2022



BUPATI MALINAU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

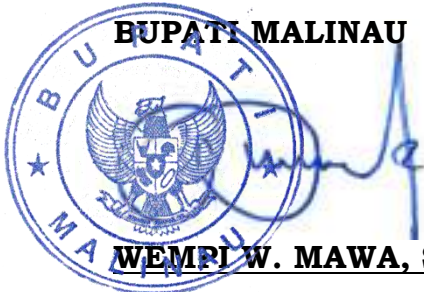
Nama : WEMPI W. MAWA, SE., M.H

Jabatan : BUPATI MALINAU

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Malinau, 20 Oktober 2022


BUPATI MALINAU
WEMPI W. MAWA, SE., M.H



PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TERGET
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka usia harapan hidup (Tahun)	71,94
2	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,50
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran perkapita (Ribu Rupiah)	10.150,00
4	Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Teneteram dan Harmonis Serta Bebas Bencana	Angka Kriminalitas (%)	0,58
		Indeks Resiko Bencana (Poin)	124,4
5	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	83,36
6	Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Beragama (Poin)	79,25
		Indeks Pembangunan Kebudayaan/ Masyarakat (Poin)	78,5
7	Meningkatnya Produktifitas Sektor-Sektor Ekonomi Primer Berorientasi Pada Potensi dan Karakteristik Lokal	Kontribusi Pertanian Terhadap PDRB (%)	4,82
8	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata yang Berorientasi Pada Potensi dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB (%)	2,70
		Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	1,84
9	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro Yang Berkualitas	Persentase Koperasi Peningkatan Berkualitas (%)	70
		Pesentase Peningkatan Usaha Mikro dan Kecil (%)	70,60
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Poin)	73,65
11	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,14



12	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah (Rp Milyar)	90.500.000.000
13	Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan	Pesentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	50,0
		Pesentase Pemukiman Yang Layak (%)	77
		Rasio Rumah Layak Huni (Rasio)	1:1,074
		Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi (%)	65
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	67
		Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi (%)	28,01
14	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah	Persentase Desa Yang Terlayani Telekomunikasi (%)	96,33
15	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	100
		Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	53,65
		Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	91,25
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	64,20
		Nilai LPPD	2.930
17	Terselenggaranya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari KKN	Opini BPK	WTP
18	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	5
19	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	81
20	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (%)	13,76



PROGRAM		ANGGARAN	
SASARAN			
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	50.544.598.098
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	20.462.980.739
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	2.255.861.140
	Program pengendalian Penduduk	Rp	73.416.600
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	1.366.074.700
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	563. 720.000
2	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat		
	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	84.308.714.920
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	15.300.000.000
3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat		
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	3.525.082.600
	Program standarisasi perlindungan konsumen	Rp	90.000.000
4	Terciptanya Kehidupan Yang Aman, Tenteram Dan Harmonis Dan Serta Bebas Bencana		
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	126.039.600
	Program Penanggulangan Bencana Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	249.600.000
		Rp	1.111.208.000
5	Meningkatnya kesetaraan gender		
	Program Perlindungan Perempuan	Rp	50.000.000
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	388.103.800
	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	180.000.000



	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	50.000.000
	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	230.000.000
6	Mantapnya Kehidupan Keagamaan Serta Karakter Dan Budaya Masyarakat		
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	400.000.000
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp	600.000.000
7	Meningkatnya produktifitas sektor sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	407.983.000
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	245.019.600
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	418.007.800
	Program Penyuluh Pertanian	Rp	50.000.000
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	365.850.000
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	272.486.375
8	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah		
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	3.835.339.350
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	379.940.045
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	298.000.000
	Program Pemasaran Pariwisata	Rp	249.998.500
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	65.000.000
9	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi Serta Usaha Kecil dan Mikro yang Berkualitas		



	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Rp	600.798.176
	program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	2.848.437.250
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan		
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	400.000.000
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	75.000.000
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	50.000.000
11	Meningkatnya Profesionalitas Tenaga Kerja		
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	1.080.000.000
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	634.952.000
	Program Hubungan Industrial	Rp	300.000.000
12	Meningkatnya Investasi daerah		
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	383.914.000
13	Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur Berwawasan Lingkungan		
	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	40.484.526.586
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp	6.257.712.770
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	1.056.328.650
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	11.897.625.400
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	5.074.973.826
	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	4.783.805.499
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	24.162.198.250
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	1.799.995.458
	Program pengembangan Permukiman	Rp	6.999.852.865



14	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Yang Membuka Keterisoliran Daerah		
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	80.000.000
	Program Aplikasi Informatika	Rp	2.450.000.035
15	Meningkanya Kualitas Lahan, Air Dan Udara		
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	1.150.693.069
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp	405.000.000
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	6.700.000.000
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	5.083.349.200
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	1.007.325.100
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	230.000.000
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	966.895.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	217.000.000
17	Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN		
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	1.499.950.365
18	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah		
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	341.455.050.941



19 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	417.418.406
---	----	-------------

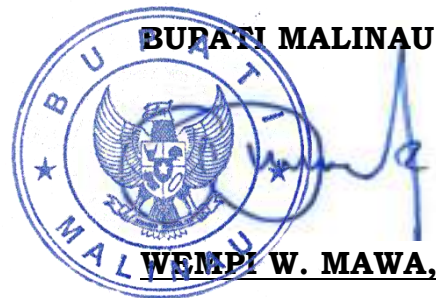
20 Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa

Program Penataan Desa	Rp	49.982.000
-----------------------	----	------------

Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	419.976.200
--	----	-------------

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	6.057.475.250
---	----	---------------

Malinau, 20 Oktober 2022



WEMPI W. MAWA, SE., M.H